

# STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2008

ISBN.

No Publikasi : 04220.  
Katalog BPS :  
Ukuran Buku : 21 Cm x 29 Cm  
Jumlah Halaman : 155

Naskah :

Sub Direktorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Gambar Kulit :

Subdit Direktorat Publikasi Statistik

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

Dicetak oleh :

*Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya*

## Kata Pengantar

Pemuda (penduduk usia 15-35 tahun) Indonesia adalah bagian dari penduduk usia produktif yang menjadi tulang punggung dalam proses pembangunan nasional, karena sepertiga penduduk Indonesia merupakan kelompok pemuda. Mengingat besarnya jumlah dan potensi pemuda maka ketersediaan data statistik yang akurat dan mutakhir tentang pemuda sangat dibutuhkan dengan harapan dapat menjadi referensi (rujukan) dalam menentukan perencanaan dan perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pemuda.

Dalam upaya membantu menyediakan data dan informasi statistik tentang pemuda Indonesia, secara berkala Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan publikasi “Statistik Pemuda Indonesia”. Karakteristik pemuda yang disajikan dalam publikasi Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2008 ini antara lain mengenai profil demografis pemuda, pendidikan pemuda, ketenagakerjaan dan kesehatan pemuda. Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2008.

Publikasi Statistik Pemuda tahun 2008 ini diyakini masih mempunyai banyak kekurangan/keterbatasan, baik dalam kelengkapan data maupun kedalaman uraian. Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terbitnya publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Nopember 2009  
Kepala Badan Pusat Statistik

DR. Rusman Heriawan

## **Ringkasan Eksekutif**

Pemuda merupakan aset Sumber Daya Manusia paling potensial yang dapat diandalkan dalam kegiatan pembangunan baik dari aspek produktivitas maupun kuantitasnya. Sebagai kelompok yang paling potensial, pemuda mempunyai peran sebagai generasi pelopor yang diharapkan mampu melakukan perubahan yang besar bagi perkembangan bangsa dan negara. Pemuda juga menempati posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan, baik sebagai subyek maupun obyek dari pembangunan itu sendiri. Jumlah pemuda yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, menempatkan pemuda menjadi kelompok yang patut diperhatikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk ditelaah lebih lanjut mengenai keadaan

pemuda baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Secara kuantitas, dapat dilihat bahwa jumlah pemuda pada tahun 2008 tercatat sebesar 78,72 juta jiwa atau 34,52 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 228,02 juta jiwa. Keadaan ini menjadi aset potensial karena sepertiga lebih penduduk Indonesia merupakan kelompok pemuda (penduduk usia 15-35 tahun). Persentase penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun sebesar 29,13 persen dan penduduk yang berumur lebih dari 35 tahun sebesar 36,35 persen. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, 50,76 persen dari komposisi pemuda adalah pemuda perempuan dan sisanya sebesar 49,24 persen adalah pemuda laki-laki, sedangkan berdasarkan tipe daerah, sebanyak 51,08 persen pemuda perempuan dan 48,92 persen pemuda laki-laki tinggal di perkotaan, sementara 50,42 persen pemuda perempuan dan sebanyak 49,58 persen pemuda laki-laki tinggal di perdesaan.

Struktur umur pemuda pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pemuda pada kelompok umur 30-35 tahun merupakan komponen terbesar pemuda dengan persentase mencapai sekitar 27,88 persen. Kelompok umur terbesar berikutnya adalah kelompok umur 15-19 tahun sebesar 25,67 persen, kemudian diikuti dengan umur 25-29 tahun sebesar 24,10 persen dan yang terkecil yaitu pemuda kelompok umur 20-24 tahun dengan persentase sebesar 22,35 persen. Di daerah perdesaan pemuda pada kelompok umur 30-35 tahun jumlahnya sebesar 28,52 persen, diikuti pemuda pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 26,52 persen, kelompok umur 25-29 tahun sebesar 23,74 persen dan kelompok umur 20-24 tahun sebagai komponen terkecil sebesar 21,21 persen. Seperti daerah perdesaan, komponen terbesar pemuda di daerah perkotaan juga pemuda pada kelompok umur 30-35 tahun dengan persentase sebesar 27,26 persen, diikuti pemuda pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 24,86 persen, kemudian kelompok umur 25-29 tahun sebesar 24,45 persen dan kelompok umur 20-24 tahun sebesar 23,42 persen.

Dilihat menurut status perkawinan, diketahui bahwa lebih dari separuh pemuda atau sekitar 50,35 persen pemuda berstatus kawin. Sementara itu, persentase pemuda yang berstatus belum kawin juga relatif besar dan hanya berbeda sedikit dengan pemuda yang berstatus kawin yaitu sebesar 47,88 persen. Sisanya sebesar 1,76 persen adalah mereka yang berstatus cerai hidup/mati.

Secara keseluruhan, pendidikan pemuda laki-laki masih lebih baik dibandingkan dengan pemuda perempuan. Data Tahun 2008 menunjukkan masih tingginya persentase pemuda perempuan yang tidak pernah sekolah dibandingkan dengan persentase pemuda laki-laki. Begitu pula dengan pemuda perempuan yang sudah tidak bersekolah lagi, persentasenya lebih besar daripada pemuda laki-laki. Sementara itu, pemuda perempuan yang masih bersekolah persentasenya justru lebih rendah daripada persentase pemuda laki-laki yang masih bersekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pemuda laki-laki secara keseluruhan masih lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan. Hal ini terlihat dari rendahnya angka APS pemuda perempuan daripada APS pemuda laki-laki pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jika dilihat menurut kelompok umur, nampak bahwa pada usia 15 tahun APS perempuan sedikit lebih tinggi dibanding APS laki-laki. Akan tetapi, keadaan sebaliknya terjadi pada kelompok umur di atasnya, dimana APS pemuda laki-laki cenderung lebih tinggi dari APS pemuda perempuan. Kecenderungan makin menurunnya APS penduduk perempuan pada usia yang semakin tinggi ini mengindikasikan semakin terbatasnya aksesibilitas pemuda perempuan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Angka buta huruf pemuda perempuan tercatat 2 kali lipat lebih tinggi dibanding angka buta huruf pemuda laki-laki yaitu 1,34 persen berbanding 0,66 persen. Kondisi serupa berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan pemuda laki-laki yang buta huruf hanya sekitar 0,17 persen sedangkan untuk pemuda perempuan mencapai sebesar 0,35 persen. Ini berarti bahwa hampir 100 persen pemuda di perkotaan sudah melek huruf. Di daerah

perdesaan, jumlah pemuda laki-laki yang buta huruf persentasenya masih sebesar 1,17 persen sedangkan untuk pemuda perempuan persentasenya lebih tinggi lagi yaitu sebesar 2,39 persen.

Pendidikan tertinggi yang dicapai oleh sebagian besar pemuda secara umum hanya sampai pada tingkat atau jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Persentase pemuda yang pendidikan tertingginya sampai SD sebesar 29,04 persen, sedangkan tingkat SMP sebesar 29,13 persen. Pemuda yang telah berhasil menamatkan pendidikannya hingga perguruan tinggi persentasenya masih kurang dari 6 persen. Persentase pemuda yang tidak/belum pernah sekolah tercatat sebesar 1,48 persen dan pemuda yang tidak/belum tamat SD persentasenya sebesar 5,57 persen. Mayoritas pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pemuda laki-laki adalah SMP dan SM dengan persentase masing-masing sebesar 29,55 persen dan 30,56 persen. Pola yang sedikit berbeda terjadi pada pemuda perempuan, dimana mayoritas pendidikan tertinggi yang ditamatkan hanya sampai SD dengan persentase sebesar 30,16 persen dan SMP dengan persentase sebesar 28,71 persen.

Partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan ekonomi pada tahun 2008 relatif cukup besar, hal ini dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda yang mencapai 63,31 persen. TPAK pemuda di daerah perkotaan sebesar 62,33 persen sedangkan di perdesaan persentasenya lebih tinggi lagi yaitu mencapai 64,15 persen. Sementara itu, faktor jenis kelamin juga ikut mempengaruhi pola partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari TPAK pemuda laki-laki (78,44 persen) yang persentasenya hampir dua kali lipat lebih tinggi dari TPAK pemuda perempuan (48,29 persen). Gambaran serupa juga ditemukan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, TPAK pemuda laki-laki sebesar 75,77 persen, sedangkan untuk pemuda perempuan sebesar 49,22 persen. Begitu pula di daerah perdesaan, TPAK pemuda laki-laki (80,67 persen) lebih besar dari pemuda perempuan (47,49 persen).

Lapangan usaha pertanian rupanya masih menjadi sektor utama yang diandalkan terutama dalam penyerapan tenaga kerja khususnya pemuda. Hal tersebut terbukti dimana sebesar 34,56 persen pemuda bekerja atau berusaha di lapangan usaha pertanian. Sektor berikutnya yang juga banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor perdagangan dan sektor industri, persentase kedua sektor tersebut masing-masing sebesar 21,52 persen dan 15,60 persen. Sementara itu, sektor-sektor yang hanya sedikit menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor listrik, gas dan air (0,21 persen), pertambangan & galian (1,18 persen) serta keuangan (1,75 persen).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda di Indonesia selama tahun 2008 mencapai angka sebesar 14,52 persen. Bila dilihat menurut tipe daerah, angka pengangguran pemuda di daerah perkotaan (17,67 persen) ternyata masih jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan (11,92 persen). Dilihat dari jenis kelamin, secara keseluruhan tampak bahwa TPT pemuda perempuan (16,76 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan TPT pemuda laki-laki (13,13 persen). Pola yang seragam berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan pendidikan tinggi yang ditamatkan, sebagian besar pemuda yang menganggur adalah mereka yang berpendidikan tamat SM/sederajat (21,05 persen), kemudian PT (19,65 persen) dan SMP/sederajat (21,05 persen).

Selama sebulan terakhir dari saat survei, terdapat sekitar 25,49 persen pemuda yang mengalami keluhan kesehatan. Di daerah perdesaan, persentase pemuda yang mempunyai keluhan kesehatan (25,87 persen) tampak sedikit lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (25,13 persen). Secara umum nampak bahwa pemuda perempuan lebih banyak mengalami gangguan kesehatan daripada pemuda laki-laki. Hal ini terlihat dari proporsi pemuda perempuan yang mengeluh (26,39 persen) lebih besar dari pemuda laki-laki (24,57 persen). Di daerah perkotaan persentase pemuda perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tercatat sebesar 25,93 persen dan pemuda laki-laki 24,30 persen. Untuk daerah perdesaan persentase pemuda perempuan dan

laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan masing-masing sebesar 26,88 persen dan 24,84 persen.

Berdasarkan jumlah keseluruhan pemuda yang mengalami keluhan kesehatan, sebanyak 12,44 persen pemuda menderita sakit. Angka kesakitan pemuda laki-laki sedikit lebih tinggi dari pemuda perempuan (12,50 persen berbanding 12,39 persen). Secara keseluruhan angka kesakitan pemuda di perdesaan cenderung lebih tinggi dibanding pemuda yang tinggal di perkotaan (13,83 persen berbanding 11,08 persen), keadaan yang sama berlaku untuk pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan. Pemuda laki-laki yang mengalami sakit di perdesaan tercatat sebesar 13,83 persen dan di perkotaan 11,21 persen, sedangkan pemuda perempuan yang sakit di perdesaan sebesar 13,91 persen dan 10,96 persen untuk daerah perkotaan.

Berdasarkan tingkat partisipasi pemuda dalam program Keluarga Berencana (KB), lebih dari separuh (58,83 persen) pemuda perempuan yang berstatus kawin sedang mengikuti program KB. Sebanyak 18,41 persen pernah ikut KB tetapi sekarang tidak ikut lagi dan 22,77 persen sama sekali tidak pernah ikut berpartisipasi dalam program KB. Alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh pemuda perempuan adalah KB suntik dengan pengguna mencapai 65,86 persen, diikuti oleh pengguna pil KB sebesar 22,92 persen dan sisanya sebesar 11,22 persen adalah mereka yang menggunakan alat/cara KB AKDR/IUD, susuk dan lainnya.

Mayoritas pemuda perempuan menikah pertama kali pada umur antara 19-24 tahun dengan persentase mencapai 48,67 persen. Persentase pemuda perempuan yang menikah pada umur 19-24 tahun di perkotaan mencapai 55,59 persen, lebih besar daripada di perdesaan yang sebesar 42,71 persen. Sementara itu, persentase pemuda perempuan yang menikah pada kelompok umur relatif sangat muda (17-18 tahun) juga cukup banyak yaitu sebesar 23,66 persen. Bahkan ada yang melakukan perkawinan pertama pada saat umur 16 tahun sebesar 8,11 persen dan di bawah 16 tahun sebesar 8,48 persen.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b>	xv
<b>DAFTAR TABEL LAMPIRAN</b>	xviii
<b>GLOSSARY</b>	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Sistematika Penyajian	4
<b>BAB II METODOLOGI</b>	
2.1. Sumber Data	7
2.1.1. Ruang Lingkup	8
2.1.2. Kerangka Sampel	8
2.1.3. Rancangan Penarikan Sampel	9
2.1.4. Metode Pengumpulan Data	10
2.1.5. Petugas Lapangan	11
2.2. Konsep dan Definisi	11
2.2.1. Tipe Daerah	11
2.2.2. Blok Sensus	13
2.2.3. Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga	14
2.3. Keterbatasan Data	18
2.4. Metode Analisis	18
	ix

<b>BAB III</b>	<b>PROFIL DEMOGRAFIS PEMUDA</b>	
3.1.	Jumlah Pemuda	23
3.2.	Struktur Pemuda Menurut Jenis Kelamin	24
3.3.	Struktur Pemuda Menurut Tipe Daerah	26
3.4.	Struktur Pemuda Menurut Kelompok Umur	28
3.5.	Struktur Perkawinan	29
3.6.	Pemuda Sebagai Kepala Rumah Tangga	33
<b>BAB IV</b>	<b>PENDIDIKAN PEMUDA</b>	
4.1.	Partisipasi Pendidikan	41
4.2.	Angka Buta Huruf	46
4.3.	Rata-rata Lama Sekolah	49
4.4.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	51
<b>BAB V</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>	
5.1.	Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi	59
5.2.	Lapangan Usaha	63
5.3.	Status Pekerjaan	66
5.4.	Pengangguran	70
5.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	71
5.6.	Upah	74
<b>BAB VI</b>	<b>KESEHATAN PEMUDA</b>	
6.1.	Keluhan Kesehatan	79
6.2.	Angka Kesakitan	83
6.3.	Lama Sakit	84
6.4.	Cara Berobat	86
6.5.	Partisipasi Pemuda dalam Program Keluarga Berencana (KB)	91
6.6.	Umur Perkawinan Pertama	94

	Halaman
<b>Hasil Studi Mendalam Pemuda</b>	<b>99</b>
<b>Tabel Lampiran</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>167</b>

*http://www.bps.go.id*

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
3.4.1	Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah Tahun 2008	29
3.5.1	Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2008	30
3.5.2	Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2008	31
3.6.1	Persentase Pemuda Kepala Rumah tangga menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2008	34
4.1.1	Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Tipe Daerah Tahun 2008	43
4.3.1	Rata-rata Lama Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2008 (dalam Tahun)	50
4.4.1	Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2008	51
5.1.1	TPAK Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2008	60
5.1.2	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	62

Gambar	Halaman
5.4.1 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	70
5.5.1 Tingkat Pengangguran Pemuda (TPT) Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	72
6.1.1 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2008	81
6.2.1 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2008	83
6.3.1 Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Kelamin dan Lama Sakit, Tahun 2008	86
6.4.1 Persentase Pemuda yang Sakit dan Mengobati Sendiri Sakitnya menurut Jenis Pengobatan dan Tipe Daerah, Tahun 2008	88
6.5.1 Persentase Pemuda Perempuan yang Berstatus Kawin menurut Partisipasi KB dan Tipe Daerah, Tahun 2008	92

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
3.4.1	Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah Tahun 2008	29
3.5.1	Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2008	30
3.5.2	Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2008	31
3.6.1	Persentase Pemuda Kepala Rumah tangga menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2008	34
4.1.1	Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Tipe Daerah Tahun 2008	43
4.3.1	Rata-rata Lama Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2008 (dalam Tahun)	50
4.4.1	Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2008	51
5.1.1	TPAK Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2008	60
5.1.2	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	62

Gambar	Halaman
5.4.1 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	70
5.5.1 Tingkat Pengangguran Pemuda (TPT) Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	72
6.1.1 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2008	81
6.2.1 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2008	83
6.3.1 Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Kelamin dan Lama Sakit, Tahun 2008	86
6.4.1 Persentase Pemuda yang Sakit dan Mengobati Sendiri Sakitnya menurut Jenis Pengobatan dan Tipe Daerah, Tahun 2008	88
6.5.1 Persentase Pemuda Perempuan yang Berstatus Kawin menurut Partisipasi KB dan Tipe Daerah, Tahun 2008	92

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1.1 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2008	23
3.2.1 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2004-2008	25
3.3.1 Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2004-2008	27
3.3.2 Persentase Pemuda menurut Pulau/Kepulauan dan Jenis Kelamin Tahun 2008	28
3.5.1 Persentase Pemuda yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	32
3.6.1 Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga menurut Kelompok Umur, Tipe daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2008	35
4.1.1 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2004-2008	42
4.1.2 Angka Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe daerah, Tahun 2008	44
4.2.1 Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2004-2008	47
4.2.2 Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe daerah, Tahun 2008	48
4.4.1 Persentase Pemuda menurut Tipe daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008	53

Tabel	Halaman
5.1.1 TPAK Pemuda Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2008	61
5.2.1 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, Tahun 2008	64
5.2.2 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	65
5.3.1 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, Tahun 2008	67
5.3.2 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	68
5.3.3 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008	69
5.5.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, Tahun 2008	73
6.1.1 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan, Tahun 2008	82
6.3.1 Persentase Pemuda yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, Tahun 2008	85
6.4.1 Persentase Pemuda yang Mengobati Sendiri menurut Jenis Obat, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	89
6.4.2 Persentase Pemuda yang Sakit yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	90

Tabel		Halaman
6.5.1	Persentase Pemuda Perempuan Berstatus Kawin menurut Partisipasi KB dan Tipe Daerah, Tahun 2004 - 2008	93
6.5.2	Persentase Pemuda Perempuan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Alat/ Cara KB yang Digunakan dan Tipe Daerah, Tahun 2008	94
6.6.1	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Saat Perkawinan Pertama, Tahun 2008	96

*http://www.bps.go.id*

## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel	Halaman
3.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	107
3.2 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2008	108
3.3.1-3.3.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Tahun 2008	109 - 111
3.4.1-3.4.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan status Perkawinan, Tahun 2008	112 - 114
4.1.1-4.1.3 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, Tahun 2008	115 - 117
4.2.1-4.2.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan, Tahun 2008	118 - 120
4.3 Persentase Pemuda yang Melek Huruf menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	121
4.4.1-4.4.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008	122 - 124
5.1.1-5.1.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama seminggu yang Lalu, Tahun 2008	125 - 127
5.2.1-5.2.3 Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama seminggu yang Lalu, Tahun 2008	128 - 130
5.3.1-5.3.3 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama seminggu yang Lalu, Tahun 2008	131 - 133

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
5.4.1-5.4.3 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, Tahun 2008	134 - 136
5.5.1-5.5.3 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, Tahun 2008	137 - 139
5.6.1-5.6.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008	140 - 142
5.7.1-5.7.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008	143 - 145
5.8.1-5.8.3 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, Tahun 2008	146 - 148
6.1 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2008	149
6.2.1-6.2.3 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, Tahun 2008	150 - 152
6.3.1-6.3.3 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, Tahun 2008	153 - 155
6.4.1-6.4.3 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Umur saat Perkawinan Pertama, Tahun 2008	156 - 158
6.5 Proporsi Pemuda Perempuan Berstatus Kawin yang pernah Menggunakan alat/Cara KB menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2008	159

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
6.6	Proporsi Pemuda Perempuan Berstatus Kawin menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Partisipasi dalam Program KB, Tahun 2008	160
6.7.1-6.7.3	Persentase Pemuda Perempuan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, Tahun 2008	161 - 163

## ***GLOSSARY*** **(Singkatan)**

APK	Angka Partisipasi Kasar
APS	Angka Partisipasi Sekolah
IPM	Indek Pembangunan Manusia
KB	Keluarga Berencana
<i>MSF</i>	<i>Master Sampling Frame</i>
<i>MDGs</i>	<i>Millenium Development Goals</i>
P4B	Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan
PODES	Potensi Desa
PPS	Probability Proportional to Size
PT	Perguruan Tinggi
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Sensus Ekonomi
SLS	Satuan Lingkungan Setempat
SM	Sekolah Menengah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka



## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Perjalanan suatu bangsa sejatinya tidak terlepas dari keberadaan pemuda. Sejarah mencatat dalam perkembangan peradaban dunia telah membuktikan peran pemuda sebagai pelaku lahirnya sebuah beradaban baru, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda memegang peranan penting hampir disetiap transformasi sosial demi meraih cita-cita. Begitupun dalam perkembangan lahirnya bangsa indonesia, baik pada masa perjuangan kemerdekaan, masa kemerdekaan bahkan masa pasca kemerdekaan seperti saat ini.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, eksistensi pemuda tidak dapat dipungkiri telah mengukir goresan penting seiring perjalanan dinamika

kehidupan bangsa, sehingga menjadi titik strategis dalam setiap peristiwa penting yang terjadi. Bahkan pemuda menjadi tulang punggung dari keutuhan perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang ketika itu. Peran tersebut juga tetap disandang oleh pemuda Indonesia hingga kini; selain sebagai pengontrol independen terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pemuda Indonesia juga secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu dengan menyongsong era globalisasi.

Peran strategis pemuda tidak dapat diabaikan dari paradigma pemuda sebagai *"Social Category"* yang mengindikasikan adanya pengakuan/penghargaan terhadap potensi pemuda baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, pada tahun 2008 jumlah pemuda yang besar merupakan aset pembangunan. Dalam potensi kualitatif, pemuda memiliki berbagai macam talenta dibidang pendidikan, kewirausahaan, budaya dan pariwisata serta teknologi tepat guna, yang jika dikembangkan secara optimal dan terarah akan menjadi modal bagi pembangunan nasional. Pemuda sebagai aset dan mentor pembangunan diharapkan mampu berperan dalam merespon berbagai persoalan yang tengah dihadapi. Untuk itu pemuda harus memiliki akhlak yang mulia, rasa solidaritas, integritas diri dan wawasan kebangsaan serta memiliki komitmen untuk bangsanya.

Menjawab tuntutan tersebut, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sebagai wadah yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda telah menyusun Visi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora), yaitu “Terwujudnya kualitas sumber daya pemuda dan olahraga dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan, kepemimpinan yang berakhlak mulia, mandiri, sehat, cerdas, terampil, berprestasi dan berdaya saing yang dilandasi iman dan taqwa”. Terkandung keseriusan pemerintah dalam meningkatkan harkat dan martabat pemuda, terutama bila dicermati dari misinya yang antara lain adalah:

- a. Mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global yang dilandasi iman dan taqwa;

- b. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang berakhlak mulia yang didasarkan pada pendidikan berkualitas agar memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga untuk membentuk pemuda yang memiliki jiwa wirausaha dan mengembangkan industri olahraga serta meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- d. Mewujudkan sistem manajemen kepemudaan dan olahraga yang terpadu untuk pemberdayaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas jaringan kerja;

Perumusan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan pemuda tersebut perlu didukung oleh semua pihak. Tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang harus dicapai sebagai salah satu upaya untuk menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pemuda. Sehubungan dengan itu, tersedianya publikasi pemuda sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran secara makro mengenai kondisi situasi pemuda Indonesia baik pada tingkat nasional maupun regional sangat dibutuhkan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi Statistik Pemuda Tahun 2008 ini secara umum adalah untuk memperoleh gambaran lebih rinci dan menyeluruh tentang profil pemuda di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun tingkat regional. Kondisi dan perkembangan pemuda dalam publikasi ini akan dilihat dari aspek demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan sosial budaya. Indikator penting yang dicakup dalam aspek demografi menyangkut perkembangan jumlah pemuda, rasio jenis kelamin dan angka ketergantungan yang menjadi beban pemuda. Aspek pendidikan dan ketenagakerjaan digambarkan oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan, angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Selanjutnya aspek kesehatan dan lingkungan menyangkut keluhan kesehatan, kesakitan, perkawinan dan penggunaan alat/cara KB yang sedang digunakan.

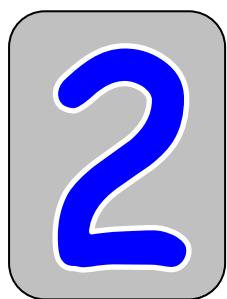
Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan informasi berbagai aspek mengenai kepemudaan yang sangat bermanfaat sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembangunan kepemudaan. Dalam jangka pendek, informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan berbagai program dan sebagai sarana evaluasi dari program-program sebelumnya.

### **1.3. Sistematika Penyajian**

Publikasi statistik pemuda ini secara sistematis disajikan dalam tujuh bagian dan satu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dan menyeluruh kepada pembaca tentang keseluruhan isi publikasi. Uraian rinci diatur dalam bab-bab sesuai dengan tema pokok bahasan dari publikasi. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan latar belakang mengenai kepemudaan, tujuan termasuk ruang lingkup yang membatasi fokus dan cakupan analisis, dan sistematika penyajian. Bagian kedua (Bab II) menyajikan metodologi yang mencakup sumber data, konsep dan definisi, serta metode analisis. Empat bagian berikutnya secara berturut-turut menyajikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan pemuda dari berbagai aspek diantaranya demografi, pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan.

# *METODOLOGI*





## Metodologi

### 2.1. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2008. Data yang dikumpulkan dalam Susenas Tahun 2008 adalah:

- a. Data Kor Susenas Tahun 2008, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi penduduk dari sisi demografi, kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan.
- b. Data Modul Konsumsi, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai keterangan tentang kuantitas dan nilai konsumsi makanan serta bukan makanan dalam rumah tangga.

- c. Khusus untuk masalah ketenagakerjaan (Bab V), sumber data yang digunakan berasal dari Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) Tahun 2008.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi. BPS melaksanakan Susenas setiap tahun sejak tahun 1963. Mulai tahun 1992 Susenas mengumpulkan data kor (keterangan pokok) dan data modul (keterangan sasaran). Data kor dikumpulkan setiap tahun sedangkan data modul dikumpulkan setiap 3 tahun sekali. Data modul mencakup modul konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, modul pendidikan dan sosial budaya serta modul perumahan dan kesehatan. Sesuai dengan gilirannya modul Susenas tahun 2008 adalah modul konsumsi.

### **2.1.1. Ruang Lingkup**

Sampel Susenas tahun 2008 mencakup 285.904 rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dicacah dengan menggunakan kuesioner baik kor (VSEN2008.K) maupun modul (VSEN2008.M). Dengan jumlah sampel tersebut, estimasi data kor dan modul Susenas tahun 2008 dapat dilakukan hingga level kabupaten/kota tetapi tidak dapat disajikan menurut daerah perkotaan atau perdesaan. Susenas tahun 2008 tidak mencakup rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa.

### **2.1.2. Kerangka Sampel**

Kerangka sampel yang digunakan dalam Susenas tahun 2008 terdiri dari :

- 1) Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, 2) Kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus (khusus untuk blok sensus yang mempunyai jumlah rumah tangga lebih besar dari 150 rumah tangga atau blok sensus yang telah dibuat sub-blok sensusnya pada saat *up-dating* sketsa peta blok sensus dalam rangka kegiatan Sensus Pertanian 2003), dan 3) Kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga.

Kerangka sampel blok sensus adalah daftar blok sensus biasa hasil Sensus Ekonomi 2006 (*Frame Blok Sensus SE06*) yang dilengkapi dengan jumlah rumah tangga hasil pencacahan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Kerangka sampel blok sensus mencakup blok sensus di 457 kabupaten/kota dan dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan adalah daftar seluruh blok sensus biasa yang terdapat di daerah perkotaan di setiap kabupaten/kota, sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perdesaan adalah daftar seluruh blok sensus biasa yang terdapat di daerah perdesaan di setiap kabupaten/kota.

Kerangka sampel untuk pemilihan sub-blok sensus adalah daftar sub-blok sensus dalam blok sensus terpilih yang mempunyai jumlah rumah tangga lebih besar dari 150 rumah tangga.

Kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga yang terdapat dalam daftar pendaftaran rumah tangga (VSEN2008.L Blok IV, hasil pendaftaran rumah tangga di lapangan).

### 2.1.3. Rancangan Penarikan Sampel

#### Kor Susenas 2008

Sampel Kor Susenas tahun 2008 didesain untuk estimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Rancangan sampel Susenas 2008 adalah rancangan sampel bertahap dua baik untuk daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan daerah perdesaan dilakukan secara terpisah. Prosedur penarikan sampel Susenas tahun 2008 untuk suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, dari *Master Sampling Frame (MSF)* blok sensus biasa hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) dipilih  $n_h$  blok sensus ( $h = 1$ , untuk perkotaan;  $h = 2$ , untuk perdesaan) secara *Probability Proportional to Size (PPS)* dengan size banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B (April 2003). Pendaftaran rumah tangga/*listing* dilakukan pada setiap blok sensus terpilih.

Untuk blok sensus yang muatannya lebih dari 150 rumah tangga, maka perlu dilakukan pemilihan satu sub blok sensus secara *PPS* - sistematik dengan size banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B.

**2. Tahap kedua**, memilih sebanyak  $\bar{m} = 16$  rumah tangga dari hasil listing pada setiap blok sensus terpilih secara sistematik.

### Modul Konsumsi

Sampel modul merupakan subsampel dari sampel terpilih untuk estimasi data tingkat kabupaten/kota, baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Subsampel tersebut dipilih secara *Linear Systematic Sampling* dari daftar blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan. Selanjutnya blok sensus terpilih (subsample) tersebut disebut blok sensus kor-modul, karena di samping dicacah dengan kuesioner modul, juga dicacah dengan kuesioner kor. Dengan kata lain, blok sensus yang akan digunakan untuk estimasi di tingkat provinsi (blok sensus kor-modul) dipilih secara *Linear Systematic Sampling* dari daftar blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota (blok sensus kor). Blok sensus yang tidak terpilih kor-modul 2008 disebut disebut blok sensus kor.

#### 2.1.4. Metode Pengumpulan Data

Setiap rumah tangga yang terpilih dalam Susenas, dikunjungi oleh petugas pencacah yang diberikan tanggung jawab untuk mewawancarai responden. Wawancara dilakukan langsung terhadap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga (selain kepala rumah tangga) yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga yang bersangkutan.

Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, terlebih dahulu para petugas pengumpul data dilatih tentang tata cara pengisian kuesioner dan konsep/definisi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi bias yang diakibatkan oleh faktor *non-sampling error*.

### 2.1.5. Petugas Lapangan

Dalam survei BPS berskala besar seperti Susenas, staf BPS Kabupaten/Kota atau Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dilibatkan sebagai koordinator tim (Kortim), sedangkan yang menjadi pencacah (PCL) adalah mitra statistik, yaitu petugas yang direkrut dari luar BPS. Kualifikasi pendidikan mitra statistik adalah tamat SLTA dan dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas PCL.

## 2.2. Konsep dan Definisi

### 2.2.1. Tipe Daerah

Untuk menentukan apakah suatu desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau perdesaan digunakan indikator komposit (indikator gabungan) berdasarkan skor atau nilai-nilai dari tiga buah variabel yaitu : kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian dan akses fasilitas umum. Penentuan skor suatu desa/kelurahan adalah seperti pada Tabel A. Kolom (1) menunjukkan variabel/klasifikasi yang digunakan dan Kolom (2) menunjukkan nilai skor untuk setiap variabel.

**Tabel A. Variabel, Klasifikasi, Skor & Kriteria Desa 2000**

Variabel/Klasifikasi	Skor	Variabel/Klasifikasi	Skor
(1)	(2)	(1)	(2)
Total Skor		B) Sekolah Menengah Pertama	
● Skor Minimum	2	● Ada atau $\leq$ 2,5 Km	1
● Skor Maksimum	26	● > 2,5 Km	0
1. Kepadatan Penduduk/Km <sup>2</sup>		C) Sekolah Menengah Umum	
< 500	1	● Ada atau $\leq$ 2,5 Km	1
500 - 1 249	2	● > 2,5 Km	0
1 250 - 2 499	3	D) Pasar	
2 500 - 3 999	4	● Ada atau $\leq$ 2 Km	1
4 000 - 5 999	5	● > 2 Km	0
6 000 - 7 499	6	E) Bioskop	
7 500 - 8 499	7	● Ada atau $\leq$ 5 Km	1
8 500 +	8	● > 5 Km	0

2. Persentase Rumah Tangga Pertanian		F) Pertokoan	
70,00 +	1	● Ada atau $\leq$ 2 Km	1
50,00 – 69,99	2	● $>$ 2 Km	0
30,00 – 49,99	3		
20,00 – 29,99	4		
15,00 – 19,99	5		
10,00 – 14,99	6		
5,00 – 9,99	7		
< 5,00	8		
3. Akses Fasilitas Umum	0,1,2,..... 10	G) Rumah Sakit	
A) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)		● Ada atau $\leq$ 5 Km	1
● Ada atau $\leq$ 2,5 Km	1	● $>$ 5 Km	0
● $>$ 2,5 Km	0	H) Hotel/Bilyard/Dis-kotek/Panti pijat/Salon	
		● Ada	1
		● Tidak ada	0
		I) Persentase Rumah Tangga Telepon	
		● $\geq$ 8,00	1
		● $<$ 8,00	0
		J) Persentase Rumah Tangga Listrik	
		● $\geq$ 90,00	1
		● $<$ 90,00	0

Cara perhitungan skor adalah sebagai berikut:

- Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1 - 8, skor satu bagi desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per  $\text{km}^2$ , dua bagi desa dengan kepadatan kurang dari 500 - 1 249 orang per  $\text{km}^2$  dan seterusnya sampai dengan 8 bagi desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8 500 orang per  $\text{km}^2$ .
- Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar 1 - 8, satu bila desa memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga tani, dua bila 50 - 69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, bila desa mempunyai 5 persen atau kurang
- Variabel akses fasilitas umum merupakan kombinasi antara keberadaan dan akses untuk mencapai fasilitas perkotaan
- Skor untuk akses fasilitas umum adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan tetapi jaraknya relatif dekat dengan fasilitas perkotaan dan atau mudah mencapainya, maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1, dengan pertimbangan mudahnya akses kepada perkotaan tersebut serupa dengan memiliki.
- Jumlah skor dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan.

Desa dengan skor gabungan 9 atau kurang digolongkan sebagai desa perdesaan, sedangkan desa dengan skor gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan.

- f. Dalam pelaksanaannya, penentuan apakah suatu desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau perdesaan dilakukan oleh BPS Pusat dengan menggunakan hasil pendataan Potensi Desa (PODES) Sensus Penduduk 2000.

### 2.2.2. Blok Sensus

Blok sensus adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS. Sesuai dengan rancangan sampel, blok sensus terpilih Susenas 2008 sudah ditentukan oleh BPS pusat segera setelah rancangan sampel selesai. Setiap blok sensus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Seluruh blok sensus dalam setiap desa/kelurahan membagi habis wilayah desa/kelurahan bersangkutan.
2. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (SLS seperti: RT, RW, dusun, lingkungan dsb) diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).
3. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Ada 3 jenis blok sensus yaitu:

**Blok sensus biasa (B)** adalah blok sensus yang muatannya antara 80 sampai 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.

**Blok sensus khusus (K)** adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang, kecuali lembaga pemasyarakatan yang muatannya tidak dibatasi. Tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus, antara lain:

- Asrama militer (tangsi)
- Daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga

**Blok sensus persiapan (P)** adalah blok sensus yang kosong seperti sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas permukiman yang terbakar.

Blok sensus khusus dan blok sensus persiapan bukan merupakan bagian dari kerangka sampel Susenas.

### **2.2.3. Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga**

**Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

**Anggota Rumah Tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

**Tidak termasuk anggota rumah tangga** yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap **dianggap** sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

**Pemuda** adalah penduduk berumur 15-35 tahun.

**Kawin** adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

**Cerai hidup** adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.

**Cerai mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

**Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan antara penduduk pria dan wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk pria per 100 wanita.

**Buta Huruf** adalah tidak dapat membaca surat atau kalimat sederhana dengan suatu huruf, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

**Angka Partisipasi Sekolah** adalah nilai perbandingan (dalam persen) banyaknya penduduk yang bersekolah terhadap total penduduk, menurut batasan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan formal.

**Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

**Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah** adalah sekolah dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong).

**Sekolah Lanjutan Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah/Sederajat/Kejuruan** adalah sekolah lanjutan tingkat pertama baik umum maupun kejuruan, madrasah tsanawiyah atau yang sederajat (MULO, HBS 3 tahun, sekolah luar biasa menengah pertama, sekolah kepandaian putri atau SKP, sekolah menengah ekonomi pertama/SMEP, sekolah teknik (ST), sekolah kesejahteraan keluarga pertama/SKKP, sekolah ketrampilan kejuruan,

sekolah usaha tani, sekolah pertanian menengah pertama, sekolah guru Bantu/SGB, pendidikan guru agama/PGA, kursus pegawai administrasi atau KPA, pendidikan pegawai urusan peradilan agama).

**SM/Sekolah Menengah Umum (SMU)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SM Kejuruan)/Madrasah Aliyah/Sederajat** adalah Sekolah Menengah Umum (SMU), sekolah kejuruan setingkat SMU(SMEA, SMPS, SGO dll), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA)).

**Diploma/Sarjana** adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/ perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doctor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

**Angkatan Kerja** adalah penduduk 10 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

**Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

**Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

**Menganggur** adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja

**Mencari Pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebas tugaskan

dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

**Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dengan rumus :

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

**Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Namun untuk publikasi ini umur dibatasi 15-35 tahun.

**Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/ instansi tempat seseorang bekerja.

**Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.

**Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

**Tingkat Pengangguran** adalah persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan dan tidak sedang mempunyai pekerjaan, dengan rumus:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Orang yang Mencari Pekerjaan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

**Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

**Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktifitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

### 2.3. Keterbatasan Data

Disadari ada keterbatasan data yang digunakan dalam penyajian publikasi ini. Penjelasan berikut diharapkan dapat lebih memperjelas dan mempermudah bagi pengguna dan pembaca publikasi ini dalam menafsirkan data yang disajikan.

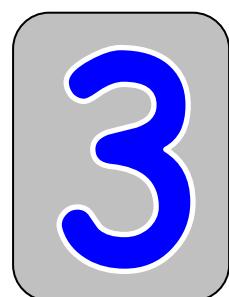
- a. Data Susenas 2008 mencakup 457 kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia
- b. Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus tidak dicakup.

### 2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai kecenderungan perkembangan kegiatan sosial budaya selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi pula dengan tabel lampiran untuk melihat data pada tingkat provinsi.

*PROFIL DEMOGRAFIS  
PEMUDA*





## Profil Demografis Pemuda

Indonesia merupakan sebuah negara yang termasuk dalam peringkat lima besar jumlah penduduk tertinggi didunia. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki multi etnis dan budaya yang sangat beragam. Fakta ini adalah sebuah aset yang sangat berharga bila dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Demikian halnya dengan generasi muda atau pemuda yang merupakan SDM yang mempunyai potensi yang sangat besar sebagai modal pembangunan baik dari aspek kuantitas maupun produktivitasnya. Secara kuantitas dapat dilihat dari komposisi penduduk Indonesia dimana penduduk usia muda (penduduk yang berusia 15-35 tahun) menempati urutan kedua sebagai penduduk dengan jumlah terbesar setelah kelompok penduduk usia 35 tahun ke atas. Dengan jumlahnya yang begitu besar, pemuda mempunyai peran yang sangat penting dan strategis pada semua aspek pembangunan. Di

sisi lain jumlah pemuda yang sangat besar juga dapat menjadi beban bagi pembangunan, bila jumlah pemuda yang besar tersebut tidak terserap dalam proses pembangunan.

Pada publikasi ini, batasan yang digunakan untuk mendefinisikan pemuda adalah berdasarkan umur yaitu 15-35 tahun. Beberapa negara mempunyai batasan pemuda yang berbeda, secara internasional WHO menyebut pemuda sebagai *young people* dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut *adolescence* atau remaja. Negara Canada memberikan batasan *after age 24, youth are no longer eligible for adolescent social services*, sehingga batasan pemuda paling tinggi 24 tahun. Dalam kategori ini, dibedakan antara remaja (13-19 tahun) dan dewasa muda (20-24 tahun) sesuai dengan perkembangan sosial, psikologi dan kesehatan. Sedangkan secara harfiah, kamus *Websters, Princeton* mengartikan bahwa *youth* yang diterjemahkan sebagai pemuda, adalah *the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person*. Dari semua definisi ini, dapat diinterpretasikan bahwa pemuda merupakan individu dengan karakter yang dinamis, bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural (Dra. Titin Supenti, MA. Kondisi Tenaga Kerja Pemuda).

Kondisi pemuda di Indonesia secara lebih rinci dapat dilihat secara kuantitas maupun kualitasnya. Secara kuantitas, dapat dilihat melalui komposisi jumlah penduduk usia 15-35 tahun dengan berbagai karakteristiknya. Pada bagian ini akan dilihat gambaran mengenai struktur demografis pemuda dari beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan dan hubungan dengan kepala rumah tangga. Sedangkan kualitas pemuda dapat dilihat berdasarkan pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan yang dibahas pada bab-bab berikutnya.

### 3.1. Jumlah Pemuda

Penduduk usia muda adalah bagian dari kelompok penduduk usia produktif yang sangat potensial bagi penunjang kegiatan ekonomi. Sepertiga lebih penduduk Indonesia merupakan kelompok pemuda. Jumlah pemuda yang relatif banyak, merupakan potensi/aset yang besar sebagai sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan. Pemuda akan menempati posisi yang penting dan strategis, baik sebagai pelaku pembangunan maupun penerus pembangunan di masa datang.

Berdasarkan hasil Susenas 2008 diperkirakan pemuda Indonesia berjumlah sekitar 78,72 juta jiwa atau sekitar 34,52 persen dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan yang saat ini berjumlah lebih dari 228 juta orang (Tabel 3.1.1). Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga penduduk Indonesia didominasi oleh golongan penduduk muda usia. Di lain pihak jika dibandingkan dengan komposisi kelompok penduduk usia lainnya, persentase jumlah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 35 tahun masing-masing sebesar 29,13 persen dan 36,35 persen.

**Tabel 3.1.1. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2008**

Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Perkotaan+Perdesaan	
			% (4)	Jumlah (5)
< 15	13,35	15,78	29,13	66,420,348
15 - 35	17,68	16,84	34,52	78,715,621
> 35	17,28	19,07	36,35	82,882,931
<b>Total</b>	<b>48,31</b>	<b>51,69</b>	<b>100,00</b>	<b>228,018,900</b>
<b>10 +</b>	<b>48,79</b>	<b>51,21</b>	<b>100,00</b>	<b>184,418,666</b>
<b>15 +</b>	<b>49,33</b>	<b>50,67</b>	<b>100,00</b>	<b>161,598,552</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

### 3.2. Struktur Pemuda Menurut Jenis Kelamin

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan jumlah penduduk yang besar bukan merupakan sebuah jaminan bagi keberhasilan suatu pembangunan. Peningkatan pertumbuhan penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan kesejahteraan justru bisa menjadi bencana, yang pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan terhadap program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pemerintah berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana yang dicanangkan di akhir tahun 1960-an, yang salah satu tujuannya mempercepat penurunan angka kelahiran untuk mengatasi masalah peledakan penduduk. Upaya tersebut telah menunjukkan keberhasilan, salah satunya ditunjukkan dengan menurunnya beban/angka ketergantungan penduduk usia muda, struktur dalam keluarga (jumlah keluarga mengecil) dan orangtua mulai mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas anak-anaknya.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya kesejahteraan penduduk, jumlah pemudapun ikut meningkat. Tabel 3.2.1 secara umum memperlihatkan persentase komposisi pemuda dari tahun 2004 sampai dengan 2008. Gambaran pemuda di daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa persentase pemuda perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda laki-laki. Pada tahun 2008 persentase pemuda perempuan sebesar 50,76 persen sedangkan pemuda laki-laki sebesar 49,24 persen. Pola yang serupa terjadi di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan dengan persentase yang relatif sama.

**Tabel 3.2.1. Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2004-2008**

Tipe Daerah	2004		2006		2008	
	L	P	L	P	L	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	48,90	51,10	49,25	50,75	48,92	51,08
Perdesaan	49,87	50,13	49,98	50,02	49,58	50,42
Kota + Desa	49,42	50,58	49,64	50,36	49,24	50,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2004-2008

Jumlah pemuda laki-laki pada tahun 2008 cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemuda perempuan. Hal tersebut tercermin dari rasio jenis kelamin pemuda yang nilainya kurang dari 100, seperti ditunjukkan Tabel 3.2 pada lampiran. Rasio jenis kelamin pemuda pada tahun 2008 adalah sebesar 97,01. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata untuk setiap 100 pemuda perempuan terdapat sekitar 97 pemuda laki-laki. Hal ini mengisyaratkan agar dalam setiap penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga senantiasa mempertimbangkan faktor jender. Sebaran rasio jenis kelamin pemuda bila dilihat menurut provinsi pada tahun 2008 menunjukkan ada beberapa provinsi yang memiliki rasio jenis kelamin pemuda lebih dari 100, dengan kata lain jumlah pemuda laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah pemuda perempuan. Provinsi yang memiliki rasio jenis kelamin lebih dari 100 adalah Provinsi Jambi (100,19), Sumatera Selatan (100,60), Lampung (107,07), Bangka Belitung (106,15), DI. Yogyakarta (103,99), Kalimantan Barat (101,80), Kalimantan Tengah (100,28), Kalimantan Timur (104,20), Sulawesi Utara (104,58), Sulawesi Tengah (100,12) dan Maluku (101,52).

### 3.3. Struktur Pemuda Menurut Tipe Daerah

Keadaan geografis serta luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) turut berperan terhadap pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kesenjangan terhadap hasil pembangunan sangat terasa terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Pola hidup penduduk yang berbeda antara yang tinggal di pusat kota dan yang jauh dari pusat kota serta tingkat kemajuan ekonomi, menjadi daya tarik tersendiri untuk tinggal diperkotaan. Ini hanyalah salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan urbanisasi. Faktor lainnya seperti keinginan mengembangkan diri (peningkatan pendidikan), anggapan bahwa kota menjanjikan kehidupan yang lebih baik, tersedianya lapangan kerja/usaha yang lebih luas dan tersedianya fasilitas pendidikan maupun fasilitas-fasilitas lain. Disisi lain, di daerah perkotaan penuh dengan tantangan/persaingan hidup, sedangkan di perdesaan peluang untuk bekerja di sektor pertanian kurang begitu diminati walaupun tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan pendidikan formal tinggi.

Dilihat perkembangannya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, pemuda yang tinggal di daerah perdesaan masih lebih banyak dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Keadaan yang sebaliknya terjadi pada tahun 2008, dimana persentase pemuda daerah perkotaan menjadi lebih besar dibandingkan dengan daerah perdesaan (Tabel 3.3.1.). Persentase pemuda di daerah perkotaan tercatat sebesar 51,22 persen, lebih besar daripada di daerah perdesaan (48,78 persen). Pola yang seragam terjadi baik pada pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan. Sekitar 50,88 persen pemuda laki-laki tinggal di daerah perkotaan dan 49,12 persen tinggal di daerah perdesaan. Sementara persentase pemuda perempuan yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 51,54 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 48,46 persen.

**Tabel 3.3.1. Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2004-2008**

Jenis Kelamin	2004		2006		2008	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	45,77	54,23	45,92	54,08	50,88	49,12
Perempuan	46,74	53,26	46,64	53,36	51,54	48,46
Laki-laki + Perempuan	46,26	53,74	46,28	53,72	51,22	48,78

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2004-2008

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan salah satu permasalahan dalam suatu proses pembangunan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi ini terjadi pula pada kelompok penduduk berusia muda seperti yang disajikan pada Tabel 3.3.2. Seperti halnya penduduk Indonesia yang sebagian besar berada di pulau Jawa, pemuda sebagai komponen terbesar penduduk juga lebih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa (56,22 persen). Ini berarti separuh lebih pemuda berada di pulau Jawa, sisanya berturut-turut tersebar di pulau Sumatera (22,45 persen), Sulawesi (7,38 persen), Kalimantan (6,38 persen) dan pulau-pulau lainnya seperti Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (7,56 persen).

Penyebaran pemuda yang tidak merata menurut wilayah, menunjukkan bahwa tingkat kepadatan pemuda pada masing-masing wilayah berbeda. Perbedaan ini perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah secara proporsional.

**Tabel 3.3.2 Persentase Pemuda menurut Pulau/Kepulauan dan Jenis Kelamin, Tahun 2008**

Pulau/ Kepulauan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	22,70	22,20	22,45
Jawa	56,15	56,29	56,22
Kalimantan	6,51	6,26	6,38
Sulawesi	7,26	7,50	7,38
Kepulauan Lainnya	7,37	7,75	7,56
<b>Indonesia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

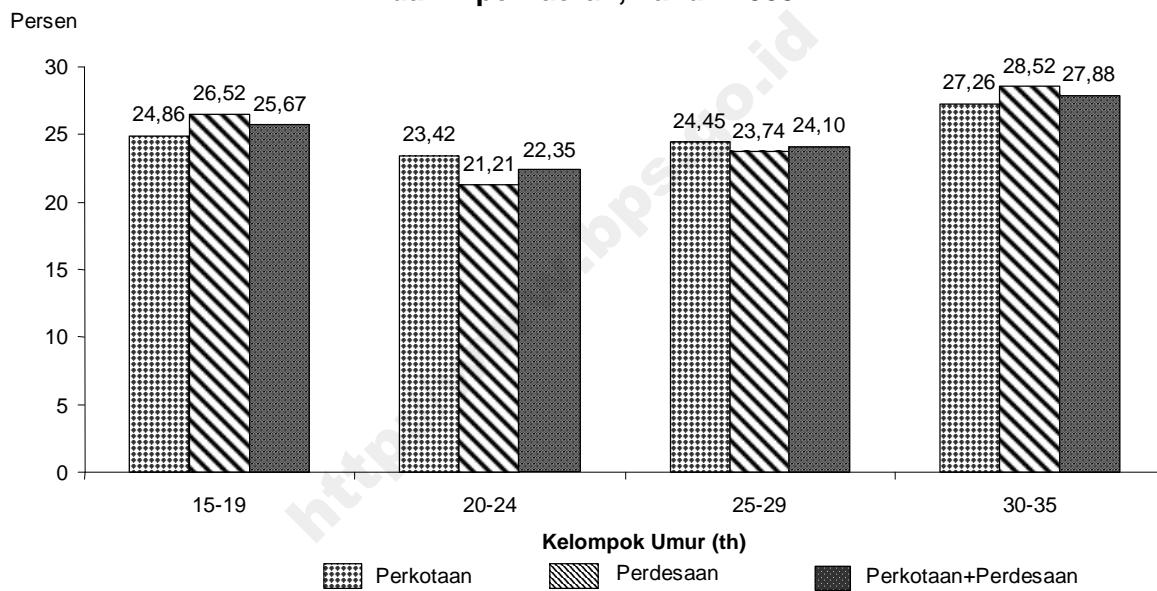
Berdasarkan jumlah pemuda menurut distribusi provinsi (Tabel 3.1 pada lampiran), tiga provinsi yang memiliki jumlah pemuda terbanyak yaitu Jawa Barat (14,15 juta), Jawa Timur (11,29 juta) dan Jawa Tengah (10,02 juta). Sebaliknya, tiga provinsi yang memiliki jumlah pemuda paling sedikit yaitu Papua Barat (0,26 juta), Gorontalo (0,32 juta) dan Maluku Utara (0,35 juta).

### 3.4. Struktur Pemuda Menurut Kelompok Umur

Distribusi penduduk menurut umur memperlihatkan dampak pengendalian angka kematian bayi dan perkembangan usia harapan hidup yang biasa digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dalam analisis ini struktur umur pemuda pada tahun 2008 disajikan pada Gambar 3.4.1. Komposisi pemuda menurut kelompok umur persentasenya relatif hampir sama. Pemuda pada kelompok umur 30-35 tahun menjadi komponen terbesar dengan persentase sebesar 27,88 persen, diikuti pemuda kelompok umur 15-19 tahun dengan persentase sekitar 25,67 persen, kelompok umur 25-29 tahun sebesar 24,10 persen dan kelompok umur 20-24 tahun sebesar 22,35 persen. Keberadaan pemuda pada kelompok umur 30-35 tahun sebagai komponen terbesar juga terlihat baik di daerah perdesaan maupun

perkotaan. Di daerah perdesaan pemuda kelompok umur 30-35 tahun tercatat sebesar 28,52 persen, kemudian kelompok umur 15-19 tahun sebesar 26,52 persen, kelompok umur 25-29 tahun sebesar 23,74 persen dan kelompok umur 20-24 tahun sebesar 21,21 persen. Demikian pula untuk daerah perkotaan, persentase pemuda yang berada pada kelompok umur 30-35 tahun masih menjadi yang terbesar dengan persentase 27,26 persen, diikuti kelompok umur 15-19 tahun sebesar 24,86 persen, kelompok umur 25-29 tahun sebesar 24,45 persen dan kelompok umur 20-24 tahun sebesar 23,42 persen.

**Gambar 3.4.1. Persentase Pemuda menurut Kelompok dan Tipe Daerah, Tahun 2008**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

### 3.5. Struktur Perkawinan

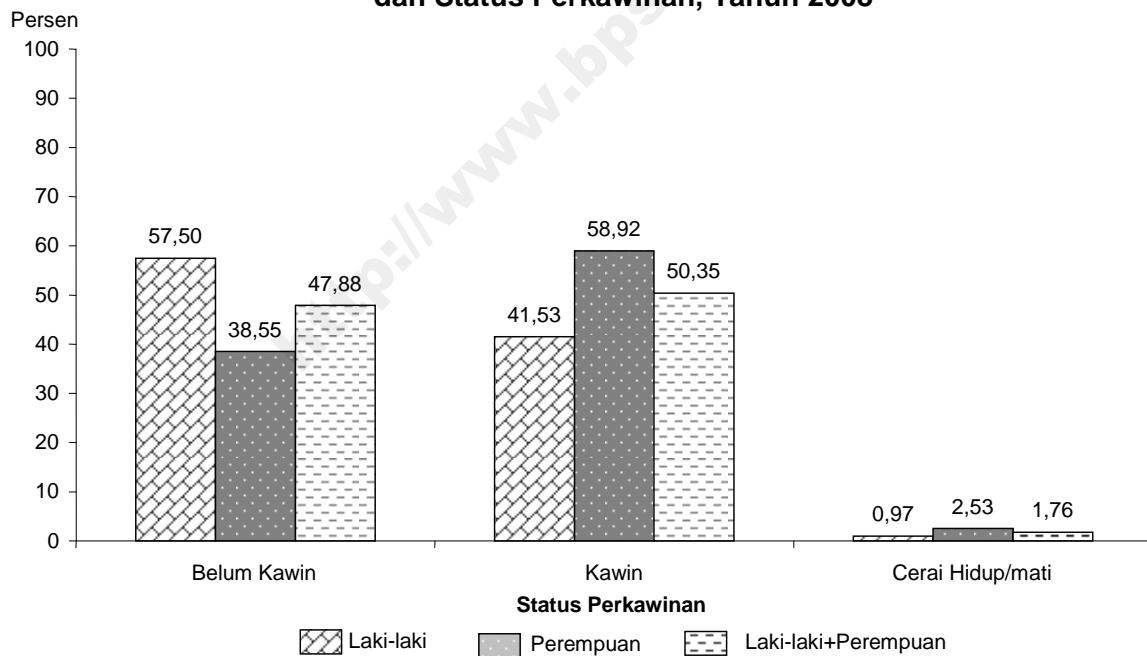
Tingkat pendidikan dan budaya suatu wilayah mempengaruhi umur perkawinan pertama suatu masyarakat. Dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kenyataannya masih terdapat perkawinan diusia

muda yang umumnya terjadi di daerah perdesaan terutama pada penduduk perempuan.

Hasil Susenas tahun 2008 menunjukkan bahwa separuh lebih pemuda (50,35 persen) berstatus kawin, seperti yang terlihat pada Gambar 3.5.1. Selain itu, persentase pemuda yang berstatus belum kawin juga relatif besar (47,88 persen) hanya berbeda sedikit dengan pemuda yang berstatus kawin. Sisanya adalah mereka yang berstatus cerai hidup/mati (1,76 persen).

Berdasarkan Gambar 3.5.1 dapat diketahui persentase pemuda menurut status perkawinan dan jenis kelamin. Pada gambar tersebut terlihat adanya perbedaan pola status perkawinan antara pemuda laki-laki dan pemuda perempuan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola perkawinan.

**Gambar 3.5.1. Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, Tahun 2008**



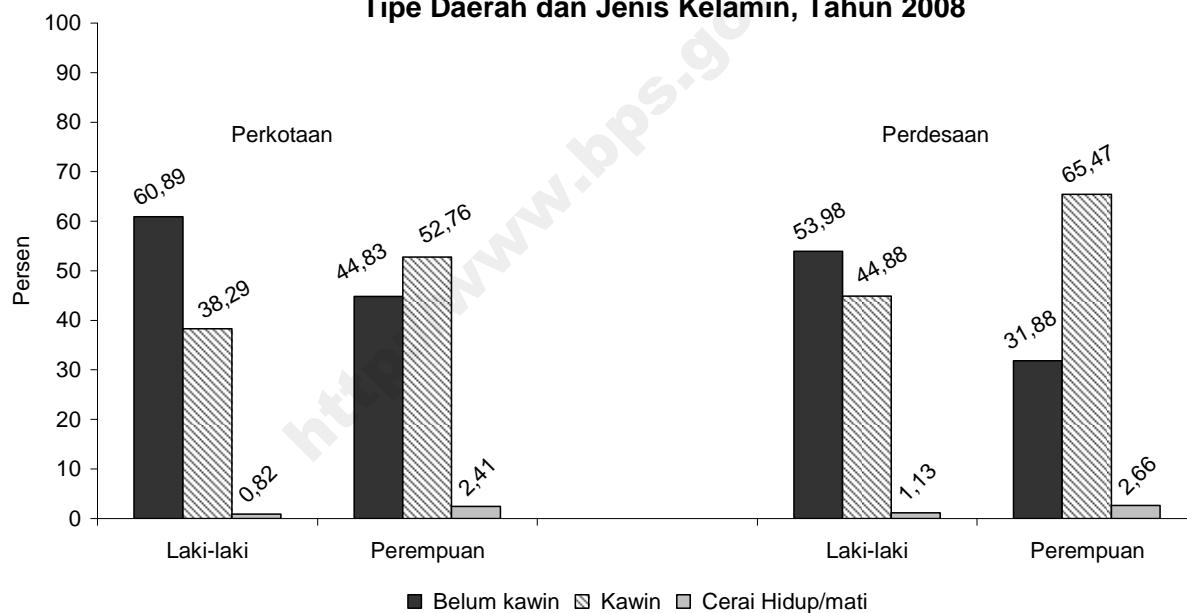
Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Sebanyak separuh lebih pemuda perempuan (58,92 persen) berstatus kawin, sedangkan pemuda laki-laki dengan status kawin hanya 41,53 persen. Kondisi tersebut berkebalikan dengan pemuda berstatus belum kawin, dimana sebagian besar pemuda laki-laki (57,50 persen) berstatus belum kawin dan pemuda perempuan yang belum kawin sebesar 38,55 persen.

Perbedaan kedua angka ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemuda perempuan pada umumnya lebih cepat menikah dan lebih banyak yang sudah berkeluarga dibandingkan dengan pemuda laki-laki.

Gambaran mengenai pemuda berdasarkan status perkawinan, tipe daerah dan jenis kelamin disajikan pada Gambar 3.5.2. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa di daerah perkotaan, perbandingan pemuda laki-laki dan perempuan yang berstatus kawin sangat mencolok. Persentase pemuda laki-laki yang berstatus kawin hanya sebesar 38,29 persen sedangkan untuk pemuda perempuan mencapai 52,76 persen. Pola yang relatif sama terjadi di daerah perdesaan.

**Gambar 3.5.2. Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Sementara itu, di daerah perdesaan pemuda perempuan yang berstatus kawin (65,47 persen) cukup signifikan jika dibandingkan dengan pemuda perempuan yang berstatus belum kawin (31,88 persen). Jika diperhatikan hal ini sesuai dengan pola budaya kita dimana perkawinan muda umumnya terjadi pada penduduk perempuan dan juga lebih banyak terjadi di daerah perdesaan.

Bila diperhatikan menurut kelompok umur (Tabel 3.5.1.), pada pemuda

berstatus pernah kawin (berstatus kawin dan cerai hidup maupun cerai mati), nampak masih terdapat pemuda yang pernah kawin pada kelompok usia termuda (15-19 tahun). Keadaan ini terutama terjadi di daerah perdesaan dengan persentase mencapai 8,04 persen, sedangkan di daerah perkotaan persentasenya hanya sebesar 3,84 persen. Padahal kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur yang seharusnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

**Tabel 3.5.1. Persentase Pemuda yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008**

Kelompok Umur	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perem-puan	L + P	Laki-laki	Perem-puan	L + P	Laki-laki	Perem-puan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15 - 19	1,38	6,26	3,84	1,98	14,80	8,04	1,69	10,42	5,96
20 - 24	15,19	41,55	28,68	25,12	67,64	46,79	19,80	53,61	37,07
25 - 29	52,87	77,41	65,43	65,91	89,50	78,21	59,07	83,28	71,57
30 - 35	82,42	90,78	86,72	89,95	95,94	93,03	86,17	93,36	89,87

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

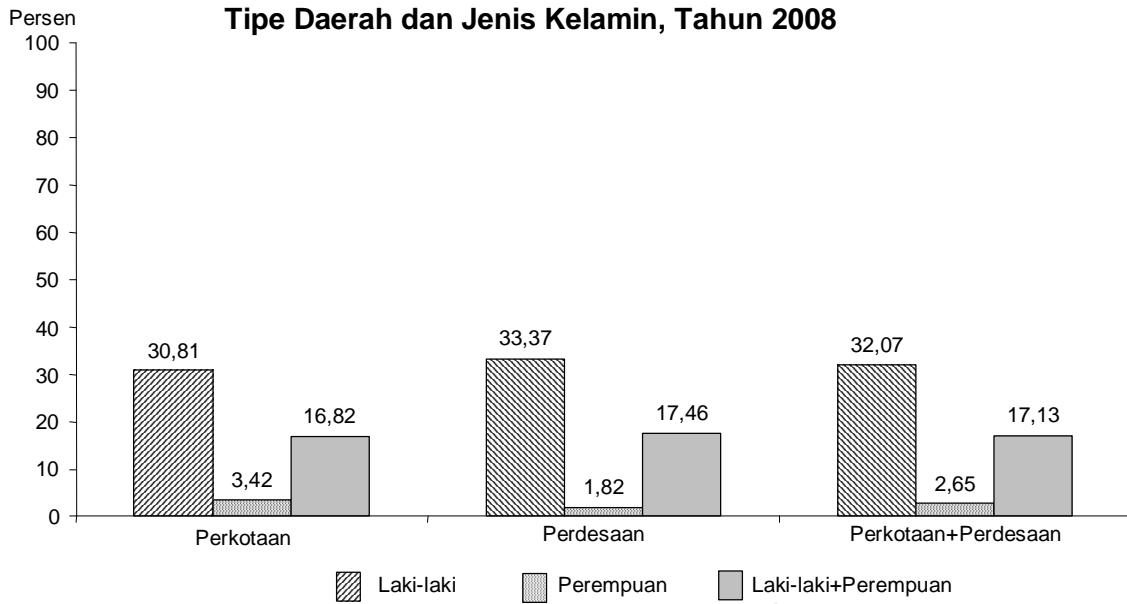
Berdasarkan Tabel 3.5.1 juga terlihat pula bahwa pemuda perempuan di daerah perdesaan yang menikah pada usia muda (15-19 tahun) jauh lebih besar dibandingkan pemuda laki-laki yaitu 14,80 persen berbanding 1,98 persen. Pola yang serupa juga terjadi di perkotaan, meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan di perdesaan. Persentase pemuda perempuan umur 15-19 tahun di perkotaan yang pernah kawin persentasenya sebesar 6,26 persen, sedangkan pemuda laki-laki hanya 1,38 persen.

### 3.6. Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga

Dalam sebuah rumah tangga, kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian tidak terlepas dari peran serta dari seluruh anggota rumah tangga, terutama kepala rumah tangganya. Sosok kepala rumah tangga sangat berperan dalam menentukan arah dan kelangsungan sebuah rumah tangga. Kepala rumah tangga bertanggung jawab secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota rumah tangganya, karenanya kepala rumah tangga banyak berperan dalam pengambil keputusan di dalam rumah tangganya. UU No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Peran kepala rumah tangga adalah sebagai penguasa utama rumah tangga yang memiliki hak-hak istimewa dan otoritas terbesar dalam keluarga. Anggota keluarga lain termasuk isteri harus tunduk kepada penguasa utama tersebut. Laki-laki dalam posisinya sebagai suami dan ayah merupakan figur sentral dalam keluarga. Kewibawaan, harga diri, dan status sosial ayah atau suami harus dijaga oleh anggota keluarga karena atribut-atribut tersebut sangat menentukan status dan kedudukan keluarga dalam masyarakat (Kusujiarti, dalam Abdullah, 1997 ).

**Gambar 3.6.1. Persentase Pemuda Kepala Rumah Tangga menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Hasil Susenas 2008 menunjukkan bahwa dari seluruh pemuda di Indonesia, sekitar 17,13 persen diantaranya berstatus sebagai kepala rumah tangga (Gambar 3.6.1). Laki-laki sebagai kepala rumah tangga sangat mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena biasanya posisi kepala rumah tangga diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Ini terbukti karena bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki sebagai kepala rumah tangga (32,07 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan yang berstatus kepala rumah tangga (2,65 persen). Gambaran yang serupa terjadi baik pada pemuda di daerah perkotaan maupun perdesaan.

**Tabel 3.6.1 Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga menurut Kelompok Umur, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008**

Kelompok Umur	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan+Pedesaan		
	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15 - 19	1,42	1,46	1,44	0,66	0,28	0,48	1,02	0,88	0,96
20 - 24	12,37	5,77	8,99	11,59	1,05	6,22	12,01	3,59	7,71
25 - 29	37,46	3,04	19,85	43,30	2,11	21,82	40,24	2,59	20,80
30 - 35	68,06	3,51	34,86	74,70	3,47	37,99	71,37	3,49	36,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Berdasarkan kelompok umur, seperti diperlihatkan pada Tabel 3.6.1 tampak bahwa semakin meningkat umur pemuda, semakin tinggi pula persentase yang menjadi kepala rumah tangga. Kondisi ini sejalan dengan pemuda yang sudah berstatus kawin. Pada kelompok umur 15-19 tahun, pemuda yang berstatus sebagai kepala rumah tangga kurang dari satu persen dan kelompok umur 20-24 tahun sebesar 7,71 persen. Pada kelompok umur yang lebih tua persentase yang menjadi kepala keluarga meningkat, yaitu kelompok umur 25-29 tahun sebesar 20,80 persen dan sebesar 36,42 persen merupakan kelompok umur 30-35 tahun. Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Kecenderungan ini terjadi karena pada umumnya pemuda pada kelompok umur yang lebih tua sudah berstatus kawin. Selain itu status sebagai kepala keluarga juga lebih diprioritaskan pada mereka yang dituakan.



# *PENDIDIKAN PEMUDA*

*http://www.bps.go.id*





## Pendidikan Pemuda

Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan negara bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era globalisasi yang sarat dengan

persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pendidikan bukan saja penting untuk membangun masyarakat terpelajar yang menjelma dalam wujud massa kritis (*critical mass*), tetapi juga dapat menjadi landasan yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki ilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan mempunyai keahlian serta keterampilan. Tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang memadai akan memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas secara nasional. Pada dasarnya generasi muda atau pemuda merupakan bagian dari kelompok usia produktif, oleh karena itu pemuda diharapkan memiliki pendidikan yang berkualitas sebagai bekal agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Agar kebutuhan pendidikan yang berkualitas dapat terpenuhi, khususnya bagi generasi muda, pemerintah merumuskan pembangunan pendidikan yang merujuk pada konvensi internasional mengenai pendidikan atau berkaitan dengan pembangunan pendidikan {seperti pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals (MDGs)*, dan *World Summit on Sustainable Development*} dan dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2008 mencakup (i) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (ii) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan (iii) Pemantapan *good governance*, yang dirinci antara lain sebagai berikut: memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan dan masyarakat penyandang cacat melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan lainnya termasuk pembangunan SD-SMP dan MI-MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil. Meningkatkan pemerataan dan

mutu pendidikan menengah seluas-luasnya baik melalui jalur formal maupun non formal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada bab ini akan dibahas mengenai partisipasi pendidikan pemuda, untuk melihat kualitas pemuda, akses dan partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan. Indikator pendidikan yang akan diteliti antara lain mencakup angka partisipasi sekolah, angka buta huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

#### 4.1. Partisipasi Pendidikan

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan derajat pendidikan, namun demikian pembangunan pendidikan masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, terutama yang berkaitan dengan perluasan akses dan pemerataan pendidikan pada jalur formal. Peran aktif masyarakat dalam meningkatkan akses pendidikan bagi segala lapisan masyarakat sangat diperlukan. Pemuda yang merupakan bagian dari masyarakat, diharapkan lebih dapat berperan aktif dalam partisipasi pendidikan mengingat perannya yang sangat dominan dalam keberhasilan sebuah pembangunan. Partisipasi pendidikan pemuda berupa akses pemuda pada kegiatan pendidikan (formal) dapat dilihat melalui indikator partisipasi sekolah, yang memberikan indikasi peran serta dan kontribusi pemuda dalam kegiatan pendidikan (formal).

Rendahnya akses pemuda pada kegiatan sekolah ditunjukkan oleh persentase pemuda yang tidak pernah sekolah terhadap populasi pemuda secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase pemuda yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses pemuda pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Hasil Susenas 2008 menunjukkan bahwa kurang dari 2 persen pemuda tidak pernah mengakses pendidikan, 82 persen pemuda saat ini berstatus tidak sekolah lagi dan 16 persen sedang bersekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda sudah pernah mengakses pendidikan.

Sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2009 adalah meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dapat dilihat melalui tiga aspek utama yaitu pemerataan berdasarkan tipe daerah, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

**Tabel 4.1.1. Partisipasi Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Tahun 2004-2008**

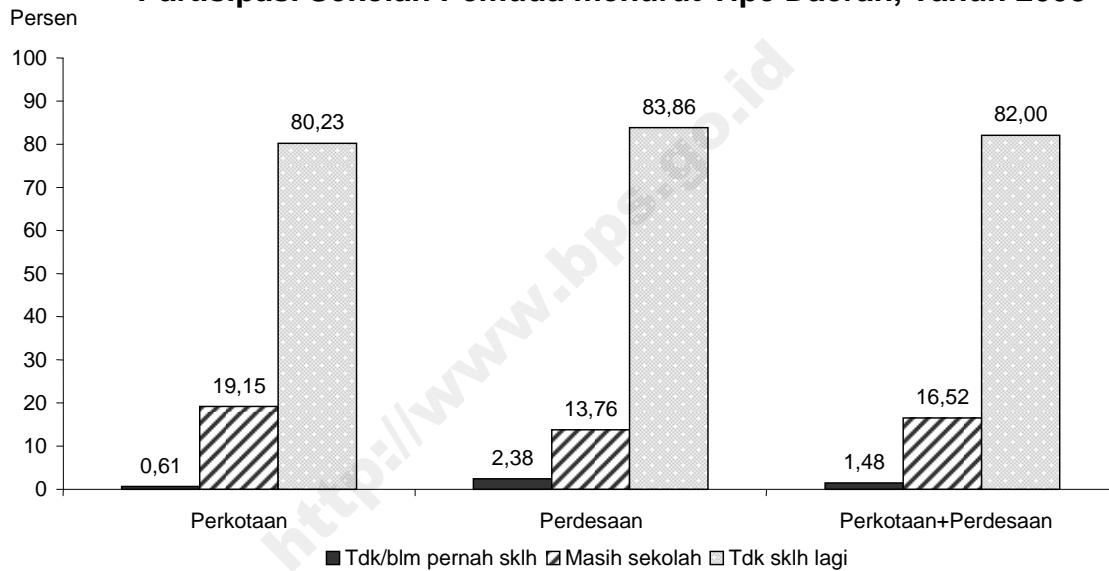
Partisipasi Sekolah	2004			2006			2008		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tdk/blm prnh sklh	1,42	2,62	2,03	1,42	2,16	1,79	1,13	1,82	1,48
Masih Sekolah	16,90	14,80	15,83	17,06	15,42	16,23	17,16	15,90	16,52
Tdk sklh lagi	31,68	82,58	82,13	81,52	82,43	81,98	81,71	82,28	82,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2004-2008

Pada Tahun 2004, 2006 dan 2008 diperoleh gambaran bahwa pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan RPJM 2004-2009 masih belum mencapai hasil yang diharapkan dimana secara nasional pendidikan pemuda laki-laki terlihat lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan (Tabel 4.1.1). Selama periode tahun 2004 hingga tahun 2008 dapat dilihat bahwa persentase pemuda perempuan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pemuda laki-laki. Pola yang sama terjadi juga pada pemuda yang tidak bersekolah lagi, dimana persentase pemuda perempuan yang tidak sekolah lagi lebih besar dari pada persentase pemuda laki-laki. Sebaliknya terjadi pada pemuda yang masih sekolah, pemuda perempuan yang masih bersekolah persentasenya lebih rendah daripada pemuda laki-laki.

Pendidikan pemuda terlihat membaik, terbukti dengan menurunnya persentase pemuda yang tidak/belum pernah sekolah. Pada tahun 2004 pemuda yang tidak/belum pernah sekolah persentasenya tercatat sebesar 2,03 persen kemudian turun menjadi 1,48 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2004, persentase pemuda yang tidak bersekolah lagi sebesar 82,13 persen, persentasenya berkurang menjadi 82,00 persen pada tahun 2008. Sebaliknya pemuda yang masih sekolah naik dari 15,83 persen pada tahun 2004 menjadi 16,52 persen pada tahun 2008.

**Gambar 4.1.1.**  
**Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Tipe Daerah, Tahun 2008**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Bila dikaji berdasarkan tipe daerah, secara umum terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara partisipasi pendidikan pemuda di perkotaan dan di perdesaan (Gambar 4.1.1). Hal ini membuktikan adanya indikasi belum meratanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Seperti yang tersaji pada Gambar 4.1.1, partisipasi sekolah pemuda di daerah perkotaan masih jauh lebih baik dibandingkan dengan rekan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Persentase pemuda yang pernah bersekolah di perkotaan tercatat sebesar 99,38 persen, lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan yang hanya

sebesar 97,62 persen. Sebaliknya, pemuda yang tidak pernah/belum bersekolah di daerah perdesaan (2,38 persen) besarnya mencapai hampir empat kali lipat dibandingkan dengan pemuda yang tidak pernah sekolah di perkotaan yang hanya sebesar 0,61 persen.

Dilihat dari distribusi sebarannya tiap provinsi, partisipasi pendidikan pemuda di berbagai provinsi menunjukkan persentase yang bervariasi (Tabel 4.2.3 Lampiran). Persentase pemuda yang tidak/belum pernah sekolah angkanya berkisar antara 0,35 persen hingga 4,75 persen kecuali di Provinsi Papua yang persentasenya mencapai sebesar 25,85 persen. Persentase pemuda yang tidak sekolah lagi sebarannya berkisar antara 68,95 persen hingga 86,21 persen kecuali di Provinsi Papua, dimana persentase pemuda yang tidak sekolah lagi persentasenya paling rendah yaitu sebesar 58,31 persen.

Untuk melihat seberapa banyak penduduk berusia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu. Indikator ini dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan dibidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Dalam kajian ini, Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai persentase pemuda yang masih bersekolah terhadap jumlah populasi pemuda secara keseluruhan tanpa memperhatikan jenjang atau tingkat pendidikan yang sedang dijalannya.

Tabel 4.1.2. secara rinci menyajikan APS menurut kelompok usia sekolah, tipe daerah dan jenis kelamin. Secara umum akses masyarakat pada pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin atau jender. APS pemuda laki-laki masih lebih tinggi dibanding pemuda perempuan. Jika dilihat menurut kelompok umur nampak bahwa pada usia 15 tahun, APS perempuan sedikit lebih tinggi dibanding APS laki-laki. Keadaan sebaliknya terjadi pada kelompok umur di atasnya, dimana APS untuk laki-laki cenderung lebih tinggi dari perempuan. Kecenderungan makin menurunnya APS penduduk perempuan pada usia yang semakin tinggi ini diduga berkaitan dengan kurang tersedianya sarana maupun prasarana untuk jenjang

pendidikan yang lebih tinggi di lokasi sekitar tempat tinggal mereka. Sehingga untuk dapat bersekolah, mereka harus menggunakan alat transportasi untuk mencapai sekolah. Faktor lain yang juga turut mempengaruhi kondisi tersebut adalah adanya “*sex preference*” yang cenderung mengutamakan anak laki-laki untuk bersekolah dibandingkan dengan perempuan (BPS, 2002).

**Tabel 4.1.2 Angka Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2008**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Laki-laki	80,98	67,26	73,46
	Perempuan	82,18	69,80	75,74
	L+P	81,58	68,47	74,58
16-18	Laki-laki	62,93	47,26	54,81
	Perempuan	60,90	47,94	54,59
	L+P	61,91	47,58	54,70
19-24	Laki-laki	17,75	7,24	12,83
	Perempuan	17,09	6,12	12,05
	L+P	17,41	6,68	12,43
25-35	Laki-laki	1,74	0,69	1,23
	Perempuan	1,21	0,69	0,96
	L+P	1,47	0,69	1,09
Jumlah ( 15 - 35 )	Laki-laki	19,84	14,76	17,35
	Perempuan	18,72	13,25	16,07
	L+P	19,27	14,00	16,70

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Faktor umur mempengaruhi tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sekolah. Pada Tabel 4.1.2 terlihat bahwa semakin meningkatnya umur maka angka partisipasi sekolah cenderung semakin menurun. APS pemuda yang berusia 15 tahun tercatat sebesar 74,58 persen. Kemudian, APS pemuda pada kelompok umur di atasnya menunjukkan tren yang semakin menurun, yaitu untuk pemuda usia 16-18 tahun sebesar 54,70 persen, lalu untuk pemuda usia 19-24 tahun sebesar 12,43 persen dan untuk pemuda usia 25-35 tahun hanya sebesar 1,09 persen.

Pola penurunan APS serupa ini merupakan pola yang secara umum banyak ditemukan dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Pola umum tersebut antara lain dipengaruhi oleh kecenderungan bahwa pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi memerlukan biaya pendidikan yang semakin mahal serta adanya kecenderungan pada sebagian besar penduduk untuk menikah atau bekerja pada usia yang semakin tinggi.

#### 4.2. Angka Buta Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, adalah kemampuan baca tulis atau kemelek-aksaraan (*literacy*) penduduk dewasa, kemelek-aksaraan adalah salah satu indikator keberhasilan dalam bidang pendidikan. Upaya pemerintah atau keseriusan dan komitmenya terhadap kemelek-aksaraan tertuang dalam PP No. 7 tahun 2006 tentang RPJM 2004-2009 bahwa salah satu target pembangunan pendidikan adalah menurunnya angka buta aksara penduduk 15 tahun ke atas menjadi 5 persen di tahun 2009. Secara operasional perhatian khusus mengenai buta aksara ditindaklanjuti dalam Inpres RI No. 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Nasional Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PWPPBA). Persentase penduduk buta aksara juga merupakan komponen penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika buta aksara masih tetap tinggi, maka IPM juga akan tetap rendah. Sebaliknya, jika buta aksara rendah menandakan IPM naik. Dengan semakin berkurangnya penduduk yang mengalami buta huruf, menandakan taraf pendidikan masyarakat yang semakin maju sekaligus menunjukkan taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam hal pemberantasan buta aksara telah dilakukan diantaranya adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf Fungsional dan saat ini yang paling populer yaitu melalui program Keaksaraan Fungsional yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995. Program ini dimaksudkan untuk memberantas kebutaaksaraan dengan fokus kegiatan belajar melalui diskusi, membaca, menulis, berhitung dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam aktifitas yang berkaitan dengan

kebutuhan keseharian. Untuk memotivasi dan adanya rasa penghargaan atas mereka yang mengikuti kegiatan keaksaraan, pemerintah bahkan sekarang telah memberikan sertifikat “SUKMA” (Surat Keterangan Melek Aksara) bagi yang telah selesai mengikuti kegiatan keaksaraan fungsional.

Persentase pemuda buta huruf menurut tipe daerah dan jenis kelamin berdasarkan hasil Susenas dari tahun 2004 hingga 2008, disajikan pada Tabel 4.2.1. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa persentase pemuda yang buta huruf selama kurun waktu 2004 hingga 2008 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2004, pemuda yang buta huruf tercatat sebesar 1,97 persen, angka tersebut turun menjadi 1,78 persen pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2008 kembali turun menjadi sebesar 1,00 persen. Rendahnya angka buta huruf pemuda menunjukkan semakin membaiknya kemampuan minimal yang dimiliki pemuda, dalam hal ini kemampuan membaca dan menulis.

**Tabel 4.2.1. Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2004-2008**

Tipe Daerah	2004			2006			2008		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perkotaan	0,61	1,08	0,85	0,59	0,84	0,72	0,17	0,35	0,27
Perdesaan	2,10	3,76	2,93	2,16	3,25	2,70	1,17	2,39	1,79
Perkotaan + Perdesaan	1,42	2,50	1,97	1,44	2,13	1,78	0,66	1,34	1,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2004-2008

Tabel 4.2.1 juga menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis pemuda di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan pemuda di daerah perdesaan. Hasil Susenas 2008 menunjukkan bahwa persentase pemuda yang buta huruf di daerah perkotaan berada di bawah 1,00 persen sedangkan di perdesaan persentasenya masih sekitar 1,79 persen (laki-laki 1,17 persen dan perempuan 2,39 persen). Hal ini menunjukkan bahwa hampir

100 persen pemuda di perkotaan sudah melek huruf. Keadaan tersebut terjadi di seluruh provinsi dan secara rinci dapat dilihat pada tabel Lampiran 4.3.

Sementara itu, dapat dilihat berdasarkan hasil Susenas tahun 2008 bahwa angka buta huruf pemuda perempuan tercatat 2 kali lipat lebih tinggi dari angka buta huruf pemuda laki-laki (1,34 persen berbanding 0,66 persen). Keadaan tersebut berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan ada sekitar 0,17 persen pemuda laki-laki yang buta huruf sedangkan untuk pemuda perempuan mencapai sebesar 0,35 persen. Begitu pula di daerah perdesaan, untuk pemuda laki-laki yang buta huruf sebesar 1,17 persen sedangkan pemuda perempuan persentasenya lebih tinggi lagi yaitu sebesar 2,39 persen. Pola angka buta huruf pemuda perempuan yang lebih tinggi dari angka buta huruf pemuda laki-laki menunjukkan adanya indikasi bahwa masih terdapat kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam belajar atau menuntut ilmu.

**Tabel 4.2.2. Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2008**

Kelompok Umur		Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
15-24	Laki-laki	0,13	0,80	0,46	
	Perempuan	0,14	1,15	0,62	
	L+P	0,14	0,97	0,54	
25-35	Laki-laki	0,21	1,53	0,85	
	Perempuan	0,55	3,47	1,99	
	L+P	0,39	2,53	1,44	
Jumlah ( 15 - 35 )	Laki-laki	0,17	1,17	0,66	
	Perempuan	0,35	2,39	1,34	
	L+P	0,27	1,79	1,00	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Di sisi lain, nampak bahwa umur pemuda merupakan salah satu faktor yang juga turut mempengaruhi pola angka buta huruf pemuda. Seperti yang

terlihat pada Tabel 4.2.2, angka buta huruf pemuda cenderung semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya umur pemuda. Angka buta huruf pemuda pada kelompok umur 15-24 tahun adalah sebesar 0,54 persen. Pada kelompok umur yang lebih tua yaitu kelompok umur 25-35 tahun, angka buta huruf pemuda menjadi lebih tinggi lagi yaitu sebesar 1,44 persen. Kecenderungan semakin meningkatnya angka buta huruf pemuda pada usia yang semakin tinggi ini secara umum juga terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan serta untuk pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan.

#### 4.3. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan lainnya yang biasa digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*). Indikator rata-rata lama sekolah merupakan indikator output pendidikan yang dikembangkan UNDP pada tahun 1990 dalam rangka penyusunan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

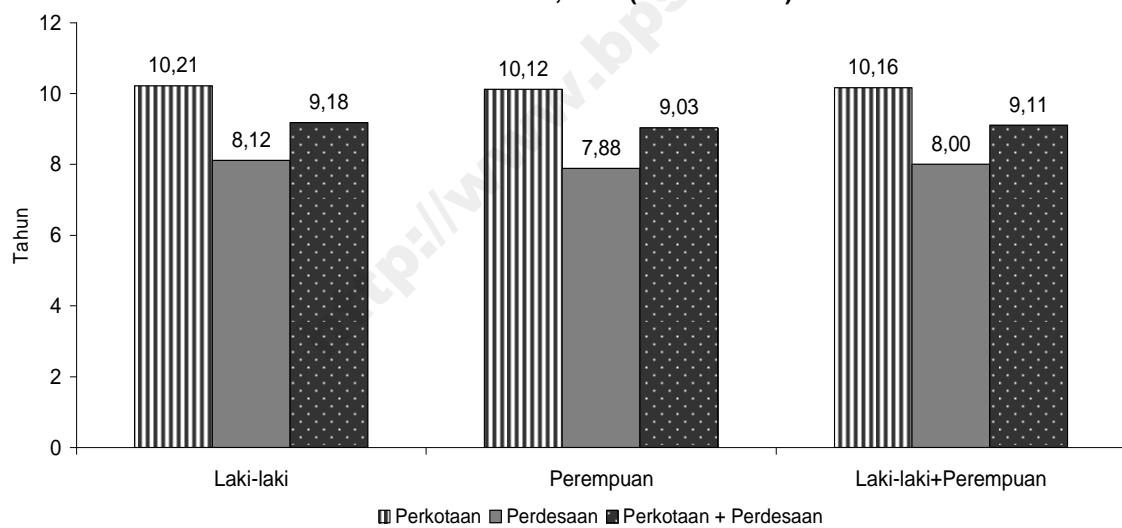
Indikator rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang memerlukan waktu yang lebih cepat atau lebih lambat dalam menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Sesuai dengan konsep tersebut maka lama sekolah untuk seseorang yang tamat SD adalah 6 tahun, SMP kelas 1 adalah 7 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya.

Salah satu sasaran pemerintah dalam bidang pendidikan adalah dicanangkannya gerakan nasional penuntasan wajib belajar 9 tahun. Pencapaian sasaran tersebut untuk para pemuda secara umum pada tahun 2008 dapat dikatakan telah mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Berdasarkan Gambar 4.3.1 dapat diketahui bahwa secara nasional rata-rata lama sekolah pemuda telah mencapai 9 tahun. Angka ini mengandung arti bahwa rata-rata pendidikan maksimal yang telah dicapai para pemuda hingga tahun 2008 adalah kelas 3 SMP. Dengan kata lain, program wajib belajar 9

tahun yang dicanangkan oleh pemerintah secara umum telah berhasil dituntaskan oleh pemuda pada tahun 2008.

Akan tetapi bila dirinci menurut tipe daerah, pemerataan pendidikan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh semua pemuda. Ternyata hanya pemuda di daerah perkotaan saja yang telah berhasil melampaui sasaran program wajib belajar 9 tahun. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah pemuda di daerah perkotaan yang mencapai 10,16 tahun (Gambar 4.3.1). Sebaliknya, program tersebut untuk pemuda yang berada di daerah perdesaan masih belum mencapai hasil yang diharapkan karena rata-rata lama sekolah pemuda perdesaan baru mencapai 8,00 tahun. Sejalan dengan kenyataan itu, program wajib belajar 9 tahun seyogyanya lebih difokuskan pada masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan termasuk juga para pemudanya.

**Gambar 4.3.1. Rata-rata Lama Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2008 (dalam Tahun)**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

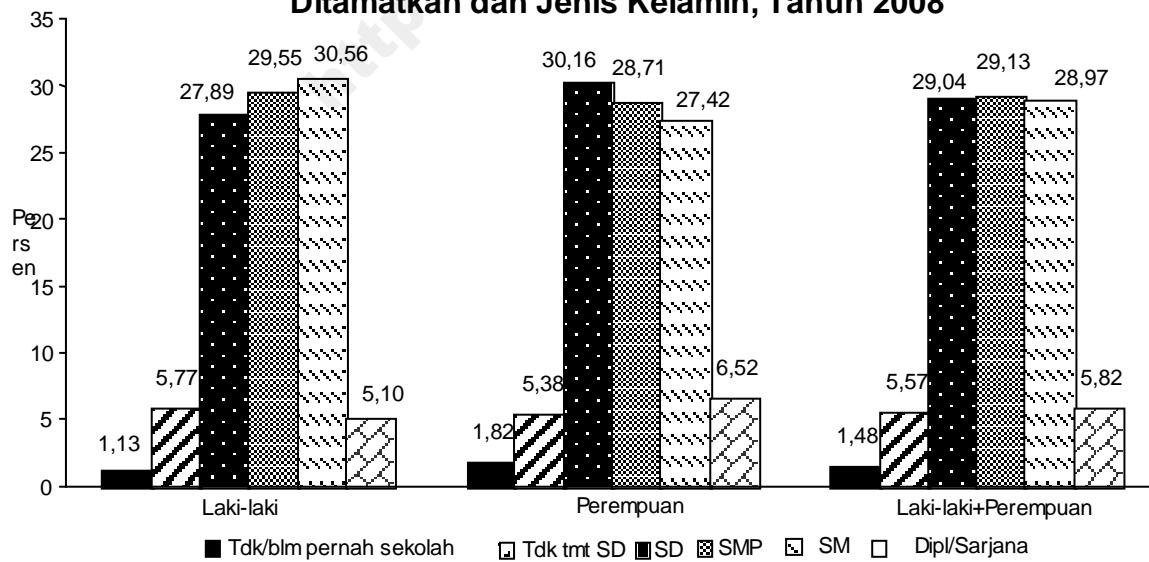
Selain berdasarkan tipe daerah, pemerataan pendidikan juga harus memperhatikan kesetaraan jender. Hal ini diperlukan karena masih adanya perbedaan rata-rata lama sekolah antara pemuda laki-laki dengan pemuda perempuan meskipun perbedaannya relatif kecil, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3.1. Rata-rata lama sekolah untuk pemuda laki-laki yang mencapai 9,18 tahun masih lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda

perempuan yang hanya mencapai 9,03 tahun. Kondisi tersebut juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Rata-rata lama sekolah pemuda di perkotaan masing-masing mencapai 10,21 tahun untuk laki-laki dan sebesar 10,12 tahun untuk perempuan. Di daerah perdesaan rata-rata lama sekolah untuk laki-laki sebesar 8,12 tahun dan perempuan sebesar 7,88 tahun.

#### 4.4. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Persentase pemuda menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin tersaji pada Gambar 4.4.1. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa secara umum pendidikan yang dicapai oleh sebagian besar pemuda hanya sampai pada tingkat atau jenjang pendidikan SD dan SMP dengan persentase masing-masing sebesar 29,04 persen dan sebesar 29,13 persen. Sedangkan pemuda yang berhasil menamatkan pendidikannya pada perguruan tinggi persentasenya masih kurang dari 6 persen.

**Gambar 4.4.1. Persentase Pemuda menurut Pendidikan Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun 2008**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Gambar 4.4.1 juga memperlihatkan bahwa pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi, persentase pemuda yang tamat sekolah semakin kecil. Keadaan ini secara umum mencerminkan masih rendahnya tingkat pendidikan pemuda di Indonesia. Disamping itu masih terdapat pula pemuda yang tidak/belum pernah sekolah (1,48 persen) dan tidak/belum tamat Sekolah Dasar (5,57 persen). Berdasarkan hasil Susenas tahun 2008 diketahui bahwa dalam bidang pendidikan menunjukkan perkembangan yang meningkat jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2004. Perkembangan tersebut terlihat baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan, artinya semakin banyak orang yang bisa menikmati pendidikan dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dilihat menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan yang ditamatkan pemuda laki-laki dan pemuda perempuan masing-masing mempunyai pola yang berbeda. Secara umum persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda laki-laki untuk tingkat SD, SMP maupun SM semakin meningkat seiring dengan tingginya tingkat pendidikan yaitu masing-masing sebesar 27,89 persen, 29,55 persen dan 30,56 persen. Kondisi yang berbeda bahkan cenderung berkebalikan terjadi pada jenjang pendidikan pemuda perempuan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh pemuda perempuan, persentase perempuan yang tamat semakin menurun. Persentase pemuda perempuan yang tamat SD sebesar 30,16 persen, tamat SMP sebesar 28,71 persen dan tamat SM sebesar 27,42 persen.

Pada tingkat pendidikan yang lebih rendah, terlihat bahwa pemuda perempuan yang tamat SD persentasenya lebih besar daripada pemuda laki-laki (30,16 persen berbanding 27,89 persen). Namun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, persentase pemuda laki-laki lebih besar daripada pemuda perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan pemuda laki-laki masih lebih tinggi dari pemuda perempuan. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa laki-laki masih lebih diprioritaskan dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

**Tabel 4.4.1. Persentase Pemuda Menurut Tipe daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SMP	SM	Akademi/ Perguruan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Perkotaan</b>							
Laki-laki	0,49	3,11	19,67	27,92	40,79	8,01	100,00
Perempuan	0,73	2,77	21,55	28,10	36,92	9,94	100,00
L + P	0,61	2,94	20,63	28,01	38,82	9,00	100,00
<b>Perdesaan</b>							
Laki-laki	1,78	8,52	36,41	31,24	19,96	2,08	100,00
Perempuan	2,98	8,15	39,31	29,37	17,30	2,89	100,00
L + P	2,38	8,33	37,87	30,30	18,62	2,49	100,00
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>							
Laki-laki	1,13	5,77	27,89	29,55	30,56	5,10	100,00
Perempuan	1,82	5,38	30,16	28,71	27,42	6,52	100,00
L + P	1,48	5,57	29,04	29,13	28,97	5,82	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Dilihat berdasarkan status pendidikan tampak bahwa pemuda di daerah perkotaan masih lebih baik tingkat pendidikannya dibandingkan dengan rekan mereka di perdesaan. Di daerah perkotaan, persentase pemuda yang tamat SMP sebesar 28,01 persen, SM sebesar 38,82 persen dan PT sebesar 9,00 persen, sedangkan di daerah perdesaan persentase pemuda yang tamat SMP sebesar 30,30 persen, SM sebesar 18,62 persen dan PT sebesar 2,49 persen. Sebaliknya, persentase pemuda di perdesaan yang menamatkan pendidikan pada tingkat yang lebih rendah (SD) tercatat hampir dua kali lipat lebih besar dari persentase pemuda di perkotaan (37,87 persen berbanding 20,63 persen), begitu pula dengan mereka yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD (Tabel 4.4.1).

Dilihat sebarannya menurut provinsi, seperti yang disajikan pada Tabel 4.4.1 sampai dengan 4.4.3 dalam lampiran, jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan para pemuda cenderung berbeda antara provinsi yang satu dengan yang lain. Pemuda yang jenjang pendidikan tertingginya tamat SM, persentase tertinggi berada di Provinsi DI. Yogyakarta (44,49 persen), DKI. Jakarta (44,15 persen) dan Kepulauan Riau (38,67 persen).



*KETENAGAKERJAAN*





## Ketenagakerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan manusia, baik secara materi maupun non materi. Pada pekerjaan selalu melekat simbol-simbol status pekerjaan yang mendasari pandangan seseorang terhadap pekerjaan tersebut. Contoh, dalam masyarakat tradisional atau perdesaan lekat dengan pekerjaan pertanian, sementara itu ciri-ciri pada masyarakat kota adalah dengan modernitasnya, seperti menurut *Henry Pirenne* (dalam Kuntowijoyo, 2006), ialah dominasi kegiatan non pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Lebih spesifiknya kota-kota, menurut

Kuntowijoyo, hidup dari perdagangan dan industri, sedangkan perdesaan dari pertanian. Terlepas dari simbol-simbol tersebut di atas, pekerjaan itu sendiri merupakan kebutuhan asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam amandemen UUD 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu perlu perencanaan yang matang di bidang ketenagakerjaan guna mewujudkan kewajiban negara tersebut.

Perencanaan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan tidak terlepas dari isu generasi muda atau pemuda karena merupakan salah satu kelompok penting dalam masyarakat yang dinamis dan energik yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan karakteristiknya, dilihat dari segi usia, tenaga dan kemampuan berfikir, kelompok pemuda relatif lebih berpotensi dalam memasuki dunia ketenagakerjaan dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya. Pemuda memiliki peluang yang lebih luas dan merupakan generasi pewaris masa depan bangsa. Oleh karena itu isu tentang pemuda ini perlu menjadi pemikiran dan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan melalui penyusunan berbagai kebijakan dan program di bidang ketenagakerjaan, khususnya upaya peningkatan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan baru, secara strategis dan efektif yang diprioritaskan pada upaya pemberdayaan pemuda. Hal ini menjadi fokus perhatian karena bila tidak ditangani dengan baik akan merugikan perkembangan suatu negara di masa yang akan datang.

Guna mendukung menyusun program dan kebijakan ketenagakerjaan pemuda, pada bab ini akan dibahas mengenai partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, tingkat pengangguran, lapangan usaha, status pekerjaan dan kualitas pendidikan pekerja. Pembahasan kondisi dan situasi ketenagakerjaan pemuda pada bagian ini akan memberikan gambaran secara makro mengenai peranan dan kontribusi pemuda dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Peranan dan kontribusi mereka antara lain dapat

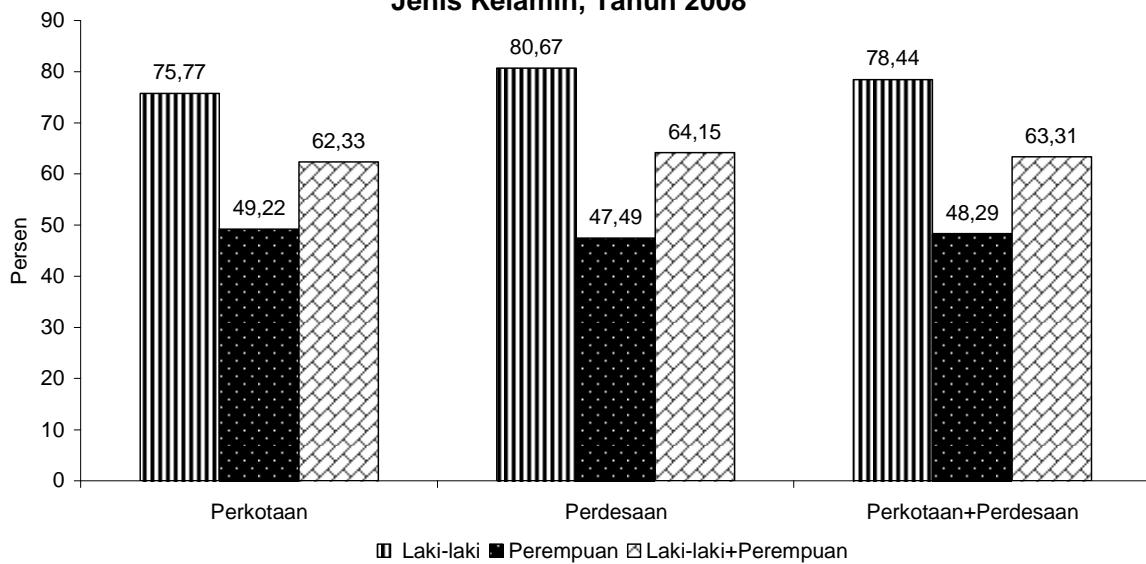
dilihat dari status pekerjaan, tingkat optimalisasi sumberdaya dilihat dari jumlah jam kerja dalam seminggu dan besarnya sumber daya pemuda yang belum terpakai (tingkat pengangguran).

### 5.1. Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi

Berdasarkan kegiatan sehari-harinya, penduduk usia kerja termasuk juga para pemuda secara keseluruhan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja yang aktif melakukan kegiatan ekonomi yang mencakup mereka yang melakukan kegiatan bekerja dan mereka yang aktif mencari pekerjaan. Sejalan dengan itu, peranan dan kontribusi pemuda dalam kegiatan ekonomi sangat ditentukan oleh partisipasi para pemuda dalam kegiatan angkatan kerja.

Salah satu indikator yang biasa digunakan dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan salah satu ukuran yang sering dipakai untuk melihat fluktuasi yang terjadi dalam suatu masyarakat yang berkenaan dengan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau disebut angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap seluruh penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas).

**Gambar 5.1.1.**  
**TPAK Pemuda menurut Tipe Daerah dan**  
**Jenis Kelamin, Tahun 2008**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Keterlibatan pemuda dalam pembangunan ekonomi pada tahun 2008 relatif cukup besar, hal ini dapat dilihat dari TPAK pemuda yang mencapai 63,31 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 pemuda, sekitar 63 orang diantaranya aktif melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Gambar 5.1.1 juga menunjukkan bahwa TPAK pemuda di daerah perkotaan tercatat sebesar 62,33 persen, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 64,15 persen. Angka tersebut menggambarkan bahwa partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi di perdesaan tampak lebih tinggi dibandingkan pemuda di perkotaan.

Pola partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi juga nampak dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin. Gambar 5.1.1 memperlihatkan TPAK pemuda laki-laki (78,44 persen) yang jauh lebih tinggi dari TPAK pemuda perempuan (48,29 persen). Kecenderungan serupa juga ditemukan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, TPAK pemuda laki-laki tercatat sebesar 75,77 persen, sedangkan untuk pemuda perempuan hanya 49,22 persen. Begitu pula di daerah perdesaan, TPAK pemuda laki-laki (80,67 persen) lebih besar dari pemuda perempuan (47,49 persen). Kesenjangan yang terjadi antara TPAK pemuda perempuan dengan TPAK pemuda laki-laki, kemungkinan disebabkan perempuan lebih banyak yang kegiatannya

mengurus rumah tangga sehingga sangat terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, tingkat pendidikan perempuan yang rata-rata lebih rendah dari laki-laki lebih membatasi peluang perempuan untuk bersaing dengan laki-laki di pasar kerja. Bahkan masih ada indikasi bias jender di bidang ketenagakerjaan.

Tabel 5.1.1 menyajikan TPAK pemuda menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Bila diperhatikan menurut kelompok umur, TPAK pemuda tertinggi berada pada kelompok umur 30-35 tahun yaitu sebesar 75,70 persen, sedangkan terendah pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 35,61 persen. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa ada kecenderungan TPAK pemuda semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya usia pemuda. Ini merupakan hal yang wajar, mengingat pada usia yang lebih tua seorang pemuda sudah mulai produktif bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Di lain pihak, mereka yang berada pada kelompok umur yang lebih muda (15-19 tahun) merupakan kelompok usia sekolah dan mereka bukan sebagai penanggung jawab utama dalam usaha mencari nafkah bagi keluarganya. Tanggung jawab mereka yang utama adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi persiapan kehidupan mereka di masa depan.

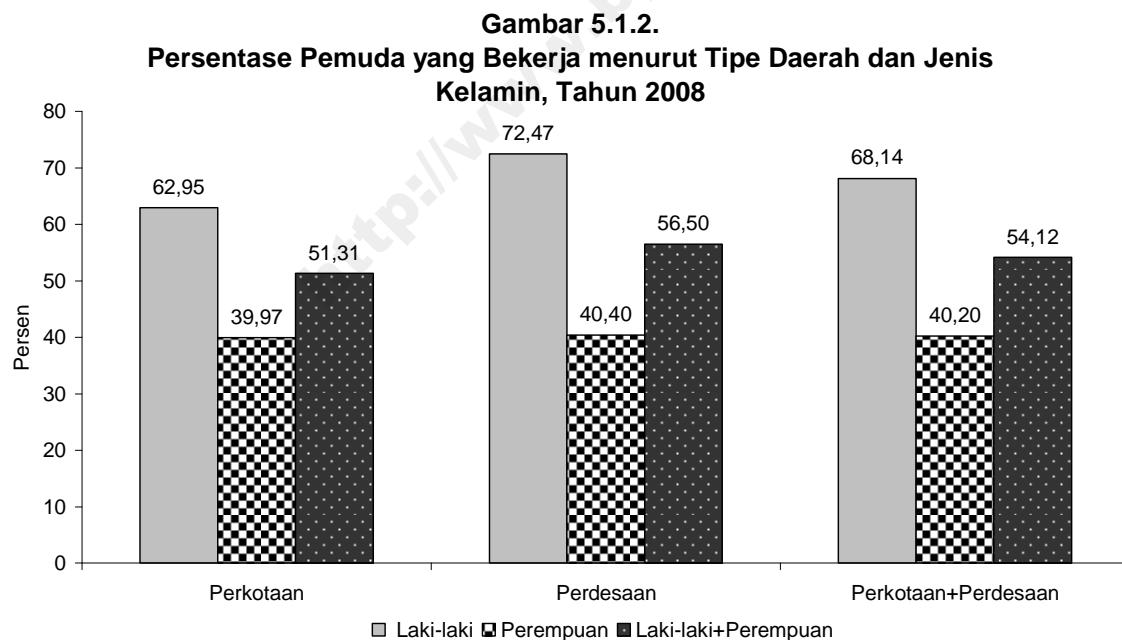
**Tabel 5.1.1 TPAK Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2008**

Jenis Kelamin	Kelompok Umur (tahun)					15-35
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 35		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	40,63	83,91	95,43	97,52	78,44	
Perempuan	30,22	53,90	54,42	54,82	48,29	
Laki-laki + Perempuan	35,61	68,73	74,55	75,70	63,31	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Pola peningkatan TPAK seiring dengan peningkatan usia juga terlihat pada pemuda laki-laki, dimana pada kelompok umur 15-19 tahun tercatat TPAKnya sebesar 40,63 persen dan meningkat terus sampai dua kali lipat pada kelompok umur 30-35 tahun (97,52 persen), sedangkan untuk pemuda perempuan TPAKnya relatif sama di semua kelompok umur kecuali kelompok umur muda.

Berdasarkan Tabel 5.1.1 dapat juga dilihat bahwa pada setiap kelompok umur, TPAK pemuda laki-laki cenderung lebih tinggi dari pemuda perempuan. Selain itu terlihat pula kesenjangan TPAK antara pemuda laki-laki dengan perempuan yang semakin besar seiring dengan meningkatnya umur. Pada kelompok umur 15-19 tahun kesenjangan TPAK pemuda laki-laki dengan pemuda perempuan mencapai 10 persen, sedangkan pada kelompok umur 30-35 tahun kesenjangan tersebut meningkat menjadi lebih dari 40 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Gambar 5.1.2 menunjukkan bahwa dari seluruh populasi pemuda terdapat 54,12 persen pemuda yang bekerja. Jika diperinci berdasarkan komposisi daerah tempat tinggal nampak bahwa di daerah perdesaan

persentase pemuda yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda di daerah perkotaan (56,50 persen berbanding 51,31 persen).

Tingginya persentase pemuda yang bekerja di daerah perdesaan, diduga karena struktur perekonomian di daerah perdesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor ini lebih banyak menyerap tenaga kerja terutama para pemuda, karena sektor tersebut relatif mudah untuk dimasuki. Di sektor pertanian biasanya tidak terlalu menuntut kualifikasi atau persyaratan tertentu bagi tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja seperti pendidikan, ketrampilan, pengalaman maupun keahlian khusus. Berbeda dengan jenis pekerjaan yang tersedia di perkotaan yang lebih banyak terkonsentrasi pada sektor-sektor sekunder (perdagangan, industri, konstruksi, dll). Sehingga tidak semua pemuda di perkotaan dapat terserap, karena pada sektor-sektor tersebut dituntut spesifikasi keterampilan dan tingkat pendidikan tertentu bagi para pekerjanya.

Gambar 5.1.2 memperlihatkan bahwa pemuda laki-laki yang bekerja persentasenya hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada pemuda perempuan (68,14 persen berbanding 40,20 persen). Keadaan yang sama berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Gambaran tersebut dapat berindikasi adanya ketidaksetaraan jender.

## 5.2. Lapangan Usaha

Pengembangan sumber daya manusia sebagai sumber daya pembangunan serta pelaku pembangunan, harus memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional, serta mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan IPTEK. Oleh karenanya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tuntutan yang sangat mendesak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mutlak diperlukan agar sumber daya manusia yang siap memasuki pasar kerja dapat terserap dan berorientasi kepada lapangan usaha atau lapangan kerja yang ada. Disatu sisi komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha mencerminkan struktur perekonomian dan potensi perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Informasi tersebut juga dapat memberikan gambaran

kasar mengenai kualitas sumber daya penduduk, terutama tingkat ketrampilan yang dikuasai. Semakin tinggi ketrampilan yang dikuasai, semakin tinggi minat mereka untuk bekerja diluar sektor pertanian yang menghasilkan upah/gaji lebih tinggi.

Dari hasil Sakernas 2008, diketahui bahwa lapangan usaha pertanian mempunyai peran yang sangat strategis bagi ketenagakerjaan Indonesia, tidak terkecuali bagi penyerapan tenaga kerja pemuda. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemuda Indonesia yang masih sangat terkonsentrasi pada profesi petani, seperti ditunjukkan pada Tabel 5.2.1 dimana secara rata-rata 34,56 persen pemuda diantaranya bekerja atau berusaha di lapangan usaha pertanian. Keunggulan lapangan usaha pertanian terbukti paling lentur dan telah menjadi semacam katup pengaman bagi "kelebihan" tenaga kerja di sektor formal bukan pertanian yang mengalami guncangan akibat dampak krisis ekonomi. Karenanya tidak realistik jika lapangan usaha pertanian justru diabaikan dalam kerangka perencanaan pembangunan makro.

**Tabel 5.2.1 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, Tahun 2008**

Lapangan Usaha	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	6,83	55,92	34,56
Perdagangan	31,86	13,56	21,52
Industri	21,80	10,82	15,60
Jasa	19,62	6,96	12,47
Transportasi & Komunikasi	9,20	5,10	6,89
Konstruksi	6,36	5,41	5,82
Keuangan	3,25	0,60	1,75
Pertambangan & Galian	0,76	1,51	1,18
Listrik, Gas, & Air	0,33	0,12	0,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Sektor berikutnya yang juga banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor perdagangan dan sektor industri, yaitu masing-masing sebesar

21,52 persen dan 15,60 persen (Tabel 5.2.1). Sektor-sektor yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor listrik, gas dan air (0,21 persen), pertambangan dan galian (1,18 persen) dan keuangan (1,75 persen). Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5.2.1 sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja pemuda di perkotaan berturut-turut adalah sektor perdagangan, industri dan jasa dengan persentase masing-masing sebesar 31,86 persen, 21,80 persen dan 19,62 persen. Sementara di daerah perdesaan, sektor yang mempunyai peran cukup besar dalam menunjang kegiatan perekonomian adalah sektor pertanian. Dari seluruh pemuda di perdesaan, separuh lebih (55,92 persen) pemuda bekerja pada sektor pertanian, sedangkan pemuda yang bekerja pada sektor perdagangan dan industri, masing-masing hanya sebesar 13,56 persen dan 10,82 persen.

**Tabel 5.2.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2008**

Lapangan Usaha (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Laki-laki+ Perempuan (4)
Pertanian	35,85	32,39	34,56
Perdagangan	17,92	27,58	21,52
Industri	13,73	18,74	15,60
Jasa	10,23	16,22	12,47
Transportasi & Komunikasi	9,41	2,63	6,89
Konstruksi	9,00	0,48	5,82
Keuangan	1,85	1,60	1,75
Pertambangan & Galian	1,71	0,29	1,18
Listrik, Gas, & Air	0,30	0,06	0,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Dilihat menurut jenis kelamin, pada sektor transportasi/komunikasi dan konstruksi, proporsi laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Pemuda laki-laki yang bekerja pada sektor transportasi/komunikasi sebesar 9,41 persen atau empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan (2,63 persen). Pemuda laki-laki yang bekerja di sektor konstruksi

sebesar 9,00 persen atau 18 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan (0,48 persen). Perbedaan yang cukup berarti antara pemuda laki-laki dan pemuda perempuan juga terjadi pada sektor perdagangan, industri dan jasa. Pada sektor-sektor tersebut tampaknya lebih diminati oleh pemuda perempuan, ini terlihat dari persentase pemuda perempuan yang jauh lebih tinggi daripada pemuda laki-laki yaitu masing-masing sebesar 27,58 persen, 18,74 persen dan 16,22 persen, sedangkan pada sektor yang sama pemuda laki-laki hanya sebesar 17,92 persen, 13,73 persen dan 10,23 persen (Tabel 5.2.2).

### 5.3. Status Pekerjaan

Dalam pembangunan terjadi suatu proses perubahan mendasar yang bersifat struktural. Perubahan ini dapat mencakup kependudukan dan ketenagakerjaan yang disebabkan oleh kemajuan dibidang ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dibidang ekonomi sendiri di masa yang akan datang diperkirakan akan terjadi pergeseran yang mulanya didominasi sektor pertanian beralih ke sektor non pertanian. Hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi pula pergeseran struktur sosial dibidang ketenagakerjaan, salah satunya adalah perubahan penyebaran tenaga kerja.

Pola penyebaran tenaga kerja yang diserap oleh lapangan pekerjaan sangat tergantung dari kualitas SDM nya. SDM yang berkualitas tinggi baik dari segi kesehatan, pendidikan, keahlian dan ketrampilan akan mempunyai tingkat produktivitas yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan SDM yang kurang berkualitas. Sebagai tolok ukur tingkat produktivitas kerja salah satunya dapat dilihat dari status pekerjaan. Distribusi pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan menggambarkan jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan. Status pekerjaan dibagi menjadi enam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar. Distribusi pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan dan tipe daerah disajikan pada Tabel 5.3.1.

**Tabel 5.3.1 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, Tahun 2008**

Status Pekerjaan (1)	Perkotaan (2)	Perdesaan (3)	Perkotaan+ Perdesaan (4)
Berusaha Sendiri	19,58	17,11	18,18
Berusaha dibantu Buruh	8,28	16,03	12,66
Tdk Tetap			
Berusaha dibantu Buruh	2,40	1,64	1,97
Tetap			
Buruh/Karyawan	54,46	20,87	35,48
Pekerja Bebas	6,61	14,58	11,11
Pekerja Tidak Dibayar	8,68	29,76	20,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Tabel 5.3.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan (35,48 persen), pekerja tidak dibayar (20,59 persen) dan berusaha sendiri (18,18 persen). Bila dilihat menurut tipe daerah, mayoritas pemuda di perkotaan bekerja sebagai buruh/karyawan (54,46 persen) dan sebesar 19,58 persen berusaha sendiri. Sedangkan di daerah perdesaan, hampir sepertiga pemuda yang bekerja, berstatus sebagai pekerja tidak dibayar (29,76 persen), sebagai buruh/karyawan sebesar 20,87 persen.

**Tabel 5.3.2 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2008**

Status Pekerjaan (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Laki-laki + Perempuan (4)
Berusaha Sendiri	19,90	15,30	18,18
Berusaha dibantu Buruh Tdk Tetap	14,36	9,81	12,66
Berusaha dibantu Buruh Tetap	2,66	0,82	1,97
Buruh/Karyawan	34,92	36,43	35,48
Pekerja Bebas	13,72	6,72	11,11
Pekerja Keluarga	14,45	30,93	20,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Persentase terbesar pekerja pemuda baik laki-laki maupun pemuda perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan. Pemuda laki-laki yang bekerja sebagai buruh/karyawan mencapai 34,92 persen dan pemuda perempuan mencapai 36,43 persen.

Yang menarik dari Tabel 5.3.2, persentase pekerja pemuda laki-laki berstatus pekerja bebas (13,72 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja pemuda perempuan (6,72 persen). Sebaliknya pekerja pemuda perempuan yang berstatus pekerja keluarga (30,93 persen) lebih tinggi dibandingkan pekerja pemuda laki-laki (14,45 persen).

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas seorang pekerja selain keahlian, pengalaman kerja dan juga faktor usia. Secara umum dalam kondisi yang sama dapat dikatakan bahwa pekerja yang berpendidikan lebih tinggi akan menghasilkan produktivitas kerja yang lebih baik dibanding dengan pekerja yang berpendidikan lebih rendah. Dengan kata lain, pendidikan yang ditamatkan oleh pemuda yang bekerja sangat menentukan status pekerjaannya disamping juga mutu dari pekerjaan yang dihasilkannya.

**Tabel 5.3.3 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008**

Status Pekerjaan (1)	Tdk/Blm Prnh skl (2)	Tdk Tamat SD (3)	SD/ sederajat (4)	SMP/ sederajat (5)	SM/ sederajat (6)	Akademi /PT (7)
Berusaha Sendiri	13,39	19,48	19,15	19,40	17,80	10,55
Dibantu Buruh Tdk Tetap	21,19	15,82	14,72	11,79	11,13	7,51
Dibantu Buruh Tetap	0,67	1,25	1,34	1,94	2,79	2,73
Buruh/Karyawan	8,20	18,25	21,87	32,33	50,12	74,42
Pekerja Bebas	11,90	17,88	17,47	10,95	4,73	0,37
Pekerja Tidak Dibayar	44,64	27,32	25,45	23,59	13,43	4,41
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

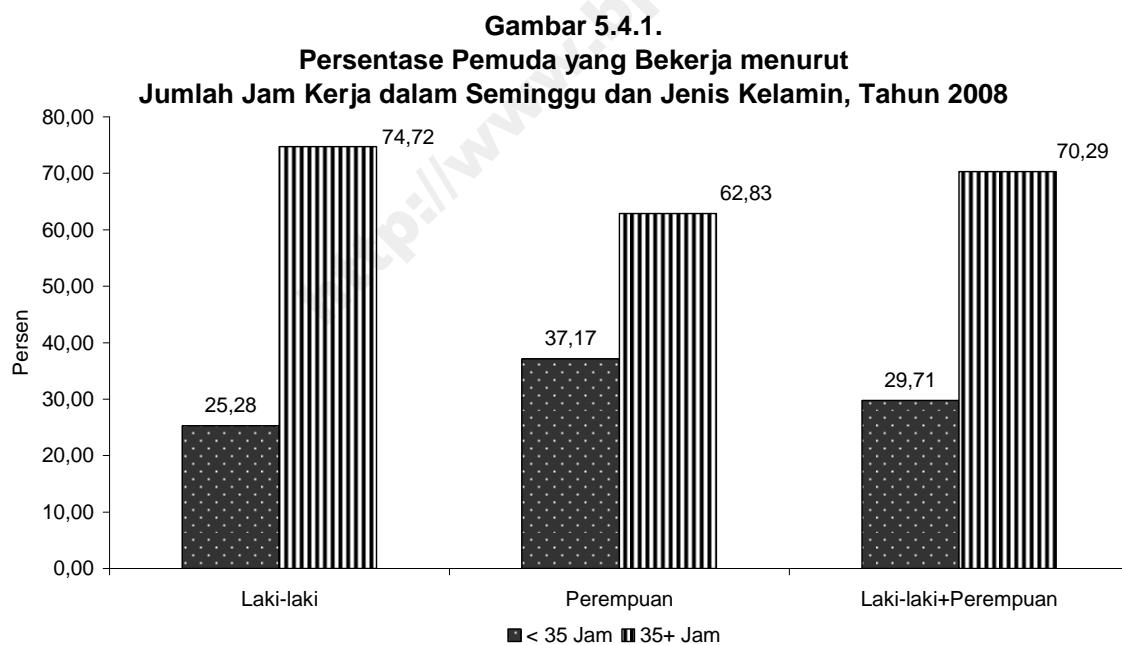
Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Berdasarkan Tabel 5.3.3 dapat dilihat pada pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan pemuda maka semakin besar pula persentase pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Merujuk hal tersebut, dapat dikatakan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan semakin banyak tenaga kerja yang terserap sebagai buruh/karyawan. Lebih khusus yang berpendidikan SM ke atas, dimana persentase pemuda yang terserap lebih dari 50 persen (SM 50,12 persen dan PT 74,42 persen). Hal sebaliknya terjadi pada pemuda yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka persentasenya semakin rendah. Kondisi ini dikarenakan pemuda yang berpendidikan rendah lebih mempunyai kesempatan cukup besar untuk dapat bekerja di beberapa jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan khusus.

#### 5.4. Pengangguran

Banyak cara yang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas seorang pekerja, salah satunya yang secara umum biasa digunakan adalah jam kerja. Ada beberapa batasan yang banyak dipakai oleh para analis dan pakar ketenagakerjaan untuk melihat produktif atau tidaknya pekerja, namun dalam bahasan ini dibatasi pada mereka yang bekerja < 35 jam selama seminggu dan mereka yang bekerja 35 jam atau lebih. Pemuda dengan jumlah jam kerja selama seminggu kurang dari 35 jam, dapat dikatakan termasuk dalam kategori setengah pengangguran.

Gambar 5.4.1 menyajikan distribusi pemuda yang bekerja menurut jumlah jam kerja dan jenis kelamin. Persentase pemuda yang bekerja normal atau lebih dari 35 jam per minggu tercatat sebanyak 70,29 persen, sedangkan mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau termasuk dalam kategori setengah pengangguran tercatat sebesar 29,71 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Bila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa produktivitas pekerja pemuda perempuan secara umum cenderung masih lebih rendah dibandingkan pekerja pemuda laki-laki. Kecenderungan ini dapat dilihat dari persentase pemuda perempuan yang termasuk kategori setengah

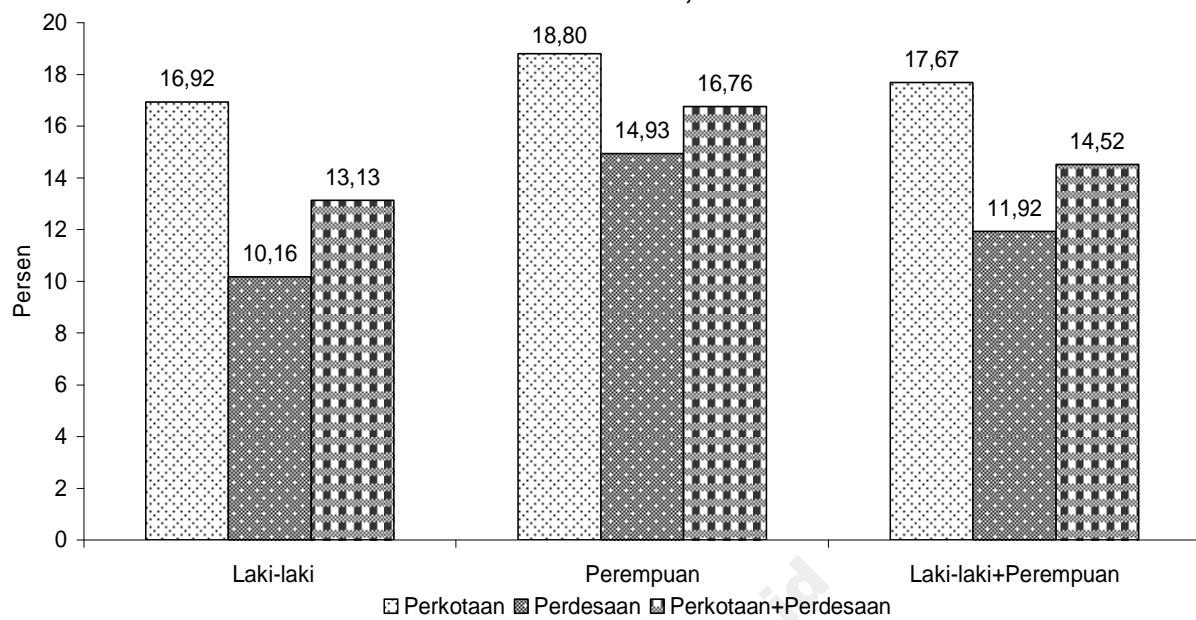
pengangguran atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu mencapai sebesar 37,17 persen. Persentase tersebut relatif cukup besar jika dibandingkan dengan pemuda laki-laki dengan status sama yang hanya sebesar 25,28 persen. Sebaliknya persentase pemuda perempuan yang bekerja normal (35 jam atau lebih) cenderung lebih kecil dibandingkan pemuda laki-laki (62,83 persen berbanding 74,72 persen). Fenomena tersebut mungkin terjadi karena pemuda perempuan lebih banyak yang bekerja pada pekerjaan-pekerjaan paruh waktu (*part time*) atau sebagai pekerja keluarga.

### 5.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indonesia cukup berhasil dalam menurunkan angka kelahiran dan kematian secara berkesinambungan. Namun hal ini justru berdampak pada pertumbuhan penduduk usia kerja yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Fakta ini menunjukkan bahwa ada tekanan kuat dalam sisi penyediaan tenaga kerja. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi secara nasional masih terlalu rendah untuk dapat menyediakan lapangan kerja baru secara memadai, hal inilah yang mengakibatkan munculnya masalah pengangguran. Banyak faktor yang dapat menjadi pemicu masalah pengangguran. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah keterbatasan kesempatan kerja dan kualitas dari tenaga kerja yang masih rendah. Keterbatasan kesempatan kerja dapat disebabkan oleh rendahnya investasi dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena tak mungkin mendapatkan pekerjaan termasuk putus asa, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja.

**Gambar 5.5.1.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2008**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Tingkat pengangguran terbuka pemuda di Indonesia pada tahun 2008 tercatat sebesar 14,52 persen (Gambar 5.5.1). Angka pengangguran terbuka antara lain disebabkan oleh kondisi perekonomian yang masih mengalami kelesuan sehingga permintaan tenaga kerja semakin berkurang, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia semakin meningkat. Bila dilihat menurut tipe daerah, angka pengangguran pemuda di daerah perkotaan (17,67 persen) cenderung lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan (11,92 persen). Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa tingkat pengangguran terbuka pemuda laki-laki (13,13 persen) lebih rendah dibandingkan dengan pemuda perempuan (16,76 persen). Keadaan ini berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

**Tabel 5.5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe daerah, Tahun 2008**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tdk/Blm Pernah sekolah	5,51	4,29	4,43
Tidak Tamat SD	11,49	6,61	7,75
SD/sederajat	12,83	8,77	9,86
SMP/sederajat	14,04	12,43	13,13
SM/sederajat	21,62	20,04	21,05
Akademi/PT	20,27	17,80	19,65
Total	17,67	11,92	14,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Tabel 5.5.1 menyajikan tingkat pengangguran terbuka pemuda menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tipe daerah. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemuda yang menganggur adalah mereka yang berpendidikan tamat SM (21,05 persen), kemudian tamat Akademi/PT (19,65 persen) dan tamat SMP (13,13 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa SDM tenaga kerja pemuda yang tersedia masih rendah sementara lowongan pekerjaan yang ada saat ini, seperti buruh/karyawan dibayar cenderung lebih banyak ditujukan bagi tenaga kerja yang berpendidikan tinggi.

Tabel 5.1.1 - 5.1.3 (Lampiran) menyajikan persentase pemuda menurut provinsi dan kegiatan utama selama seminggu yang lalu. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase tertinggi pemuda yang mencari pekerjaan terdapat pada Provinsi Banten (14,57 persen), Provinsi Jawa Barat (12,34 persen), Provinsi DKI Jakarta (12,17 persen) dan Provinsi Sulawesi Utara (11,29 persen). Sementara persentase pemuda pencari kerja terendah terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,23 persen), Provinsi Bali (4,50 persen), Sulawesi Barat (4,76 persen) dan Provinsi Papua (4,91 persen).

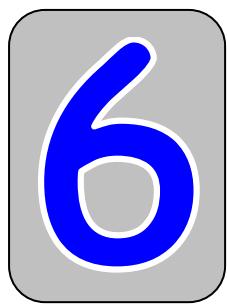
## 5.6. Upah

Persentase pemuda yang bekerja dan berusaha atau dibayar menurut provinsi dan pendapatan/upah/gaji bersih sebulan disajikan pada lampiran Tabel 5.8.1 s/d 5.8.3. Dari tabel tersebut terlihat bahwa 23,05 persen dari pemuda yang bekerja dan berusaha, memperoleh pendapatan/upah/gaji bersih sebulan antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 749.999,-. Persentase terbesar terdapat di Provinsi DI.Yogyakarta (33,28 persen), Banten (28,06 persen) dan Jawa Tengah (26,96 persen). Kondisi yang sama juga terlihat menurut daerah tempat tinggal, di daerah perkotaan sebesar 22,94 persen dari pemuda yang bekerja dan berusaha, memperoleh upah antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 749.999,-. Tiga provinsi dengan persentase terbesar yaitu Provinsi DI.Yogyakarta (34,58 persen), Banten (30,60 persen) dan Lampung (28,26 persen). Di daerah perdesaan, sebesar 23,22 persen pemuda yang bekerja dan berusaha memperoleh upah antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 749.999,-. Tiga provinsi dengan persentase terbesar yaitu Provinsi DI.Yogyakarta (29,80 persen), Provinsi Bengkulu (27,08 persen) dan Provinsi Bali (26,95 persen).

Jika dilihat menurut pendapatan/upah/gaji bersih yang tertinggi (Rp. 2.500.000,- keatas), tiga provinsi dengan persentase terbesar yaitu Provinsi Papua (12,11 persen), Kalimantan Timur (11,90 persen) dan Kepulauan Riau (9,31 persen). Berdasarkan kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa Provinsi Papua, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau masih merupakan daerah yang banyak diminati untuk didatangi dalam rangka mengadu nasib.

# *KESEHATAN PEMUDA*





## Kesehatan Pemuda

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan juga agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena salah satu aspek

penting yang dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk adalah kualitas fisik penduduk yang biasanya dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Peningkatan derajat kesehatan penduduk sangat ditunjang oleh tersedianya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus dilakukan agar sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan dapat beraktifitas secara optimal. Sejalan dengan itu, proses pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan dengan optimal pula. Departemen Kesehatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah di dalam bidang kesehatan memiliki peranan yang penting dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat. Hal tersebut di wujudkan melalui visi dan misi serta strategi utama Departemen Kesehatan yang terdiri dari :

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
3. Meningkatkan sistem pengamatan, pemantauan dan informasi kesehatan.
4. Meningkatkan pemberian kesehatan.

Visi, misi dan strategi utama Departemen Kesehatan tersebut membutuhkan upaya yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak yang terkait dengan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Usaha tersebut pun perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang handal dan kompeten dibidangnya. Apabila upaya itu dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, tujuan serta komitmen Indonesia untuk mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) pun dapat tercapai.

Sejalan dengan itu, generasi muda atau pemuda yang merupakan bagian terbesar dari jumlah keseluruhan penduduk mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan pembangunan. Selain sebagai generasi penerus yang akan memegang estafet kepemimpinan bangsa Indonesia, kaum muda yang ada pada usia produktif ini juga diakui memiliki semangat yang besar untuk senantiasa melakukan pembaharuan dan perbaikan. Oleh karena itu sudah sewajarnya kaum muda selalu diajak dan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah kesehatan bangsa ini dalam upaya peningkatan

kualitas pemuda khususnya dalam rangka menciptakan sumber daya pemuda yang handal dan trampil, aspek kualitas fisik khususnya peningkatan kualitas kesehatan pemuda juga harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Bukti konkret yang dapat diberikan generasi muda Indonesia dalam rangka menyukseskan program penanganan kesehatan masyarakat serta upaya mewujudkan MDGs adalah dengan turut berpartisipasi dalam program tersebut dan ikut berpola hidup sehat.

Kualitas kesehatan pemuda dan penduduk pada umumnya tercermin dari status atau derajat kesehatannya yang biasanya dilihat melalui berbagai indikator kesehatan seperti angka kesakitan (*morbidity rate*) dan rata-rata lama sakit. Angka kesakitan dan rata-rata lama sakit merupakan indikator kesehatan negatif yang artinya semakin tinggi angka kedua indikator tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin memburuk. Indikator lain yang juga biasa digunakan untuk melihat status atau derajat kesehatan adalah indikator perilaku hidup sehat antara lain pola makan, kebiasaan berobat, cara berobat, kebiasaan merokok dan kebiasaan melakukan kegiatan fisik atau olahraga.

Pada bab ini akan dibahas beberapa indikator kesehatan seperti keluhan kesehatan, angka kesakitan (*morbidity rate*), rata-rata lama sakit dan cara berobat dalam rangka memperoleh gambaran secara rinci mengenai kualitas atau derajat kesehatan pemuda. Selain itu dibahas pula partisipasi pemuda dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan kesehatan termasuk program Keluarga Berencana (KB).

### **6.1. Keluhan Kesehatan**

Pemuda merupakan penggerak pembangunan bangsa pada umumnya dan daerah pada khususnya. Namun syaratnya, pemuda yang dapat menjadi penggerak pembangunan adalah mereka yang berada dalam kondisi sehat lahir dan batin. Sebaliknya dalam kondisi yang tidak sehat dapat menjadi beban bagi pembangunan. Sehat yang dimaksud adalah bukan sekedar sehat jasmani saja, tetapi sehat secara mental, baik intrapersonal maupun sosial. Hal ini dimaksud agar pemuda dapat secara proaktif mengembangkan dirinya

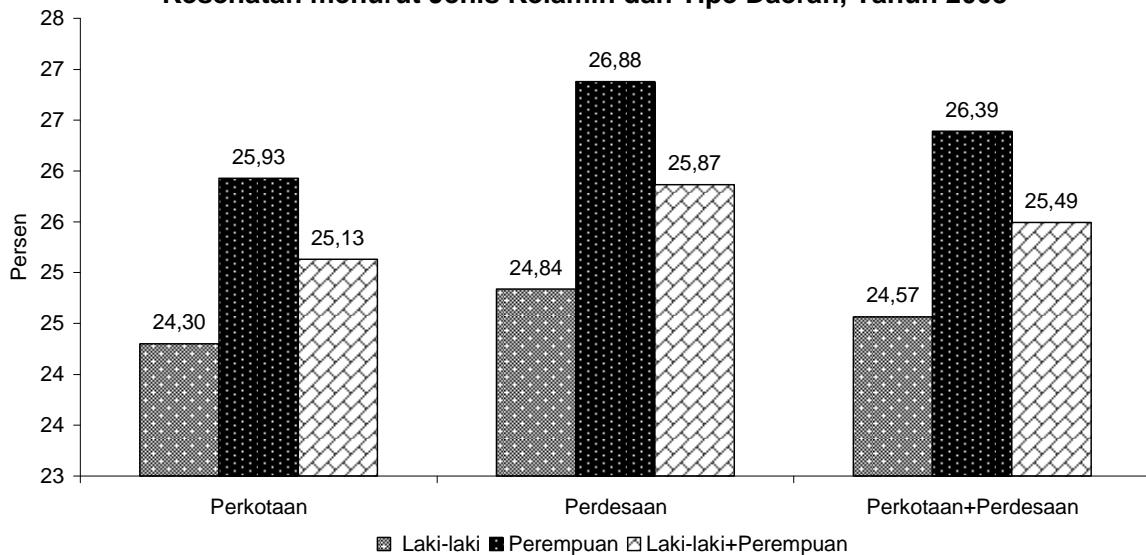
dalam mengelola berbagai sumber daya pembangunan untuk kepentingan negara. Dengan demikian, pemuda yang merupakan modal pembangunan adalah mereka yang sehat secara komprehensif.

Salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan penduduk secara kasar adalah keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau hal lain. Secara umum, jumlah kejadian keluhan kesehatan yang dialami penduduk pada dasarnya merupakan salah satu indikasi pola perilaku tidak sehat penduduk, antara lain adalah faktor kekurang-pedulian dalam menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh dan faktor keengganan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Gambar 6.1.1 menyajikan persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2008 tercatat sekitar 25,49 persen dari seluruh populasi pemuda secara keseluruhan mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Jika dibandingkan daerah perkotaan dan perdesaan, persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan di daerah perdesaan sebesar 25,87 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yang hanya sebesar 25,13 persen.

Secara umum nampak bahwa pemuda perempuan lebih banyak mengalami gangguan kesehatan dibanding pemuda laki-laki. Seperti yang disajikan pada Gambar 6.1.1 terlihat bahwa proporsi pemuda perempuan yang mengalami keluhan kesehatan (26,39 persen) lebih besar dari pemuda laki-laki (24,57 persen). Keluhan kesehatan yang lebih banyak dialami oleh pemuda perempuan juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan persentase pemuda perempuan dan laki-laki yang mengalami keluhan masing-masing adalah sebesar 25,93 persen dan 24,30 persen. Sedangkan untuk daerah perdesaan persentase pemuda perempuan yang mengeluh sebesar 26,88 persen dan laki-laki sebesar 24,84 persen.

**Gambar 6.1.1.**  
**Percentase Pemuda yang Mengalami Keluhan**  
**Kesehatan menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2008**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Persentase pemuda yang mengalami keluhan pada masing-masing provinsi nampak bervariasi dengan persentase antara 18,21 - 42,34 persen. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel Lampiran 6.1, persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan paling tinggi secara berturut-turut ditemukan di provinsi Gorontalo (42,34 persen), Nusa Tenggara Timur (40,39 persen) dan Sulawesi Tengah (33,12 persen). Sebaliknya pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dengan persentase terkecil berturut-turut ditemukan di provinsi Sumatera Utara (18,21 persen), Kalimantan Tengah (19,22 persen) dan Jambi (19,33 persen).

Seseorang dapat mempunyai keluhan/mengalami gangguan kesehatan lebih dari satu jenis keluhan kesehatan, baik dalam waktu yang bersamaan maupun waktu yang berbeda selama satu bulan terakhir. Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh para pemuda menurut tipe daerah dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 6.1.1.

**Tabel 6.1.1 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan, Tahun 2008**

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Panas	Batuk	Pilek	Asma/ napas sesak/ cepat	Diare/ Buang air	Sakit Kepala	Sakit Gigi	Lain- nya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Perkotaan</b>								
Laki-laki	7,92	11,59	11,79	0,75	1,02	4,14	1,49	7,47
Perempuan	7,11	10,71	11,67	1,02	1,03	5,78	1,67	8,68
Laki-laki + Perempuan	7,50	11,14	11,73	0,89	1,02	4,98	1,58	8,09
<b>Perdesaan</b>								
Laki-laki	8,98	11,18	11,31	0,98	1,38	5,47	2,15	7,66
Perempuan	8,39	10,67	11,36	1,09	1,42	7,31	2,60	8,78
Laki-laki + Perempuan	8,68	10,92	11,34	1,04	1,40	6,40	2,37	8,22
<b>Perkotaan+ Perdesaan</b>								
Laki-laki	8,44	11,39	11,56	0,86	1,19	4,80	1,81	7,56
Perempuan	7,73	10,69	11,52	1,06	1,22	6,52	2,12	8,73
Laki-laki + Perempuan	8,08	11,03	11,54	0,96	1,21	5,67	1,97	8,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

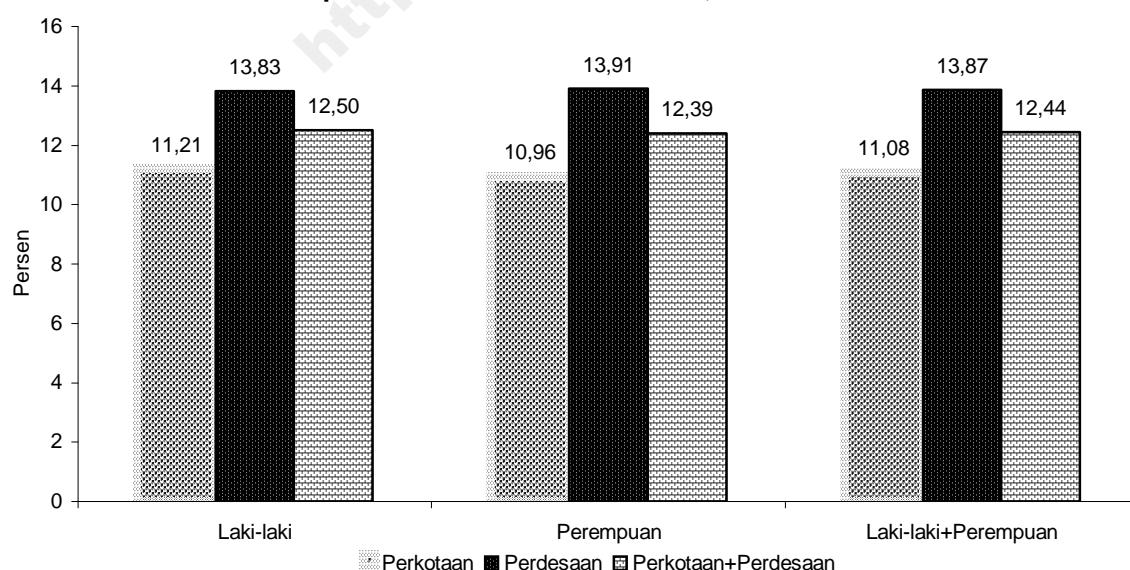
Dari berbagai macam jenis keluhan kesehatan yang dikeluhkan oleh pemuda, ternyata pilek, batuk dan keluhan lainnya merupakan keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh para pemuda dengan persentase masing-masing sebesar 11,54 persen, 11,03 persen dan 8,15 persen. Jenis keluhan kesehatan lainnya yang juga banyak dirasakan oleh para pemuda berturut-turut adalah panas (8,08 persen) dan sakit kepala berulang (5,67 persen). Berdasarkan Tabel 6.1.1 juga diketahui bahwa secara umum nampak bahwa persentase pemuda di daerah perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan untuk setiap jenis keluhan cenderung lebih tinggi dari rekan mereka di perkotaan, kecuali keluhan panas, batuk, pilek dan sesak napas terjadi keadaan yang sebaliknya.

## 6.2. Angka Kesakitan

Seseorang yang mengalami keluhan kesehatan dapat mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya. Apabila keluhan kesehatan yang dialami tersebut mengakibatkan terganggunya kegiatan yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat dikategorikan sakit dan proporsinya disebut sebagai angka kesakitan. Dengan kata lain, angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang sakit terhadap populasi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan secara keseluruhan.

Salah satu visi Indonesia Sehat 2010 adalah adanya perubahan cara pandang (*mindset*) dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yaitu dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Sejalan dengan itu, salah satu program pembangunan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah menurunkan angka kesakitan (RPJM 2004-2009). Gambar 6.2.1 menyajikan persentase pemuda yang menderita sakit selama satu bulan terakhir menurut jenis kelamin dan tipe daerah.

**Gambar 6.2.1. Persentase Pemuda yang Sakit menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Berdasarkan Gambar 6.2.1 tersebut terlihat bahwa dari pemuda yang mengalami keluhan kesehatan, sebanyak 12,44 persen diantaranya menderita sakit. Bila diperhatikan menurut jenis kelamin, angka kesakitan pemuda laki-laki sedikit lebih tinggi dari pemuda perempuan (12,50 persen berbanding 12,39 persen). Keadaan yang sama juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.

Angka kesakitan pemuda di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibanding pemuda yang tinggal di perkotaan (13,87 persen berbanding 11,08 persen). Hal ini terlihat secara keseluruhan baik untuk pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan. Pemuda laki-laki yang sakit di perdesaan tercatat sebesar 13,83 persen dan sebesar 11,21 persen untuk daerah perkotaan. Sementara persentase pemuda perempuan yang sakit di perdesaan tercatat sebesar 13,91 persen dan sebesar 10,96 persen untuk daerah perkotaan.

### 6.3. Lama Sakit

Jumlah hari sakit atau lama sakit menunjukkan intensitas atau derajat sakit yang dialami oleh seseorang. Lamanya sakit setiap orang berbeda antara satu dengan lainnya tergantung pada jenis penyakitnya. Semakin ringan sakit yang dialami maka semakin pendek jumlah hari sakitnya, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil Susenas 2008 diperoleh informasi bahwa lamanya sakit yang diderita oleh pemuda pada umumnya kurang dari satu minggu. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.3.1 dari keseluruhan jumlah pemuda yang mengalami sakit, sebanyak 53,80 persen menderita sakit selama 1-3 hari, kemudian sebanyak 33,97 persen menderita sakit selama 4-7 hari serta selebihnya adalah pemuda yang menderita sakit lebih dari 7 hari dengan persentase berkisar antara 3 persen hingga 6 persen.

**Tabel 6.3.1. Persentase Pemuda yang Sakit menurut Lamanya Sakit, dan Tipe Daerah, Tahun 2008**

Lamanya Sakit (dalam hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1 - 3	58,34	49,99	53,80
4 - 7	30,70	36,72	33,97
8 - 14	5,34	6,41	5,92
15 - 21	2,53	3,25	2,92
22 - 30	3,09	3,62	3,38
Jumlah	100,00	100,00	100,00

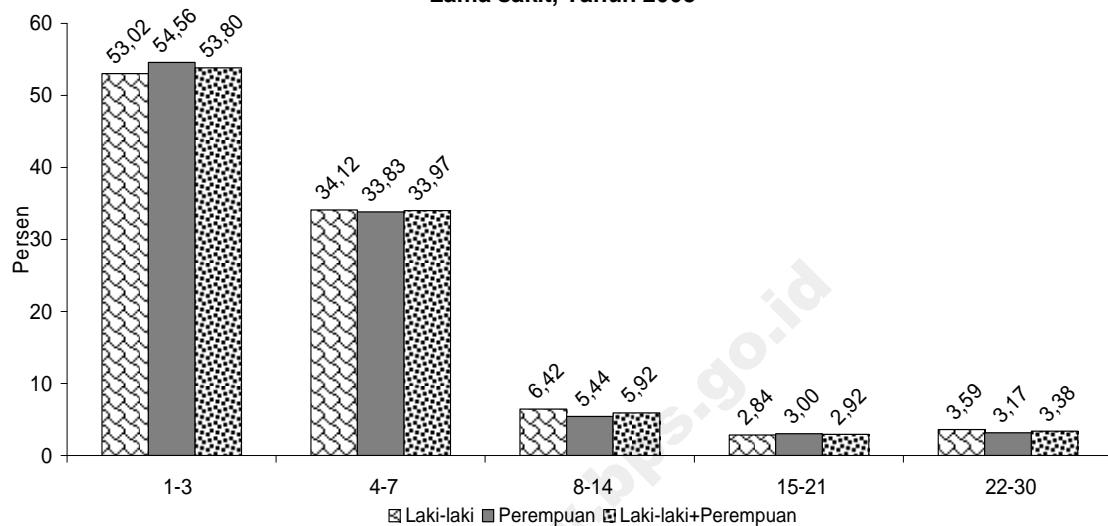
Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Gambaran lamanya jumlah hari menderita sakit pemuda yang sama juga berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah adanya suatu pola yang menunjukkan kecenderungan pemuda di perdesaan menderita sakit lebih lama dibandingkan mereka yang ada di perkotaan. Di lain pihak, pemuda yang menderita sakit kurang dari satu minggu lebih banyak dialami pemuda yang sakit di perkotaan daripada pemuda di perdesaan. Kemungkinan hal ini disebabkan karena pemuda di perkotaan lebih peduli dan lebih mengerti mengenai kesehatan dan didukung pula oleh ketersediaan sarana kesehatan yang lebih mudah dijumpai di daerah perkotaan.

Secara umum pemuda perempuan yang menderita sakit selama 1-3 hari persentasenya lebih tinggi dari pemuda laki-laki dengan lama sakit yang sama (54,56 persen berbanding 53,02 persen) seperti terlihat pada Gambar 6.3.1. Kondisi ini secara tidak langsung mencerminkan bahwa pemuda perempuan lebih rentan terhadap gangguan berbagai penyakit dibandingkan dengan pemuda laki-laki. Pada kelompok lama sakit 4 hari atau lebih, persentase pemuda laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding pemuda perempuan. Persentase pemuda laki-laki yang menderita sakit pada kelompok lama sakit 4 - 7 hari sebesar 34,12 persen dan yang lama sakitnya lebih dari 7 hari persentasenya berkisar 2,84 - 6,42 persen. Sementara untuk

pemuda perempuan pada kelompok lama sakit 4 - 7 hari sebesar 33,83 persen dan yang lama sakitnya lebih dari 7 hari persentasenya berkisar 3,00 - 5,44 persen.

**Gambar 6.3.1. Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Kelamin dan Lama sakit, Tahun 2008**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

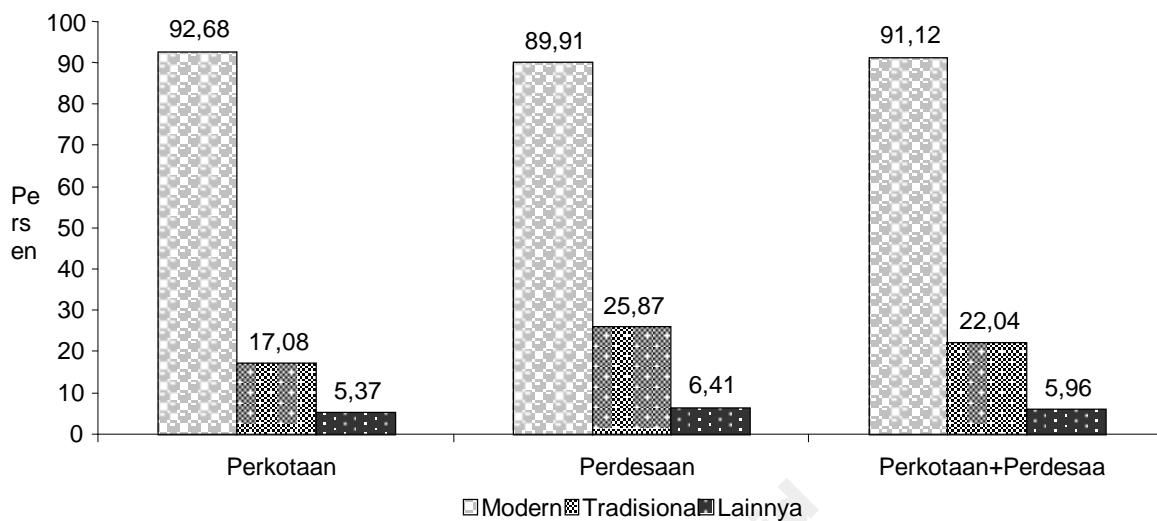
#### 6.4. Cara Berobat

Timbulnya perilaku sehat, didasari pada pemahaman arti pentingnya kesehatan. Sehingga tidak mengherankan kalau banyak kasus kesehatan yang mencuat belakangan ini, bisa jadi disebabkan masih rendahnya pendidikan perilaku kesehatan yang diberikan atau dimiliki oleh masyarakat dan tingginya biaya kesehatan yang ada. Sebuah komunitas bisa dikatakan sehat, apabila telah memenuhi tiga pilar derajat kesehatan. Ketiga pilar tersebut adalah perilaku sehat, lingkungan sehat serta pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Perilaku sehat merupakan pilar paling utama. Karena komponen tersebut ternyata sangat berpengaruh pada kedua pilar lainnya. Seperti seseorang dengan perilaku sehat, tentu akan menjaga lingkungannya agar tetap sehat. Di samping itu, perilaku sehat juga akan dapat mendorong seseorang untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada sebagai upaya untuk memelihara kesehatannya. Namun pada kenyataannya, di Indonesia hal tersebut justru seperti bertolak belakang. Arti pentingnya kesehatan sepertinya tidak menjadi perhatian utama. Akibatnya banyak kasus kesehatan merebak akhir-akhir ini. Semua ini tentunya berawal dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan di lingkungan sekitarnya, yang mengakibatkan akses ke pelayanan kesehatan rendah, ditambah lagi biaya berobat yang dianggap masih terlalu mahal.

Didasari oleh pemahaman tersebut maka cara berobat yang biasa dilakukan seseorang ketika mengalami sakit merupakan faktor yang turut menentukan apakah orang yang bersangkutan telah memiliki pola perilaku hidup sehat atau belum. Sesuai dengan pola perilaku hidup sehat, pada dasarnya bila seseorang menderita sakit maka akan ditindaklanjuti dengan tindakan pengobatan/berobat. Untuk mengobati penyakitnya, seseorang dapat pergi berobat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan maupun mencoba mengobati sendiri penyakitnya. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengobati sendiri suatu penyakit, antara lain dengan minum obat baik obat modern, tradisional maupun cara pengobatan lainnya.

**Gambar 6.4.1.**  
**Percentase Pemuda yang Sakit dan Mengobati Sendiri Sakitnya**  
**menurut Jenis Pengobatan dan Tipe Daerah, Tahun 2008**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Pemuda yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya juga melakukan suatu upaya pengobatan. Pemuda yang mengobati sendiri sakitnya cenderung memilih pengobatan secara modern. Hal ini ditandai dengan lebih tingginya persentase pemuda yang mengobati sendiri sakitnya dengan pengobatan modern dibanding cara tradisional atau lainnya (modern 91,12 persen berbanding tradisional 22,04 persen dan lainnya 5,96 persen) seperti yang disajikan pada Gambar 6.4.1. Gambar tersebut juga menunjukkan preferensi pemuda dalam memilih jenis obat yang dibedakan menurut tipe daerah. Secara umum nampak bahwa obat-obatan tradisional lebih banyak digunakan oleh para pemuda di perdesaan (25,87 persen) dibanding pemuda di daerah perkotaan (17,08 persen), sebaliknya jenis obat modern lebih banyak digunakan oleh para pemuda di perkotaan (92,68 persen) dibandingkan dengan pemuda di perdesaan (89,91 persen).

Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa baik pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan mempunyai pola yang relatif sama dalam memilih jenis obat yang digunakan untuk mengatasi keluhan kesehatan

yang dialaminya. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.4.1, keduanya cenderung lebih banyak memilih obat modern dibandingkan obat tradisional atau lainnya. Pola preferensi ini relatif sama untuk daerah perkotaan maupun perdesaan.

**Tabel 6.4.1 Persentase Pemuda yang Mengobati Sendiri menurut Jenis Obat, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008**

Jenis Obat yang Digunakan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Modern	92,69	93,51	93,11	90,17	91,28	90,73	91,42	92,39	91,91
Tradisional	14,99	13,61	14,29	22,94	21,38	22,15	18,98	17,52	18,24
Lainnya	4,94	4,23	4,58	5,98	5,66	5,82	5,46	4,95	5,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Selain mengobati sendiri, seseorang juga dapat mengobati sakitnya dengan berobat jalan yaitu mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Umumnya penggunaan sarana berobat ini berkaitan dengan biaya dan ketersediaan pelayanan. Tabel 6.4.2 menunjukkan fasilitas pelayanan kesehatan yang dipilih oleh pemuda dalam rangka mengobati sakitnya. Tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang paling banyak dikunjungi oleh pemuda yang berobat jalan pada tahun 2008 ini secara berturut-turut adalah puskesmas (33,90 persen), kemudian praktek dokter (31,84 persen) dan nakes atau tenaga kesehatan (27,58 persen). Pola yang sama terjadi baik pada pemuda laki-laki maupun perempuan.

Meskipun ketiga jenis tempat berobat tersebut menjadi tempat pelayanan favorit bagi pemuda untuk mengobati sakitnya, tetapi bila diperhatikan besaran proporsi pemuda yang berobat jalan maka terlihat adanya perbedaan pola antara pemuda daerah perkotaan dengan perdesaan dalam memilih jenis tempat untuk berobat jalan.

**Tabel 6.4.2 Persentase Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin, Tahun 2008**

Tempat Berobat	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Rumah Sakit	11,54	13,66	12,66	6,56	6,51	6,54	8,99	10,05	9,55
Praktek Dokter	45,36	42,02	43,59	21,44	19,65	20,51	33,08	30,73	31,84
Puskesmas	26,62	29,45	28,12	37,98	40,88	39,49	32,46	35,21	33,90
Praktek Nakes	17,76	19,16	18,50	36,42	36,25	36,33	27,35	27,78	27,58
Praktek Batra	2,65	1,78	2,19	2,71	2,43	2,57	2,68	2,11	2,38
Dukun Bersalin	-	0,42	0,22	-	0,75	0,39	-	0,58	0,.31
Lainnya	2,59	1,93	2,24	3,19	3,15	3,17	2,90	2,55	2,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Seperti yang disajikan pada Tabel 6.4.2, terlihat bahwa pemuda di perkotaan cenderung memilih berobat jalan ke tempat praktek dokter dengan persentase mencapai 43,59 persen sedangkan di perdesaan hanya 20,51 persen pemuda yang berobat ke dokter. Perbedaan juga tampak pada tempat berobat jalan ke rumah sakit, dimana lebih banyak diakses oleh pemuda di perkotaan yaitu sebesar 12,66 persen, sementara di perdesaan hanya 6,54 persen. Kondisi seperti ini kemungkinan terkait dengan lebih banyaknya tempat praktek dokter maupun rumah sakit di daerah perkotaan sehingga bagi pemuda yang berdomisili di perdesaan agak sulit menjangkau fasilitas tempat berobat tersebut. Sedangkan jenis tempat untuk berobat jalan yang paling banyak diakses oleh pemuda perdesaan adalah puskesmas (39,49 persen) dan praktek nakes (36,33 persen), sedangkan di perkotaan hanya sebesar 28,12 persen (puskesmas) dan 18,50 persen (praktek nakes).

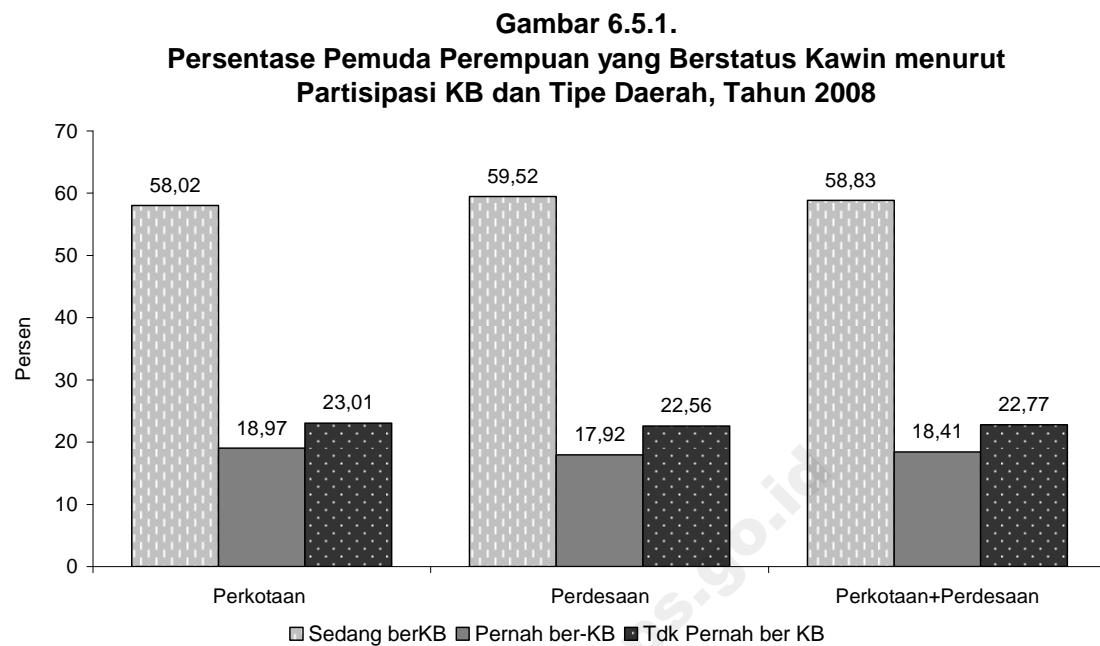
## 6.5. Partisipasi Pemuda dalam Program Keluarga Berencana (KB)

Peningkatan derajat kesehatan mempunyai kaitan yang erat dengan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula beban pemerintah guna memfasilitasi faktor kesehatan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang telah melewati batas ideal, selayaknya perlu lebih dicermati karena dapat berakibat meledaknya jumlah penduduk muda. Keadaan tersebut tentunya berakibat meningkatnya beban untuk pemenuhan hak-hak penduduk muda, yang berarti juga penambahan beban pemerintah dalam hak layanan dasar, termasuk kesehatan di dalamnya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi bila dikomparasikan dengan keadaan pelayanan kesehatan yang ada saat ini, jelas akan menjadi suatu masalah yang tidak kecil dikemudian hari. Indonesia senantiasa berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, karena dalam jangka panjang masalah beban akan dapat dikurangi, termasuk beban dalam pemenuhan berbagai hak publik, seperti kesehatan terutama untuk usia muda, hingga pada akhirnya berdampak pada menurunnya rasio ketergantungan pada layanan kesehatan masyarakat, karena orang dengan usia produktif diperkirakan akan mampu menutupi kebutuhannya sendiri.

Dalam usaha mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah sejak akhir tahun 60-an telah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Salah satu tujuan dari program KB ini adalah membentuk Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Struktur umur pemuda yang secara keseluruhan memiliki usia yang tergolong sebagai usia produktif atau subur menjadi sasaran target yang ideal dalam upaya membatasi jumlah kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB). Sejalan dengan itu, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan program Keluarga Berencana (KB) pada dasarnya merupakan faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan program tersebut.

Berdasarkan hasil Susenas 2008, diketahui bahwa lebih dari separuh (58,83 persen) pemuda perempuan yang berstatus kawin sedang mengikuti program KB, kemudian sebanyak 18,41 persen pernah ikut KB tetapi sekarang tidak ikut lagi dan sisanya 22,77 persen sama sekali tidak pernah mengikuti

program KB (Gambar 6.5.1). Bila dilihat menurut tipe daerah, partisipasi para pemuda dalam program KB nampak mempunyai pola yang relatif tidak berbeda, baik untuk daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Dilihat perkembangannya pada tahun 2004, 2006 dan 2008 diperoleh gambaran bahwa pemuda perempuan berstatus kawin yang menjadi peserta program KB persentasenya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2004, pemuda perempuan berstatus kawin yang sedang mengikuti program KB tercatat sebesar 58,14 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan tahun 2006 menjadi 60,67 persen kemudian turun menjadi 58,83 persen tahun 2008. Keadaan berbeda terjadi pada pemuda perempuan yang pernah ikut KB tetapi sekarang tidak ikut lagi, persentasenya cenderung meningkat. 12,41 persen pada tahun 2004 meningkat menjadi 17,23 persen tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 18,41 persen tahun 2008 (Tabel 6.5.1).

**Tabel 6.5.1. Persentase Pemuda Pemuda Perempuan Berstatus Kawin menurut Partisipasi KB dan Tipe Daerah, Tahun 2004-2008**

Partisipasi ber KB	2004			2006			2008		
	Per-kotaan	Per-desa-an	Per-kotaan + Per-desaan	Per-kotaan	Per-desa-an	Per-kotaan + Per-desaan	Per-kotaan	Per-desa-an	Per-kotaan + Per-desaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Sedang</b>	58,80	57,67	58,14	60,72	60,63	60,67	58,02	59,52	58,83
<b>Pernah</b>	12,53	12,32	12,41	17,88	16,77	17,23	18,97	17,92	18,41
<b>Tidak Pernah</b>	28,67	30,01	29,48	21,40	22,60	22,10	23,01	22,56	22,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2004-2008

Persentase pemuda perempuan berstatus kawin yang tidak pernah ikut program KB sama sekali, persentasenya sebesar 29,48 persen tahun 2004, turun menjadi 22,10 persen tahun 2006 dan tahun 2008 persentasenya naik menjadi 22,77 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, partisipasi pemuda perempuan berstatus kawin dalam program KB, nampak mempunyai pola yang serupa.

Tabel 6.5.2 menyajikan persentase pemuda peserta program KB menurut jenis alat/cara KB yang digunakan oleh pemuda perempuan yang berstatus kawin menurut tipe daerah. Dilihat menurut berbagai jenis alat/cara KB yang ada, nampak bahwa alat KB suntik merupakan jenis alat KB yang paling banyak digunakan oleh pemuda berstatus kawin yang ikut dalam program KB yaitu sebesar 65,86 persen, 22,92 persen memilih menggunakan pil KB, sisanya adalah mereka yang menggunakan AKDR/IUD, susuk dan lainnya.

**Tabel 6.5.2 Persentase Pemuda Perempuan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Alat/ Cara KB yang Digunakan dan Tipe Daerah, Tahun 2008**

Alat/Cara KB yang Digunakan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
MOW/ tubektomi	1,27	1,04	1,14
MOP/ vasektomi	0,47	0,56	0,52
AKDR/ IUD	6,32	2,43	4,20
Suntik KB	63,68	67,70	65,86
Susuk/ Norplant/ Implant	2,78	4,78	3,87
Pil KB	23,55	22,40	22,92
Kondom / Karet KB	0,95	0,23	0,56
Intravag	0,08	0,05	0,06
Alat/ Cara tradisional	0,91	0,83	0,87
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Apabila diperinci menurut tipe daerah, alat KB suntik dan pil juga merupakan alat KB yang paling banyak digunakan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sedangkan untuk alat KB lainnya, seperti AKDR, MOW dan kondom proporsinya lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan. Pada daerah perdesaan, alat/cara KB yang banyak digunakan pemuda perempuan setelah suntik dan pil KB adalah susuk KB (4,78 persen) dimana persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan (2,78 persen).

## 6.6. Umur Perkawinan Pertama

Dilihat dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar merupakan sebuah potensi yang sangat bagus untuk tenaga kerja bilamana didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang juga berkualitas tinggi. Akan tetapi jika SDMnya berkualitas rendah, potensi yang bagus tersebut justru akan berbalik menjadi beban dalam proses pembangunan. Saat ini perkembangan jumlah penduduk yang cukup pesat menjadi dasar pemikiran guna

meningkatkan upaya memperlambat laju pertumbuhan jumlah penduduk. Salah satu upaya yang sampai saat ini dilakukan guna memperlambat laju pertumbuhan penduduk adalah dengan cara mencermati berbagai faktor yang melatarbelakangi tingginya laju pertumbuhan penduduk, salah satunya yaitu tingkat fertilitas.

Tingkat fertilitas tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan program Keluarga Berencana tetapi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, salah satu diantaranya adalah umur pada saat perkawinan pertama. Semakin muda usia perkawinan pertama mengakibatkan masa kesuburan yang semakin panjang sehingga akan meningkatkan peluang mempunyai banyak anak dan sebaliknya. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih sangat muda, selain menyalahi ketentuan yang ditetapkan dalam UU Perkawinan, secara mental maupun fisik juga berpengaruh pada perkembangan ibu dan anaknya. Selain itu juga dapat meningkatkan resiko kematian yang akan dialami akibat kehamilan/kelahiran usia muda.

Tabel 6.6.1 menyajikan persentase pemuda perempuan yang pernah kawin menurut umur perkawinan pertama dan tipe daerah. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum mayoritas pemuda perempuan menikah pada kelompok umur 19-24 tahun dengan persentase mencapai 48,67 persen. Persentase pemuda perempuan yang menikah pada usia 19-24 tahun di daerah perkotaan mencapai sebesar 55,59 persen, sedangkan di daerah perdesaan hanya sebesar 42,71 persen. Sementara itu, pemuda perempuan yang menikah pada usia yang relatif muda (17-18 tahun) juga cukup banyak yaitu sebesar 23,66 persen. Bahkan ada pula pemuda perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada saat umur 16 tahun sebesar 8,11 persen dan 16 tahun kebawah sebesar 8,48 persen.

**Tabel 6.6.1 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Saat Perkawinan Pertama, Tahun 2008**

Tipe Daerah	Umur Saat Perkawinan Pertama						Jumlah
	< 16	16	17 - 18	19 - 24	25 - 35		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Perkotaan	5,04	5,09	18,08	55,59	16,19	100,00	
Perdesaan	11,43	10,71	28,47	42,71	6,67	100,00	
Perkotaan + Perdesaan	8,48	8,11	23,66	48,67	11,08	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Pola perkawinan yang berbeda pada kelompok umur berdasarkan daerah tempat tinggal tampak terlihat. Persentase perkawinan pertama perempuan yang dilakukan pada saat usia yang sangat muda lebih tinggi di daerah perdesaan (11,43 persen) dibandingkan perkotaan (5,04 persen).

*LAPORAN STUDI  
MENDALAM PEMUDA*

*http://www.s2s.go.id*



## LAPORAN STUDI MENDALAM PEMUDA

Daya saing suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Sebagai bagian terbesar dari jumlah penduduk Indonesia dan sebagai potensi strategis, kualitas SDM pemuda menjadi sangat berarti. Dalam upaya membantu menyediakan data dan informasi tentang keadaan sosial ekonomi pemuda maka secara berkala Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan publikasi "Statistik Pemuda". Untuk mempertajam analisis, publikasi ini dilengkapi dengan hasil studi mendalam mengenai pemuda yang dilakukan pada dua tahun terakhir (tahun 2008 dan tahun 2009).

Secara umum maksud dan tujuan studi adalah ingin melihat gambaran lebih rinci mengenai keadaan sosial ekonomi pemuda dilihat dari berbagai aspek, antara lain demografis, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Adapun secara khusus tujuan studi pemuda adalah:

1. Mendapatkan informasi yang dapat menjawab beberapa fenomena dari data yang dihasilkan Susenas.
2. Melengkapi informasi data Susenas.

## METODOLOGI

Pelaksanaan studi mendalam pemuda dilakukan di tahun 2008 dan tahun 2009. Studi pertama tahun 2008 dilakukan di 4 (empat) provinsi, yaitu Sumatera Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan dan yang kedua tahun 2009 dilakukan di Provinsi Yogyakarta, Bangka Belitung dan Provinsi Riau.

Metode yang dilakukan dengan mendatangi rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga berusia 15-35 tahun atau kelompok usia pemuda dengan sampel antara 4 sampai dengan 8 rumah tangga. Metode pemilihan dilakukan secara purposive dengan berbagai kriteria diantaranya pemuda yang bekerja (pekerja keluarga, pekerja wira usaha), pemuda yang tidak bekerja dilihat dari jenjang pendidikan (SM keatas dan SM kebawah)

Disisi lain dalam upaya melihat program kepedulian pemerintah akan pemberdayaan pemuda, juga dilakukan kunjungan ke dinas pendidikan Nasional seperti yang dilakukan di Provinsi Riau.

## HASIL STUDI

1. Faktor yang melatarbelakangi mobilitas pemuda untuk merantau diantaranya karena adat/budaya atau tradisi daerah dan tersedianya lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Faktor adat sangat terlihat pada budaya minang, hampir di seluruh pelosok tanah air kita temukan pemuda minang . Pemuda Bima juga terkenal sebagai perantau tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuannya. Perempuan pemuda Bima yang merantau utamanya sebagai pedagang. Berbeda halnya dengan di Desa Cempaka Banjar Baru (Kalsel) dan Tangerang (Banten), pemuda di Desa Cempaka cenderung tidak ada yang merantau karena di daerah mereka tersedia lapangan kerja yang dapat dengan cepat menyerap tenaga kerja tanpa memerlukan spesifikasi pendidikan atau keahlian tertentu. Sedangkan untuk daerah Tangerang yang merupakan wilayah kantong dari DKI Jakarta serta merupakan kawasan industri (pabrik) banyak terdapat

lapangan kerja yang tersedia baik sektor formal maupun informal. Konsekuensinya banyak pendatang dari daerah lain yang bermukim di wilayah ini.

2. Pemuda yang berpendidikan rendah (pendidikan menengah ke bawah) diantaranya beralasan karena faktor biaya dan pendidikan orang tua yang rendah. Ketika anak terbawa oleh lingkungan untuk tidak melanjutkan sekolah/berhenti sekolah, orang tua tidak memberi motivasi untuk tetap bersekolah dikarena pendidikan orang tua yang rendah.
3. Masih cukup banyak ditemukan pemuda yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar seperti yang terdapat di Desa Cempaka Banjar Baru dan Kota Mataram, sedangkan untuk daerah Air Tawar dan Tangerang paling banyak adalah tamat SM sederajat.
4. Masih ditemukan pemuda yang buta huruf (Kota Mataram). Pemuda laki-laki yang buta huruf tersebut sebenarnya pernah menikmati pendidikan namun putus pada kelas III atau IV SD dikarenakan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya. Pemuda tersebut tidak mengikuti program pemberantasan buta aksara (KF) walaupun di dekat tempat tinggalnya ada kursus baca tulis dikarenakan malu, peserta KF umumnya perempuan katanya.
5. Partisipasi pemuda dalam kursus masih sangat rendah. Hal ini disebabkan lokasi tempat tinggal yang jauh di pinggir kota (Cempaka), lembaga-lembaga kursus yang didirikan hanya sedikit sekali (masih terbatas) dan ada pula yang menyatakan jenis kursus yang tersedia tidak sesuai dengan minat sehingga tingkat partisipasi mereka dalam kursus masih rendah. Faktor biaya juga mempengaruhi rendahnya partisipasi dalam kursus (Bangka Belitung dan Yogyakarta). Umumnya responden mengetahui manfaat kursus yang diantaranya meningkatkan ketrampilan/skill untuk dapat mandiri dan sebagai nilai tambah dalam persaingan pangsa pasar kerja, namun faktor biaya membuat mereka

tidak ikut berpartisipasi dalam kursus. Salah satu program pendidikan Non formal oleh Departemen Pendidikan Nasional adalah menyelenggarakan program life skill (Prov. Riau) yang biayanya ditanggung oleh pemerintah termasuk pemberian modal awal membuka usaha kerja, namun jumlah masih sangat terbatas.

6. Di Kota Mataram responden yang ditemui adalah pemuda yang berpendidikan rata-rata SM membekali dirinya dengan mengikuti kursus yang mudah mendapatkan kerja, diantaranya jenis kursus yang diikuti adalah kursus perbengkelan atau kursus *Handphone*.
7. Kondisi Kesehatan. Para pemuda yang terkena sampel kondisi kesehatannya sangat baik. Keluhan penyakit yang sering diderita responden adalah batuk, pusing, sakit maag, dan sakit kepala. Hampir keseluruhan pemuda yang ditemui, umumnya adalah perokok dengan mengkonsumsi setengah sampai sebungkus per hari dan seringnya merokok di mana saja. Alasan merokok ada menyatakan untuk menghilangkan rasa jemu dalam bekerja. Meskipun demikian, pengetahuan mereka terhadap zat NAPZA/ PSIKOTROPIKA cukup baik. Mereka tahu bahwa penggunaan zat tersebut sangat berbahaya bagi kondisi kesehatan. Mereka mengutuk keberadaan zat tersebut di lingkungannya.
8. Ketenagakerjaan. Pemahaman sebagian pemuda tentang pekerjaan adalah usaha yang mendapatkan/memperoleh penghasilan, artinya tidak hanya sebagai buruh tetapi juga sebagai wira usaha, tetapi sebagian lagi yang beranggapan bahwa menurut mereka bekerja mendapatkan gaji/upah. Sementara itu, ketika tanya mengenai wirausaha/kewirausahaan, pandangan mereka masih sangat dangkal. Banyak pendapat yang mereka lontarkan, antara lain tidak mengerti, tidak punya kemampuan (keahlian), tidak berani menanggung resiko serta tidak punya modal. Para pemuda sebagian besar menghabiskan waktunya dengan bekerja selama 8-10 jam per hari. Ada yang berprofesi sebagai penjahit, tukang ojek, teknisi mesin maupun pedagang (Air Tawar), petani dan buruh

karet, buruh angkut pasir, pendulang intan (Cempaka), Buruh pabrik dan pekerja bebas non pertanian (Tangerang ) sedangkan untuk daerah Kota Mataram salah satu responden pemuda perempuan yang ditemui yang berpendidikan rendah dari rumah tangga miskin, lebih memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

9. Di Kota Mataram, pekerja keluarga lebih banyak perempuan. Alasan mereka memilih sebagai pekerja keluarga adalah membantu pendapatan kepala rumah tangga atau famili dekat seperti mencari rumput untuk makanan kuda, suaminya sebagai penarik Delman. Ada juga perempuan putus SMP kelas I yang membantu di warung milik bibinya. Laki-laki sebagai pekerja keluarga membantu usaha pembuatan krupuk milik orang tuanya, inipun karena pemuda tersebut memiliki kecacatan pada matanya. Sedangkan di Desa Cempaka ditemui responden yang bekerja sebagai pekerja keluarga merupakan pekerjaan tambahannya. Pekerjaan utamanya sendiri adalah buruh bangunan dan ada yang pedagang keliling (sayur, somay), pekerjaan yang mereka lakukan adalah menyadap karet di kebun orang tua/mertuannya. Pekerjaan ini harus mereka lakukan pagi-pagi sekali (4.30 - 7.00 pagi) karena jika dilakukan agak siang getah karet yang dihasilkan lebih sedikit.

Menurut mereka, jenis pekerjaan yang mereka tekuni umumnya sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Menghindari menganggur dan lumayan bisa mencari makan menjadi alasan utama mereka di dalam pemilihan lapangan pekerjaan, apalagi ditambah dengan kesadaran terhadap kemampuan dan keterampilan kerja mereka yang minim.

Dilatar belakangi dengan jenis pekerjaan yang bergerak di sektor informal ini, tidak mengherankan apabila mereka sering mengalami kesulitan finansial di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, cara terbanyak yang mereka tempuh umumnya adalah dengan menyesuaikan pengeluaran dan meminjam uang/barang kepada teman atau tetangganya.

12. Berdasarkan hasil kunjungan ke Dinas Pendidikan Kota Pekan Baru bahwa salah satu kegiatan pendidikan Non Formal adalah Life skill (kursus) yang sasarannya adalah pemuda (penduduk usia 15-35 tahun). Life skill merupakan bagian kegiatan dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dinas Pendidikan di Provinsi Riau pada tahun 2008 menyelenggarakan kegiatan kursus dengan jangka waktu 3 bulan atau 2 bulan seperti menjahit, rias pengantin. Mereka yang mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat mandiri. Karenanya mereka yang ikut dan menyelesaikan kursus ini mendapat sertifikat atau surat tanda selesai belajar.

Pada tahun 2008 di Provinsi Riau ada 35 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 5 orang yang berusia 15-35 tahun, diutamakan mereka yang putus sekolah dan tidak mampu. Jenis kursus yang dilaksanakan lebih banyak pada jenis kursus menjahit dan rias pengantin. Agar mereka bisa berusaha dan mandiri, sebagai bagian dari program ini juga ada bantuan modal usaha. Adapun besar bantuan per orang sekitar 2 juta. Bantuan sebesar itu mencakup biaya pelatihan, gaji tutor, ujian dan sisanya untuk modal usaha.



## ***GLOSSARY*** **(Singkatan)**

APK	Angka Partisipasi Kasar
APS	Angka Partisipasi Sekolah
IPM	Indek Pembangunan Manusia
KB	Keluarga Berencana
<i>MSF</i>	<i>Master Sampling Frame</i>
<i>MDGs</i>	<i>Millenium Development Goals</i>
P4B	Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan
PODES	Potensi Desa
PPS	Probability Proportional to Size
PT	Perguruan Tinggi
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Sensus Ekonomi
SLS	Satuan Lingkungan Setempat
SM	Sekolah Menengah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

## DAFTAR PUSTAKA

Dra. Titin Supenti, MA. *Data dan Analisis Kondisi Tenaga Kerja Pemuda*, Jakarta, 2007

Putri Wahyuningtyas, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia Vs MDGs*, Media Indonesia, Jakarta, 14 November 2007

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Majalah Gerbang Pemuda, Jakarta, 2006

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara Presiden Republik Indonesia

Djauzak Ahmad, *Kemiskinan dan Kesempatan Memperoleh Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 05 Agustus 2004

Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2005 - 2009, Jakarta. Bappenas

BADAN PUSAT STATISTIK, *Laporan Survei Buta Aksara*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2006

BADAN PUSAT STATISTIK, *Laporan Pendidikan Anak Usia Dini*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2006

BADAN PUSAT STATISTIK, *Buku I Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006, Pedoman Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota*, Jakarta, 2006

BADAN PUSAT STATISTIK, *Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2005*, Jakarta, 2005

BADAN PUSAT STATISTIK, *Statistik Pendidikan tahun 2006*, Jakarta, 2006

BADAN PUSAT STATISTIK, *Statistik Penduduk Pemuda Indonesia 2004*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2004.

BADAN PUSAT STATISTIK, *Statistik Penduduk Pemuda Indonesia 2005*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2005.

BADAN PUSAT STATISTIK, “*Statistik Penduduk Pemuda Indonesia 2006*”, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2006.

BADAN PUSAT STATISTIK, “*Statistik Penduduk Pemuda Indonesia 2007*”, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2007.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

# *TABEL LAMPIRAN*

**Tabel 3.1 Jumlah Pemuda menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008**  
(Dalam Ribuan)

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NAD	221,26	242,63	463,89	539,79	569,24	1109,03	761,05	811,87	1.572,91
Sumatera Utara	1098,79	1103,65	2202,43	1136,34	1152,88	2289,22	2235,13	2256,52	4491,65
Sumatera Barat	260,98	290,56	551,55	457,22	473,59	930,82	718,21	764,16	1.482,36
Riau	523,06	536,41	1059,47	507,43	501,07	1008,50	1030,49	1037,48	2.067,96
Jambi	170,74	174,64	345,39	357,66	352,77	710,43	528,41	527,41	1.055,82
Sumatera Selatan	506,44	526,05	1032,48	823,37	795,88	1619,25	1329,81	1321,93	2.651,73
Bengkulu	107,75	120,15	227,90	211,49	199,99	411,48	319,24	320,14	639,38
Lampung	378,15	391,78	769,93	1020,32	914,33	1934,65	1398,46	1306,11	2.704,58
Bangka Belitung	88,93	85,58	174,51	105,87	97,94	203,80	194,80	183,51	378,31
Kepulauan Riau	156,16	203,55	359,71	128,42	135,45	263,87	284,58	339,00	623,58
DKI. Jakarta	1806,91	1943,41	3750,33				1806,91	1943,41	3.750,33
Jawa Barat	4350,46	4436,30	8786,76	2703,84	2663,10	5366,94	7054,30	7099,39	14.153,69
Jawa Tengah	2560,38	2630,67	5191,05	2370,95	2454,32	4825,26	4931,33	5084,98	10.016,31
DI. Yogyakarta	408,87	382,48	791,35	154,74	159,52	314,26	563,61	542,00	1.105,61
Jawa Timur	2816,73	3001,77	5818,50	2645,23	2827,21	5472,43	5461,95	5828,98	11.290,93
Banten	1224,61	1295,11	2519,71	722,76	697,18	1419,93	1947,36	1992,28	3.939,65
Bali	349,98	356,83	706,81	230,12	224,26	454,38	580,11	581,09	1.161,19
Nusa Tenggara Barat	325,03	385,34	710,37	399,13	506,42	905,55	724,16	891,76	1.615,92
Nusa Tenggara Timur	153,22	161,12	314,33	499,65	545,25	1044,89	652,86	706,36	1.359,22
Kalimantan Barat	229,99	243,50	473,49	610,02	581,64	1191,66	840,02	825,13	1.665,15
Kalimantan Tengah	156,64	163,45	320,09	292,51	284,42	576,92	449,14	447,87	897,01
Kalimantan Selatan	260,74	282,15	542,89	368,85	366,37	735,22	629,59	648,52	1.278,11
Kalimantan Timur	383,55	368,92	752,47	221,16	211,39	432,55	604,71	580,31	1.185,02
Sulawesi Utara	164,69	161,36	326,05	207,57	194,60	402,17	372,26	355,96	728,22
Sulawesi Tengah	106,91	110,59	217,49	349,92	345,68	695,60	456,82	456,27	913,09
Sulawesi Selatan	445,57	502,20	947,77	823,65	906,29	1729,94	1269,22	1408,49	2.677,72
Sulawesi Tenggara	102,30	117,03	219,32	288,39	313,41	601,80	390,69	430,43	821,12
Gorontalo	47,82	50,14	97,96	106,74	107,88	214,62	154,56	158,02	312,58
Sulawesi Barat	57,75	67,41	125,16	112,47	120,86	233,33	170,22	188,27	358,49
Maluku	68,86	71,49	140,35	155,16	149,18	304,34	224,03	220,67	444,69
Maluku Utara	58,06	60,40	118,46	115,88	116,29	232,17	173,94	176,69	350,63
Papua Barat	32,58	33,26	65,84	95,73	98,28	194,01	128,31	131,54	259,85
Papua	99,07	91,87	190,94	275,32	296,55	571,88	374,39	388,42	762,82
<b>INDONESIA</b>	<b>19722,96</b>	<b>20591,76</b>	<b>40.314,72</b>	<b>19.037,68</b>	<b>19.363,23</b>	<b>38.400,91</b>	<b>38.760,64</b>	<b>39.954,99</b>	<b>78.715,62</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 3.2 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2008**

<b>Provinsi</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan+Perdesaan</b>
	(1)	(2)	(3)
Nanggroe Aceh Darussalam	91,19	94,83	93,74
Sumatera Utara	99,56	98,57	99,05
Sumatera Barat	89,82	96,54	93,99
Riau	97,51	101,27	99,33
Jambi	97,77	101,39	100,19
Sumatera Selatan	96,27	103,45	100,60
Bengkulu	89,68	105,75	99,72
Lampung	96,52	111,59	107,07
Bangka Belitung	103,92	108,10	106,15
Kepulauan Riau	76,72	94,81	83,95
DKI. Jakarta	92,98		92,98
Jawa Barat	98,07	101,53	99,36
Jawa Tengah	97,33	96,60	96,98
DI. Yogyakarta	106,90	97,00	103,99
Jawa Timur	93,84	93,56	93,70
Banten	94,56	103,67	97,75
Bali	98,08	102,62	99,83
Nusa Tenggara Barat	84,35	78,81	81,21
Nusa Tenggara Timur	95,10	91,64	92,43
Kalimantan Barat	94,45	104,88	101,80
Kalimantan Tengah	95,83	102,84	100,28
Kalimantan Selatan	92,41	100,68	97,08
Kalimantan Timur	103,97	104,62	104,20
Sulawesi Utara	102,06	106,66	104,58
Sulawesi Tengah	96,67	101,22	100,12
Sulawesi Selatan	88,72	90,88	90,11
Sulawesi Tenggara	87,41	92,02	90,77
Gorontalo	95,37	98,94	97,81
Sulawesi Barat	85,66	93,06	90,41
Maluku	96,33	104,01	101,52
Maluku Utara	96,12	99,65	98,44
Papua Barat	97,96	97,40	97,54
Papua	107,84	92,84	96,39
<b>INDONESIA</b>	<b>95,78</b>	<b>98,32</b>	<b>97,01</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 3.3.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan				
	15-19	20-24	25-29	30-35	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nangroe Aceh Darussalam	27,61	25,83	21,30	25,25	100,00
Sumatera Utara	27,44	24,18	23,73	24,65	100,00
Sumatera Barat	27,48	26,16	20,98	25,39	100,00
Riau	23,12	22,03	26,23	28,62	100,00
Jambi	24,16	23,39	25,26	27,19	100,00
Sumatera Selatan	26,69	25,91	21,52	25,88	100,00
Bengkulu	30,32	21,98	22,65	25,04	100,00
Lampung	26,74	23,94	24,51	24,81	100,00
Bangka Belitung	22,15	23,70	28,34	25,81	100,00
Kepulauan Riau	15,60	34,02	24,35	26,04	100,00
DKI. Jakarta	20,32	24,04	27,18	28,46	100,00
Jawa Barat	25,90	22,47	24,29	27,34	100,00
Jawa Tengah	26,65	22,11	23,81	27,43	100,00
DI. Yogyakarta	22,86	29,11	22,98	25,06	100,00
Jawa Timur	23,56	22,35	24,63	29,46	100,00
Banten	23,43	24,64	25,44	26,49	100,00
Bali	21,24	22,15	25,52	31,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	30,60	23,21	23,07	23,13	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,42	22,70	23,05	21,83	100,00
Kalimantan Barat	25,82	23,41	24,55	26,22	100,00
Kalimantan Tengah	25,97	22,14	23,40	28,50	100,00
Kalimantan Selatan	24,06	24,23	22,86	28,85	100,00
Kalimantan Timur	23,01	23,42	25,95	27,62	100,00
Sulawesi Utara	25,45	23,18	24,51	26,86	100,00
Sulawesi Tengah	26,49	24,16	22,16	27,19	100,00
Sulawesi Selatan	24,71	25,39	23,45	26,45	100,00
Sulawesi Tenggara	28,93	25,83	23,24	21,99	100,00
Gorontalo	26,06	22,93	22,22	28,79	100,00
Sulawesi Barat	28,42	22,38	24,03	25,16	100,00
Maluku	28,07	27,84	22,54	21,55	100,00
Maluku Utara	25,93	27,46	22,32	24,29	100,00
Papua Barat	22,05	24,93	25,81	27,21	100,00
Papua	20,80	23,48	28,72	27,00	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>24,86</b>	<b>23,42</b>	<b>24,45</b>	<b>27,26</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 3.3.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Tahun 2008**

Provinsi	Perdesaan				
	15-19	20-24	25-29	30-35	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nangroe Aceh Darussalam	28,60	23,15	22,35	25,91	100,00
Sumatera Utara	31,63	21,67	21,86	24,83	100,00
Sumatera Barat	27,62	21,57	23,11	27,70	100,00
Riau	25,23	22,29	25,05	27,43	100,00
Jambi	24,80	22,35	25,70	27,15	100,00
Sumatera Selatan	25,55	23,30	23,93	27,22	100,00
Bengkulu	25,98	22,51	23,88	27,63	100,00
Lampung	24,86	21,84	24,61	28,68	100,00
Bangka Belitung	25,28	25,25	22,92	26,56	100,00
Kepulauan Riau	25,02	25,62	20,85	28,51	100,00
DKI. Jakarta					
Jawa Barat	27,95	19,85	23,04	29,15	100,00
Jawa Tengah	26,21	20,14	23,34	30,31	100,00
DI. Yogyakarta	24,69	21,61	23,99	29,72	100,00
Jawa Timur	24,08	20,41	24,85	30,66	100,00
Banten	29,69	22,87	22,17	25,27	100,00
Bali	22,34	20,55	25,19	31,92	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,18	21,61	25,36	25,86	100,00
Nusa Tenggara Timur	27,41	21,68	23,51	27,40	100,00
Kalimantan Barat	26,31	22,86	24,21	26,62	100,00
Kalimantan Tengah	26,18	20,68	24,29	28,84	100,00
Kalimantan Selatan	25,33	21,36	24,07	29,24	100,00
Kalimantan Timur	22,96	22,76	25,23	29,05	100,00
Sulawesi Utara	24,56	19,15	22,99	33,30	100,00
Sulawesi Tengah	23,69	21,15	25,45	29,71	100,00
Sulawesi Selatan	27,66	21,38	22,89	28,08	100,00
Sulawesi Tenggara	28,38	21,59	23,99	26,05	100,00
Gorontalo	26,27	20,55	23,27	29,92	100,00
Sulawesi Barat	26,09	20,58	24,38	28,96	100,00
Maluku	28,38	21,92	22,84	26,86	100,00
Maluku Utara	27,44	21,27	23,75	27,53	100,00
Papua Barat	25,63	21,71	25,63	27,02	100,00
Papua	24,76	19,91	25,43	29,89	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>26,52</b>	<b>21,21</b>	<b>23,74</b>	<b>28,52</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 3.3.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan				
	15-19	20-24	25-29	30-35	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nangroe Aceh Darussalam	28,31	23,94	22,04	25,71	100,00
Sumatera Utara	29,58	22,90	22,78	24,74	100,00
Sumatera Barat	27,57	23,28	22,32	26,84	100,00
Riau	24,15	22,16	25,65	28,04	100,00
Jambi	24,59	22,69	25,56	27,16	100,00
Sumatera Selatan	25,99	24,31	22,99	26,70	100,00
Bengkulu	27,53	22,32	23,44	26,71	100,00
Lampung	25,40	22,44	24,58	27,58	100,00
Bangka Belitung	23,83	24,53	25,42	26,21	100,00
Kepulauan Riau	19,59	30,46	22,87	27,08	100,00
DKI. Jakarta	20,32	24,04	27,18	28,46	100,00
Jawa Barat	26,68	21,48	23,82	28,03	100,00
Jawa Tengah	26,44	21,16	23,58	28,82	100,00
DI. Yogyakarta	23,38	26,98	23,26	26,38	100,00
Jawa Timur	23,81	21,41	24,74	30,04	100,00
Banten	25,69	24,00	24,26	26,05	100,00
Bali	21,67	21,52	25,39	31,42	100,00
Nusa Tenggara Barat	28,68	22,31	24,35	24,66	100,00
Nusa Tenggara Timur	28,57	21,92	23,40	26,11	100,00
Kalimantan Barat	26,17	23,02	24,31	26,51	100,00
Kalimantan Tengah	26,11	21,20	23,97	28,72	100,00
Kalimantan Selatan	24,79	22,58	23,56	29,08	100,00
Kalimantan Timur	22,99	23,18	25,68	28,14	100,00
Sulawesi Utara	24,96	20,95	23,67	30,42	100,00
Sulawesi Tengah	24,36	21,87	24,67	29,11	100,00
Sulawesi Selatan	26,62	22,80	23,08	27,50	100,00
Sulawesi Tenggara	28,52	22,72	23,79	24,96	100,00
Gorontalo	26,20	21,29	22,94	29,56	100,00
Sulawesi Barat	26,90	21,21	24,26	27,63	100,00
Maluku	28,28	23,78	22,75	25,18	100,00
Maluku Utara	26,93	23,36	23,27	26,43	100,00
Papua Barat	24,72	22,53	25,68	27,07	100,00
Papua	23,77	20,81	26,26	29,17	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>25,67</b>	<b>22,35</b>	<b>24,10</b>	<b>27,88</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 3.4.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, Tahun 2008**

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Perkotaan
					(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	61,05	37,95	0,72	0,28	100,00
Sumatera Utara	59,51	39,33	0,84	0,33	100,00
Sumatera Barat	61,16	37,44	1,09	0,32	100,00
Riau	52,17	46,64	0,96	0,23	100,00
Jambi	50,48	46,93	2,07	0,52	100,00
Sumatera Selatan	56,30	42,28	1,03	0,39	100,00
Bengkulu	53,92	44,56	1,18	0,35	100,00
Lampung	54,09	44,95	0,72	0,25	100,00
Bangka Belitung	47,69	50,10	1,69	0,52	100,00
Kepulauan Riau	54,96	44,01	0,90	0,12	100,00
DKI. Jakarta	54,66	43,84	1,04	0,46	100,00
Jawa Barat	50,93	47,16	1,57	0,34	100,00
Jawa Tengah	54,22	44,41	1,02	0,35	100,00
DI. Yogyakarta	62,53	36,72	0,59	0,16	100,00
Jawa Timur	48,21	49,88	1,57	0,34	100,00
Banten	50,27	47,91	1,44	0,38	100,00
Bali	47,37	51,61	0,61	0,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,70	45,23	2,87	0,20	100,00
Nusa Tenggara Timur	66,30	32,69	0,58	0,44	100,00
Kalimantan Barat	53,49	45,05	1,26	0,20	100,00
Kalimantan Tengah	47,06	51,01	1,65	0,28	100,00
Kalimantan Selatan	47,34	50,59	1,58	0,49	100,00
Kalimantan Timur	48,79	49,94	1,08	0,19	100,00
Sulawesi Utara	48,63	50,30	0,84	0,24	100,00
Sulawesi Tengah	55,49	42,58	1,41	0,53	100,00
Sulawesi Selatan	55,33	42,75	1,51	0,42	100,00
Sulawesi Tenggara	58,10	40,58	1,09	0,23	100,00
Gorontalo	49,73	47,74	2,20	0,33	100,00
Sulawesi Barat	61,71	37,00	1,07	0,22	100,00
Maluku	59,22	39,85	0,89	0,04	100,00
Maluku Utara	56,75	41,17	1,53	0,55	100,00
Papua Barat	51,91	46,22	1,46	0,41	100,00
Papua	49,67	48,47	1,43	0,43	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>52,69</b>	<b>45,68</b>	<b>1,29</b>	<b>0,34</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 3.4.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, Tahun 2008**

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Perdesaan
					(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggro Aceh Darussalam	56,23	42,18	0,93	0,66	100,00
Sumatera Utara	52,98	45,72	0,86	0,44	100,00
Sumatera Barat	48,99	49,37	1,36	0,29	100,00
Riau	44,47	54,13	1,04	0,36	100,00
Jambi	40,58	57,55	1,62	0,26	100,00
Sumatera Selatan	43,16	55,32	1,17	0,35	100,00
Bengkulu	41,21	57,33	1,10	0,36	100,00
Lampung	42,54	56,33	0,80	0,34	100,00
Bangka Belitung	42,71	55,71	1,30	0,28	100,00
Kepulauan Riau	46,64	52,09	1,19	0,08	100,00
DKI. Jakarta					
Jawa Barat	38,90	58,24	2,41	0,46	100,00
Jawa Tengah	41,60	56,98	1,13	0,29	100,00
DI. Yogyakarta	46,77	52,37	0,78	0,08	100,00
Jawa Timur	37,56	60,48	1,56	0,40	100,00
Banten	45,95	51,72	2,05	0,27	100,00
Bali	40,43	58,24	1,09	0,24	100,00
Nusa Tenggara Barat	40,33	55,91	3,31	0,45	100,00
Nusa Tenggara Timur	49,38	48,20	1,69	0,74	100,00
Kalimantan Barat	44,30	54,34	0,90	0,45	100,00
Kalimantan Tengah	42,60	55,76	1,32	0,32	100,00
Kalimantan Selatan	38,90	58,61	2,04	0,45	100,00
Kalimantan Timur	43,59	55,19	0,89	0,32	100,00
Sulawesi Utara	43,06	55,32	1,23	0,39	100,00
Sulawesi Tengah	40,08	57,79	1,81	0,33	100,00
Sulawesi Selatan	47,73	50,11	1,70	0,45	100,00
Sulawesi Tenggara	44,62	53,32	1,62	0,44	100,00
Gorontalo	40,30	58,37	1,12	0,21	100,00
Sulawesi Barat	42,04	55,89	1,77	0,30	100,00
Maluku	47,43	50,81	1,17	0,60	100,00
Maluku Utara	43,70	54,73	0,98	0,59	100,00
Papua Barat	43,89	54,09	1,08	0,95	100,00
Papua	34,05	64,35	0,81	0,78	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>42,84</b>	<b>55,26</b>	<b>1,50</b>	<b>0,40</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 3.4.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, Tahun 2008**

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Perkotaan+Perdesaan
					(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggro Aceh Darussalam	57,65	40,94	0,87	0,54	100,00
Sumatera Utara	56,18	42,59	0,85	0,39	100,00
Sumatera Barat	53,51	44,93	1,26	0,30	100,00
Riau	48,41	50,29	1,00	0,30	100,00
Jambi	43,81	54,07	1,77	0,34	100,00
Sumatera Selatan	48,27	50,24	1,11	0,37	100,00
Bengkulu	45,74	52,78	1,13	0,36	100,00
Lampung	45,82	53,09	0,77	0,31	100,00
Bangka Belitung	45,01	53,13	1,48	0,39	100,00
Kepulauan Riau	51,44	47,43	1,03	0,10	100,00
DKI. Jakarta	54,66	43,84	1,04	0,46	100,00
Jawa Barat	46,37	51,36	1,89	0,38	100,00
Jawa Tengah	48,14	50,46	1,07	0,32	100,00
DI. Yogyakarta	58,05	41,17	0,64	0,14	100,00
Jawa Timur	43,05	55,02	1,56	0,37	100,00
Banten	48,71	49,28	1,66	0,34	100,00
Bali	44,66	54,20	0,80	0,34	100,00
Nusa Tenggara Barat	45,33	51,22	3,12	0,34	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,29	44,61	1,43	0,67	100,00
Kalimantan Barat	46,91	51,70	1,00	0,38	100,00
Kalimantan Tengah	44,19	54,07	1,44	0,30	100,00
Kalimantan Selatan	42,48	55,21	1,84	0,47	100,00
Kalimantan Timur	46,89	51,85	1,01	0,24	100,00
Sulawesi Utara	45,55	53,07	1,05	0,32	100,00
Sulawesi Tengah	43,75	54,16	1,71	0,38	100,00
Sulawesi Selatan	50,42	47,51	1,63	0,44	100,00
Sulawesi Tenggara	48,22	49,92	1,48	0,38	100,00
Gorontalo	43,26	55,04	1,46	0,25	100,00
Sulawesi Barat	48,91	49,29	1,52	0,27	100,00
Maluku	51,15	47,35	1,08	0,42	100,00
Maluku Utara	48,11	50,15	1,17	0,58	100,00
Papua Barat	45,92	52,09	1,17	0,81	100,00
Papua	37,96	60,38	0,97	0,69	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>47,88</b>	<b>50,35</b>	<b>1,39</b>	<b>0,37</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 4.1.1 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, Tahun 2008**

<b>Perkotaan</b>				
<b>Jenis Kelamin/ Kelompok Umur</b>	<b>Tdk/Blm Pernah Sekolah</b>	<b>Masih Sekolah</b>	<b>Tidak Sekolah Lagi</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Laki-laki</b>				
15	0,44	80,98	18,57	100,00
16-18	0,34	62,93	36,73	100,00
19-24	0,46	17,75	81,79	100,00
25-35	0,56	1,74	97,70	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,49</b>	<b>19,84</b>	<b>79,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Perempuan</b>				
15	0,25	82,18	17,58	100,00
16-18	0,36	60,90	38,75	100,00
19-24	0,48	17,09	82,43	100,00
25-35	1,01	1,21	97,78	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,73</b>	<b>18,72</b>	<b>80,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Laki-laki + Perempuan</b>				
15	0,34	81,58	18,07	100,00
16-18	0,35	61,91	37,74	100,00
19-24	0,47	17,41	82,12	100,00
25-35	0,79	1,47	97,74	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,61</b>	<b>19,27</b>	<b>80,12</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 4.1.2 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, Tahun 2008**

<b>Perdesaan</b>				
<b>Jenis Kelamin/ Kelompok Umur</b>	<b>Tdk/Blm Pernah Sekolah</b>	<b>Masih Sekolah</b>	<b>Tidak Sekolah Lagi</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Laki-laki</b>				
15	1,11	67,26	31,63	100,00
16-18	1,18	47,26	51,55	100,00
19-24	1,56	7,24	91,20	100,00
25-35	2,19	0,69	97,12	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1,78</b>	<b>14,76</b>	<b>83,46</b>	<b>100,00</b>
<b>Perempuan</b>				
15	1,04	69,80	29,16	100,00
16-18	1,26	47,94	50,80	100,00
19-24	2,39	6,12	91,49	100,00
25-35	3,95	0,69	95,36	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2,98</b>	<b>13,25</b>	<b>83,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Laki-laki + Perempuan</b>				
15	1,08	68,47	30,45	100,00
16-18	1,22	47,58	51,20	100,00
19-24	1,98	6,68	91,35	100,00
25-35	3,10	0,69	96,21	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2,38</b>	<b>14,00</b>	<b>83,62</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 4.1.3 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, Tahun 2008**

<b>Perkotaan+Perdesaan</b>				
<b>Jenis Kelamin/ Kelompok Umur</b>	<b>Tdk/Blm Pernah Sekolah</b>	<b>Masih Sekolah</b>	<b>Tidak Sekolah Lagi</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Laki-laki</b>				
15	0,81	73,46	25,73	100,00
16-18	0,78	54,81	44,41	100,00
19-24	0,98	12,83	86,20	100,00
25-35	1,35	1,23	97,42	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1,13</b>	<b>17,35</b>	<b>81,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Perempuan</b>				
15	0,66	75,74	23,60	100,00
16-18	0,80	54,59	44,62	100,00
19-24	1,36	12,05	86,59	100,00
25-35	2,46	0,96	96,58	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1,82</b>	<b>16,07</b>	<b>82,11</b>	<b>100,00</b>
<b>Laki-laki + Perempuan</b>				
15	0,74	74,58	24,68	100,00
16-18	0,79	54,70	44,51	100,00
19-24	1,17	12,43	86,40	100,00
25-35	1,92	1,09	96,99	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1,48</b>	<b>16,70</b>	<b>81,82</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 4.2.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan Tahun 2008**

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah						Tidak Sekolah Lagi	Jumlah		
		SD	Masih Sekolah			Tidak Sekolah Lagi					
			SLTP	SM	PT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
Nanggro Aceh Darussalam	0,35	6,75	14,49	46,02	32,75	69,29	100,00				
Sumatera Utara	0,51	6,45	18,34	54,68	20,53	75,90	100,00				
Sumatera Barat	0,45	4,04	15,69	43,54	36,73	70,55	100,00				
Riau	0,30	3,07	20,50	56,54	19,89	80,01	100,00				
Jambi	0,86	5,40	18,16	50,59	25,86	81,07	100,00				
Sumatera Selatan	0,89	4,15	15,00	53,70	27,15	77,06	100,00				
Bengkulu	0,40	4,06	15,83	53,02	27,08	72,51	100,00				
Lampung	0,59	7,18	16,68	51,31	24,82	80,37	100,00				
Bangka Belitung	0,36	5,00	16,24	60,35	18,41	85,52	100,00				
Kepulauan Riau	0,51	7,79	15,50	54,36	22,36	88,34	100,00				
DKI. Jakarta	0,35	2,40	15,66	47,31	34,63	83,39	100,00				
Jawa Barat	0,42	0,64	21,11	53,67	24,58	83,06	100,00				
Jawa Tengah	0,68	0,53	22,58	56,38	20,50	80,31	100,00				
DI. Yogyakarta	0,26	0,53	12,00	28,66	58,82	64,22	100,00				
Jawa Timur	0,66	0,31	21,60	56,72	21,37	80,73	100,00				
Banten	0,64	0,63	17,37	55,72	26,27	83,02	100,00				
Bali	1,21	2,11	14,32	56,87	26,70	80,88	100,00				
Nusa Tenggara Barat	2,39	5,65	20,28	46,13	27,93	74,15	100,00				
Nusa Tenggara Timur	0,65	2,54	12,48	51,61	33,37	71,74	100,00				
Kalimantan Barat	1,37	3,16	18,09	55,28	23,47	78,39	100,00				
Kalimantan Tengah	0,64	7,89	15,29	50,25	26,58	80,27	100,00				
Kalimantan Selatan	0,81	11,08	18,34	43,02	27,56	82,29	100,00				
Kalimantan Timur	0,45		18,50	57,42	24,09	80,52	100,00				
Sulawesi Utara	0,33	2,07	19,95	52,16	25,82	78,84	100,00				
Sulawesi Tengah	0,37	1,25	14,21	45,19	39,34	73,06	100,00				
Sulawesi Selatan	1,52	3,85	9,48	42,83	43,84	75,51	100,00				
Sulawesi Tenggara	0,45	6,36	17,63	40,09	35,93	69,89	100,00				
Gorontalo	0,59	12,45	19,66	42,22	25,67	80,68	100,00				
Sulawesi Barat	1,02	11,70	16,36	48,58	23,36	79,47	100,00				
Maluku	0,37	1,65	15,59	42,76	40,01	67,47	100,00				
Maluku Utara	0,28	4,47	15,15	42,74	37,64	72,00	100,00				
Papua Barat	0,65	19,55	6,16	57,71	16,57	80,64	100,00				
Papua	1,10	6,90	20,30	43,42	29,38	78,03	100,00				
<b>INDONESIA</b>	<b>0,61</b>	<b>2,35</b>	<b>18,69</b>	<b>52,00</b>	<b>26,96</b>	<b>80,12</b>	<b>100,00</b>				

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 4.2.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan Tahun 2008**

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Perdesaan						Jumlah	
		SD	Masih Sekolah			PT	Tidak Sekolah Lagi		
			SLTP	SM	(8)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Nanggroe Aceh Darussalam	1,51	2,11	19,45	58,14	20,31	74,90	100,00		
Sumatera Utara	1,76	1,15	25,60	64,35	8,90	78,17	100,00		
Sumatera Barat	0,87	1,67	22,54	60,39	15,40	80,55	100,00		
Riau	1,23	2,48	25,71	57,91	13,90	83,09	100,00		
Jambi	1,70	2,59	18,69	60,92	17,79	83,89	100,00		
Sumatera Selatan	1,43	2,57	30,34	58,52	8,58	86,36	100,00		
Bengkulu	1,24	0,76	22,85	61,09	15,29	82,99	100,00		
Lampung	0,75	7,96	24,11	59,06	8,87	86,54	100,00		
Bangka Belitung	1,90	4,48	18,51	62,24	14,77	86,80	100,00		
Kepulauan Riau	2,25	3,85	20,70	67,32	8,12	81,91	100,00		
DKI. Jakarta							100,00		
Jawa Barat	1,05	1,13	30,07	57,34	11,47	87,93	100,00		
Jawa Tengah	0,98	0,86	28,88	61,70	8,57	86,37	100,00		
DI. Yogyakarta	0,98		25,94	56,20	17,85	80,84	100,00		
Jawa Timur	2,75	0,87	27,45	58,41	13,26	84,14	100,00		
Banten	1,23	0,92	19,95	62,04	17,09	86,42	100,00		
Bali	3,04	3,58	19,76	62,66	14,00	83,51	100,00		
Nusa Tenggara Barat	5,67	5,55	25,88	53,79	14,78	77,95	100,00		
Nusa Tenggara Timur	4,38	5,84	30,88	52,36	10,92	81,73	100,00		
Kalimantan Barat	3,88	6,41	28,82	54,68	10,09	82,93	100,00		
Kalimantan Tengah	1,02	7,81	22,08	61,22	8,89	85,65	100,00		
Kalimantan Selatan	0,95	12,23	25,85	49,84	12,08	86,58	100,00		
Kalimantan Timur	1,84	0,76	29,87	57,76	11,61	84,01	100,00		
Sulawesi Utara	0,60	1,65	17,17	69,18	12,00	85,95	100,00		
Sulawesi Tengah	1,54	1,87	24,15	60,13	13,85	86,34	100,00		
Sulawesi Selatan	3,91	8,90	19,03	56,44	15,63	81,87	100,00		
Sulawesi Tenggara	1,52	4,47	22,82	60,66	12,05	81,42	100,00		
Gorontalo	1,68	7,45	21,64	56,88	14,03	84,54	100,00		
Sulawesi Barat	5,06	16,58	19,74	45,31	18,37	83,82	100,00		
Maluku	1,43	1,09	24,98	62,37	11,56	78,73	100,00		
Maluku Utara	1,64	6,08	29,43	59,76	4,72	81,99	100,00		
Papua Barat	6,15	26,23	16,96	45,33	11,47	77,19	100,00		
Papua	34,11	13,83	32,98	43,76	9,43	51,72	100,00		
<b>INDONESIA</b>	<b>2,38</b>	<b>3,21</b>	<b>25,76</b>	<b>58,81</b>	<b>12,22</b>	<b>83,62</b>	<b>100,00</b>		

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 4.2.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan Tahun 2008**

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah			Tidak Sekolah Lagi	Perkotaan+Perdesaan	
		SD	SLTP	SM		PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	1,17	3,73	17,71	53,90	24,66	73,25	100,00
Sumatera Utara	1,15	3,96	21,74	59,22	15,07	77,06	100,00
Sumatera Barat	0,72	2,81	19,25	52,30	25,64	76,83	100,00
Riau	0,76	2,82	22,75	57,13	17,31	81,51	100,00
Jambi	1,42	3,66	18,49	57,01	20,85	82,97	100,00
Sumatera Selatan	1,22	3,41	22,13	55,94	18,52	82,74	100,00
Bengkulu	0,94	2,37	19,43	57,16	21,04	79,26	100,00
Lampung	0,70	7,67	21,34	56,16	14,83	84,78	100,00
Bangka Belitung	1,19	4,75	17,33	61,26	16,65	86,21	100,00
Kepulauan Riau	1,25	5,78	18,16	60,98	15,09	85,62	100,00
DKI Jakarta	0,35	2,40	15,66	47,31	34,63	83,39	100,00
Jawa Barat	0,66	0,78	23,70	54,73	20,78	84,91	100,00
Jawa Tengah	0,82	0,66	24,99	58,41	15,94	83,23	100,00
DI. Yogyakarta	0,46	0,44	14,35	33,31	51,90	68,95	100,00
Jawa Timur	1,67	0,53	23,93	57,39	18,14	82,38	100,00
Banten	0,86	0,72	18,14	57,61	23,53	84,24	100,00
Bali	1,93	2,59	16,09	58,75	22,57	81,91	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,23	5,61	22,92	49,74	21,74	76,28	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,52	4,61	23,99	52,08	19,32	79,42	100,00
Kalimantan Barat	3,16	5,18	24,76	54,91	15,15	81,64	100,00
Kalimantan Tengah	0,89	7,84	19,07	56,36	16,73	83,73	100,00
Kalimantan Selatan	0,89	11,65	22,09	46,43	19,82	84,76	100,00
Kalimantan Timur	0,96	0,23	21,90	57,52	20,35	81,80	100,00
Sulawesi Utara	0,48	1,89	18,72	59,71	19,69	82,77	100,00
Sulawesi Tengah	1,26	1,62	20,11	54,06	24,21	83,18	100,00
Sulawesi Selatan	3,06	6,53	14,54	50,05	28,87	79,62	100,00
Sulawesi Tenggara	1,23	5,20	20,81	52,68	21,31	78,34	100,00
Gorontalo	1,34	9,36	20,88	51,27	18,49	83,33	100,00
Sulawesi Barat	3,65	14,21	18,10	46,90	20,79	82,30	100,00
Maluku	1,09	1,33	20,96	53,98	23,73	75,18	100,00
Maluku Utara	1,18	5,33	22,81	51,87	19,98	78,62	100,00
Papua Barat	4,75	24,39	13,98	48,75	12,88	78,07	100,00
Papua	25,85	11,54	28,80	43,65	16,01	58,31	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>1,48</b>	<b>2,70</b>	<b>21,58</b>	<b>54,79</b>	<b>20,93</b>	<b>81,82</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 4.3 Persentase Pemuda yang Melek Huruf menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggro Aceh Darussalam	99,78	99,96	99,87	99,48	99,00	99,24	99,57	99,29	99,42
Sumatera Utara	99,86	99,91	99,88	99,68	98,54	99,11	99,77	99,21	99,49
Sumatera Barat	99,83	99,93	99,88	99,38	99,47	99,43	99,54	99,65	99,60
Riau	99,95	99,81	99,88	99,98	99,27	99,63	99,96	99,55	99,75
Jambi	100,00	99,17	99,58	99,98	98,65	99,32	99,98	98,82	99,40
Sumatera Selatan	99,80	99,74	99,77	99,22	99,27	99,24	99,44	99,46	99,45
Bengkulu	100,00	99,74	99,86	99,51	98,64	99,09	99,68	99,06	99,37
Lampung	100,00	99,85	99,92	99,93	99,36	99,66	99,95	99,51	99,73
Bangka Belitung	99,76	99,89	99,83	99,05	98,95	99,00	99,37	99,39	99,38
Kepulauan Riau	99,93	99,79	99,85	98,97	99,11	99,04	99,50	99,52	99,51
DKI Jakarta	99,95	99,93	99,93				99,95	99,93	99,93
Jawa Barat	99,96	99,75	99,86	99,93	99,44	99,68	99,95	99,63	99,79
Jawa Tengah	99,70	99,63	99,67	99,61	99,19	99,40	99,66	99,42	99,54
DI. Yogyakarta	99,95	99,94	99,94	99,83	99,50	99,66	99,92	99,81	99,86
Jawa Timur	99,88	99,51	99,69	98,92	96,62	97,74	99,42	98,11	98,74
Banten	99,96	99,84	99,90	99,94	98,94	99,45	99,95	99,52	99,74
Bali	99,77	98,92	99,34	98,37	95,80	97,10	99,21	97,71	98,46
Nusa Tenggara Barat	99,32	97,24	98,19	97,80	92,75	94,98	98,48	94,69	96,39
Nusa Tenggara Timur	99,10	99,68	99,40	95,17	96,06	95,64	96,10	96,89	96,51
Kalimantan Barat	99,39	98,60	98,98	98,62	95,83	97,26	98,83	96,65	97,75
Kalimantan Tengah	99,76	99,90	99,84	99,58	99,32	99,45	99,64	99,53	99,59
Kalimantan Selatan	99,93	99,77	99,84	99,68	99,27	99,48	99,78	99,49	99,63
Kalimantan Timur	99,78	99,48	99,63	99,82	99,42	99,63	99,79	99,45	99,63
Sulawesi Utara	99,78	99,88	99,83	99,70	99,91	99,80	99,74	99,89	99,81
Sulawesi Tengah	99,89	99,88	99,89	99,25	98,81	99,03	99,40	99,07	99,24
Sulawesi Selatan	98,76	99,42	99,11	95,66	96,30	96,00	96,75	97,41	97,10
Sulawesi Tenggara	99,68	99,91	99,80	98,71	98,36	98,53	98,96	98,78	98,87
Gorontalo	99,18	100,00	99,60	98,11	98,40	98,26	98,44	98,91	98,68
Sulawesi Barat	97,71	98,55	98,16	93,73	92,72	93,21	95,08	94,81	94,94
Maluku	100,00	99,73	99,86	99,32	98,75	99,04	99,53	99,07	99,30
Maluku Utara	99,88	99,68	99,78	99,38	98,45	98,92	99,55	98,87	99,21
Papua Barat	99,63	99,32	99,47	95,07	92,87	93,96	96,23	94,50	95,35
Papua	99,34	98,98	99,17	79,68	61,86	70,44	84,88	70,64	77,63
<b>INDONESIA</b>	<b>99,83</b>	<b>99,65</b>	<b>99,73</b>	<b>98,83</b>	<b>97,61</b>	<b>98,21</b>	<b>99,34</b>	<b>98,66</b>	<b>98,99</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 4.4.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan						
	Tdk/Blm Per- nah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Perguruan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,35	3,61	10,94	26,45	47,09	11,55	100,00
Sumatera Utara	0,51	3,48	13,95	28,63	44,83	8,59	100,00
Sumatera Barat	0,45	2,89	14,70	24,88	44,99	12,09	100,00
Riau	0,30	2,80	13,65	26,16	47,14	9,96	100,00
Jambi	0,86	3,80	20,65	25,06	40,57	9,05	100,00
Sumatera Selatan	0,89	4,26	19,48	24,76	40,70	9,92	100,00
Bengkulu	0,40	4,37	13,09	27,98	42,79	11,37	100,00
Lampung	0,59	4,30	21,80	29,59	36,43	7,30	100,00
Bangka Belitung	0,36	4,89	23,84	26,78	43,19	0,94	100,00
Kepulauan Riau	0,51	2,34	14,71	20,93	56,55	4,96	100,00
DKI. Jakarta	0,35	1,52	16,06	24,93	44,15	12,99	100,00
Jawa Barat	0,42	3,58	25,79	28,66	33,82	7,72	100,00
Jawa Tengah	0,68	1,56	25,88	31,67	33,17	7,04	100,00
DI. Yogyakarta	0,26	0,63	9,92	21,37	50,94	16,88	100,00
Jawa Timur	0,66	1,32	21,80	30,24	37,51	8,46	100,00
Banten	0,64	4,30	19,06	27,22	39,91	8,86	100,00
Bali	1,21	0,88	16,59	27,05	42,46	11,80	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,39	6,03	28,01	27,58	30,48	5,52	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,65	4,59	15,88	28,06	40,88	9,94	100,00
Kalimantan Barat	1,37	15,16	11,81	26,13	36,16	9,37	100,00
Kalimantan Tengah	0,64	4,08	24,01	27,85	35,12	8,30	100,00
Kalimantan Selatan	0,81	4,67	20,74	27,36	38,10	8,32	100,00
Kalimantan Timur	0,45	2,05	16,73	27,83	42,73	10,20	100,00
Sulawesi Utara	0,33	3,22	15,27	26,70	47,12	7,36	100,00
Sulawesi Tengah	0,37	2,74	15,09	26,00	44,04	11,75	100,00
Sulawesi Selatan	1,52	3,78	16,87	24,57	42,21	11,05	100,00
Sulawesi Tenggara	0,45	3,52	13,41	23,61	47,13	11,89	100,00
Gorontalo	0,59	9,16	26,68	23,44	33,94	6,19	100,00
Sulawesi Barat	1,02	8,46	24,60	28,62	26,98	10,32	100,00
Maluku	0,37	1,32	11,44	23,93	52,48	10,46	100,00
Maluku Utara	0,28	5,28	10,97	23,49	50,03	9,95	100,00
Papua Barat	0,65	4,81	10,35	26,74	48,33	9,12	100,00
Papua	1,10	2,39	13,84	22,92	50,17	9,58	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>0,61</b>	<b>2,94</b>	<b>20,63</b>	<b>28,01</b>	<b>38,82</b>	<b>9,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 4.4.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008**

Provinsi	Perdesaan						
	Tdk/Blm Per- nah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Perguruan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	1,51	5,88	25,38	36,09	27,20	3,95	100,00
Sumatera Utara	1,76	5,65	26,89	34,60	28,68	2,42	100,00
Sumatera Barat	0,87	8,14	26,98	32,42	27,32	4,27	100,00
Riau	1,23	8,65	33,62	30,90	22,29	3,31	100,00
Jambi	1,70	7,32	33,28	31,59	22,44	3,68	100,00
Sumatera Selatan	1,43	6,56	43,78	28,38	18,07	1,78	100,00
Bengkulu	1,24	8,24	31,72	32,37	23,44	2,99	100,00
Lampung	0,75	5,17	36,37	34,91	20,87	1,94	100,00
Bangka Belitung	1,90	12,90	46,10	21,19	17,41	0,50	100,00
Kepulauan Riau	2,25	6,46	52,76	23,26	14,29	0,98	100,00
DKI. Jakarta							
Jawa Barat	1,05	4,50	52,30	28,03	12,51	1,61	100,00
Jawa Tengah	0,98	5,38	42,46	36,11	13,01	2,06	100,00
DI. Yogyakarta	0,98	7,64	17,79	40,04	28,24	5,32	100,00
Jawa Timur	2,75	6,07	41,00	29,02	18,71	2,45	100,00
Banten	1,23	22,66	33,18	27,94	13,58	1,40	100,00
Bali	3,04	5,41	31,35	28,06	28,51	3,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,67	9,21	32,39	26,76	21,81	4,17	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,38	24,52	31,64	21,79	15,29	2,37	100,00
Kalimantan Barat	3,88	10,36	39,74	29,65	14,27	2,10	100,00
Kalimantan Tengah	1,02	5,94	44,06	30,08	16,67	2,23	100,00
Kalimantan Selatan	0,95	10,16	40,38	29,14	16,78	2,59	100,00
Kalimantan Timur	1,84	13,64	27,19	29,55	24,18	3,59	100,00
Sulawesi Utara	0,60	6,23	27,01	31,88	31,40	2,89	100,00
Sulawesi Tengah	1,54	6,85	37,50	29,98	20,92	3,22	100,00
Sulawesi Selatan	3,91	15,09	31,26	27,03	19,37	3,34	100,00
Sulawesi Tenggara	1,52	21,19	16,66	31,83	24,54	4,25	100,00
Gorontalo	1,68	16,41	42,53	22,24	15,10	2,04	100,00
Sulawesi Barat	5,06	16,96	36,48	21,81	16,76	2,93	100,00
Maluku	1,43	7,44	25,56	29,30	32,08	4,20	100,00
Maluku Utara	1,64	19,58	23,84	28,92	21,92	4,10	100,00
Papua Barat	6,15	17,14	24,20	27,71	22,08	2,72	100,00
Papua	34,11	6,13	24,93	18,05	15,00	1,78	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>2,38</b>	<b>8,33</b>	<b>37,87</b>	<b>30,30</b>	<b>18,62</b>	<b>2,49</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 4.4.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						
	Tdk/Blm Per- nah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Diploma IV/ S1/S2/S3	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	1,17	5,21	21,12	33,25	33,06	6,19	100,00
Sumatera Utara	1,15	4,59	20,54	31,67	36,60	5,45	100,00
Sumatera Barat	0,72	6,19	22,41	29,61	33,90	7,18	100,00
Riau	0,76	5,65	23,39	28,47	35,02	6,72	100,00
Jambi	1,42	6,17	29,15	29,45	28,37	5,44	100,00
Sumatera Selatan	1,22	5,66	34,32	26,97	26,88	4,95	100,00
Bengkulu	0,94	6,86	25,08	30,81	30,34	5,98	100,00
Lampung	0,70	4,92	32,22	33,39	25,30	3,46	100,00
Bangka Belitung	1,19	9,21	35,83	23,77	29,30	0,70	100,00
Kepulauan Riau	1,25	4,08	30,81	21,92	38,67	3,27	100,00
DKI. Jakarta	0,35	1,52	16,06	24,93	44,15	12,99	100,00
Jawa Barat	0,66	3,93	35,84	28,42	25,74	5,40	100,00
Jawa Tengah	0,82	3,40	33,87	33,81	23,46	4,64	100,00
DI. Yogyakarta	0,46	2,62	12,16	26,68	44,49	13,60	100,00
Jawa Timur	1,67	3,63	31,10	29,65	28,40	5,55	100,00
Banten	0,86	10,92	24,15	27,48	30,42	6,18	100,00
Bali	1,93	2,65	22,37	27,45	37,00	8,61	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,23	7,81	30,46	27,12	25,62	4,76	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,52	19,91	28,00	23,24	21,21	4,12	100,00
Kalimantan Barat	3,16	11,72	31,80	28,65	20,50	4,17	100,00
Kalimantan Tengah	0,89	5,28	36,90	29,28	23,26	4,40	100,00
Kalimantan Selatan	0,89	7,83	32,04	28,38	25,83	5,03	100,00
Kalimantan Timur	0,96	6,28	20,55	28,46	35,96	7,79	100,00
Sulawesi Utara	0,48	4,88	21,75	29,56	38,44	4,90	100,00
Sulawesi Tengah	1,26	5,87	32,16	29,03	26,43	5,25	100,00
Sulawesi Selatan	3,06	11,08	26,17	26,16	27,46	6,07	100,00
Sulawesi Tenggara	1,23	16,47	15,79	29,64	30,58	6,29	100,00
Gorontalo	1,34	14,14	37,56	22,62	21,01	3,34	100,00
Sulawesi Barat	3,65	13,99	32,33	24,18	20,33	5,51	100,00
Maluku	1,09	5,51	21,10	27,61	38,52	6,17	100,00
Maluku Utara	1,18	14,75	19,49	27,08	31,42	6,08	100,00
Papua Barat	4,75	14,02	20,69	27,47	28,73	4,34	100,00
Papua	25,85	5,19	22,15	19,27	23,80	3,74	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>1,48</b>	<b>5,57</b>	<b>29,04</b>	<b>29,13</b>	<b>28,97</b>	<b>5,82</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 5.1.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan					
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NAD	43,30	9,43	29,29	15,44	2,55	100,00
Sumatera Utara	49,21	10,72	21,49	15,54	3,04	100,00
Sumatera Barat	43,48	9,57	28,97	13,23	4,74	100,00
Riau	46,26	10,95	19,72	21,31	1,76	100,00
Jambi	50,22	7,24	20,46	19,84	2,23	100,00
Sumatera Selatan	46,48	13,20	18,74	19,25	2,33	100,00
Bengkulu	51,79	7,63	26,19	12,52	1,86	100,00
Lampung	49,01	11,43	21,32	15,67	2,58	100,00
Bangka Belitung	54,24	8,78	14,33	19,81	2,85	100,00
Kepulauan Riau	65,95	7,37	9,13	16,55	1,00	100,00
DKI. Jakarta	58,51	12,17	13,22	14,61	1,49	100,00
Jawa Barat	48,25	13,16	16,28	19,14	3,17	100,00
Jawa Tengah	52,73	9,50	19,94	13,79	4,04	100,00
DI. Yogyakarta	54,79	7,51	24,63	11,88	1,19	100,00
Jawa Timur	54,08	9,90	17,86	15,46	2,70	100,00
Banten	49,49	15,10	16,03	16,34	3,04	100,00
Bali	66,35	5,00	14,43	11,97	2,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,99	7,54	18,34	17,46	4,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	41,51	7,51	29,00	16,27	5,72	100,00
Kalimantan Barat	51,88	9,00	20,91	15,50	2,72	100,00
Kalimantan Tengah	48,87	7,76	20,79	20,99	1,59	100,00
Kalimantan Selatan	54,43	9,13	16,53	17,51	2,40	100,00
Kalimantan Timur	46,72	12,46	18,28	20,04	2,50	100,00
Sulawesi Utara	47,16	13,78	19,90	15,51	3,66	100,00
Sulawesi Tengah	47,23	8,49	25,27	17,75	1,26	100,00
Sulawesi Selatan	46,87	10,08	22,58	16,73	3,74	100,00
Sulawesi Tenggara	42,13	10,70	27,71	18,04	1,41	100,00
Gorontalo	50,03	7,55	19,44	20,27	2,71	100,00
Sulawesi Barat	52,59	6,84	18,99	17,83	3,75	100,00
Maluku	39,95	14,84	26,43	14,77	4,02	100,00
Maluku Utara	44,25	10,84	26,58	15,76	2,57	100,00
Papua Barat	43,39	13,32	17,32	18,79	7,18	100,00
Papua	45,43	9,16	23,23	19,48	2,70	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>51,31</b>	<b>11,01</b>	<b>18,40</b>	<b>16,37</b>	<b>2,91</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.1.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Perdesaan					
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NAD	47,36	8,52	22,40	18,17	3,54	100,00
Sumatera Utara	58,97	7,52	15,43	14,76	3,33	100,00
Sumatera Barat	53,38	7,58	18,03	17,32	3,68	100,00
Riau	51,83	6,05	14,48	25,62	2,02	100,00
Jambi	57,97	4,67	13,37	20,70	3,28	100,00
Sumatera Selatan	62,94	6,18	12,51	16,09	2,28	100,00
Bengkulu	60,10	4,66	12,91	18,48	3,85	100,00
Lampung	56,46	6,52	11,88	22,30	2,83	100,00
Bangka Belitung	58,97	4,26	9,65	24,95	2,16	100,00
Kepulauan Riau	42,46	6,24	12,71	37,08	1,51	100,00
DKI. Jakarta						
Jawa Barat	48,01	11,36	10,43	24,36	5,84	100,00
Jawa Tengah	54,63	8,80	12,99	18,83	4,74	100,00
DI. Yogyakarta	64,13	5,58	14,19	14,65	1,45	100,00
Jawa Timur	58,97	6,73	10,98	19,75	3,55	100,00
Banten	47,95	13,84	9,68	23,08	5,45	100,00
Bali	75,15	3,94	10,73	8,92	1,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	59,46	5,17	13,22	17,75	4,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	67,32	3,34	12,82	14,20	2,31	100,00
Kalimantan Barat	69,09	5,20	10,33	13,30	2,07	100,00
Kalimantan Tengah	66,49	3,77	11,63	16,60	1,52	100,00
Kalimantan Selatan	65,96	5,50	9,26	16,36	2,92	100,00
Kalimantan Timur	53,77	8,10	13,34	22,15	2,64	100,00
Sulawesi Utara	46,88	9,63	14,90	24,19	4,41	100,00
Sulawesi Tengah	63,18	5,01	10,33	19,51	1,97	100,00
Sulawesi Selatan	54,12	7,87	12,10	22,35	3,56	100,00
Sulawesi Tenggara	63,98	4,66	13,39	16,15	1,81	100,00
Gorontalo	53,53	5,04	14,79	23,72	2,92	100,00
Sulawesi Barat	60,85	4,25	13,19	18,43	3,28	100,00
Maluku	48,67	8,74	18,58	20,81	3,20	100,00
Maluku Utara	57,21	4,78	16,00	18,53	3,49	100,00
Papua Barat	59,60	5,56	16,19	15,76	2,88	100,00
Papua	73,08	3,49	11,68	9,37	2,38	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>56,50</b>	<b>7,64</b>	<b>12,48</b>	<b>19,61</b>	<b>3,76</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.1.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NAD	46,04	8,82	24,63	17,29	3,22	100,00
Sumatera Utara	54,36	9,03	18,29	15,13	3,19	100,00
Sumatera Barat	49,95	8,28	21,83	15,90	4,05	100,00
Riau	50,05	7,61	16,16	24,24	1,94	100,00
Jambi	55,68	5,43	15,47	20,45	2,97	100,00
Sumatera Selatan	57,30	8,59	14,64	17,18	2,29	100,00
Bengkulu	57,57	5,57	16,96	16,66	3,25	100,00
Lampung	54,72	7,67	14,08	20,75	2,77	100,00
Bangka Belitung	57,03	6,11	11,57	22,84	2,44	100,00
Kepulauan Riau	61,35	7,15	9,83	20,57	1,10	100,00
DKI. Jakarta	58,51	12,17	13,22	14,61	1,49	100,00
Jawa Barat	48,14	12,34	13,62	21,51	4,38	100,00
Jawa Tengah	53,81	9,11	16,00	16,65	4,44	100,00
DI. Yogyakarta	58,04	6,84	21,00	12,84	1,28	100,00
Jawa Timur	56,78	8,15	14,06	17,83	3,17	100,00
Banten	48,85	14,57	13,38	19,15	4,04	100,00
Bali	70,49	4,50	12,69	10,54	1,78	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,50	6,11	15,25	17,64	4,51	100,00
Nusa Tenggara Timur	61,84	4,23	16,26	14,64	3,03	100,00
Kalimantan Barat	64,21	6,28	13,33	13,93	2,26	100,00
Kalimantan Tengah	60,93	5,03	14,51	17,98	1,54	100,00
Kalimantan Selatan	61,57	6,89	12,03	16,80	2,72	100,00
Kalimantan Timur	49,83	10,54	16,10	20,97	2,56	100,00
Sulawesi Utara	46,99	11,29	16,89	20,72	4,11	100,00
Sulawesi Tengah	59,52	5,81	13,76	19,10	1,81	100,00
Sulawesi Selatan	51,40	8,70	16,03	20,24	3,63	100,00
Sulawesi Tenggara	58,82	6,09	16,77	16,60	1,72	100,00
Gorontalo	52,54	5,75	16,10	22,75	2,86	100,00
Sulawesi Barat	59,21	4,76	14,34	18,31	3,37	100,00
Maluku	46,01	10,60	20,98	18,96	3,45	100,00
Maluku Utara	53,36	6,58	19,14	17,71	3,22	100,00
Papua Barat	54,66	7,93	16,53	16,68	4,19	100,00
Papua	66,12	4,91	14,59	11,91	2,46	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>54,12</b>	<b>9,19</b>	<b>15,20</b>	<b>18,13</b>	<b>3,37</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.2.1 Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Perkotaan
			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Naggroe Aceh Darussalam	82,12	17,88	100,00
Sumatera Utara	82,11	17,89	100,00
Sumatera Barat	81,95	18,05	100,00
Riau	80,87	19,13	100,00
Jambi	87,40	12,60	100,00
Sumatera Selatan	77,89	22,11	100,00
Bengkulu	87,16	12,84	100,00
Lampung	81,08	18,92	100,00
Bangka Belitung	86,07	13,93	100,00
Kepulauan Riau	89,95	10,05	100,00
DKI. Jakarta	82,78	17,22	100,00
Jawa Barat	78,57	21,43	100,00
Jawa Tengah	84,74	15,26	100,00
DI. Yogyakarta	87,95	12,05	100,00
Jawa Timur	84,53	15,47	100,00
Banten	76,62	23,38	100,00
Bali	93,00	7,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	87,33	12,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	84,68	15,32	100,00
Kalimantan Barat	85,22	14,78	100,00
Kalimantan Tengah	86,29	13,71	100,00
Kalimantan Selatan	85,63	14,37	100,00
Kalimantan Timur	78,94	21,06	100,00
Sulawesi Utara	77,39	22,61	100,00
Sulawesi Tengah	84,77	15,23	100,00
Sulawesi Selatan	82,31	17,69	100,00
Sulawesi Tenggara	79,74	20,26	100,00
Gorontalo	86,89	13,11	100,00
Sulawesi Barat	88,49	11,51	100,00
Maluku	72,92	27,08	100,00
Maluku Utara	80,32	19,68	100,00
Papua Barat	76,51	23,49	100,00
Papua	83,22	16,78	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>82,33</b>	<b>17,67</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.2.2 Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Perdesaan
			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Naggroe Aceh Darussalam	84,75	15,25	100,00
Sumatera Utara	88,69	11,31	100,00
Sumatera Barat	87,56	12,44	100,00
Riau	89,55	10,45	100,00
Jambi	92,55	7,45	100,00
Sumatera Selatan	91,05	8,95	100,00
Bengkulu	92,80	7,20	100,00
Lampung	89,64	10,36	100,00
Bangka Belitung	93,26	6,74	100,00
Kepulauan Riau	87,18	12,82	100,00
DKI. Jakarta			-
Jawa Barat	80,87	19,13	100,00
Jawa Tengah	86,12	13,88	100,00
DI. Yogyakarta	92,00	8,00	100,00
Jawa Timur	89,75	10,25	100,00
Banten	77,60	22,40	100,00
Bali	95,02	4,98	100,00
Nusa Tenggara Barat	92,00	8,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	95,27	4,73	100,00
Kalimantan Barat	93,00	7,00	100,00
Kalimantan Tengah	94,63	5,37	100,00
Kalimantan Selatan	92,30	7,70	100,00
Kalimantan Timur	86,90	13,10	100,00
Sulawesi Utara	82,96	17,04	100,00
Sulawesi Tengah	92,65	7,35	100,00
Sulawesi Selatan	87,30	12,70	100,00
Sulawesi Tenggara	93,21	6,79	100,00
Gorontalo	91,39	8,61	100,00
Sulawesi Barat	93,48	6,52	100,00
Maluku	84,78	15,22	100,00
Maluku Utara	92,29	7,71	100,00
Papua Barat	91,46	8,54	100,00
Papua	95,45	4,55	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>88,08</b>	<b>11,92</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.2.3 Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)
Naggroe Aceh Darussalam	83,93	16,07	100,00
Sumatera Utara	85,75	14,25	100,00
Sumatera Barat	85,79	14,21	100,00
Riau	86,80	13,20	100,00
Jambi	91,11	8,89	100,00
Sumatera Selatan	86,96	13,04	100,00
Bengkulu	91,18	8,82	100,00
Lampung	87,71	12,29	100,00
Bangka Belitung	90,32	9,68	100,00
Kepulauan Riau	89,56	10,44	100,00
DKI. Jakarta	82,78	17,22	100,00
Jawa Barat	79,60	20,40	100,00
Jawa Tengah	85,53	14,47	100,00
DI. Yogyakarta	89,46	10,54	100,00
Jawa Timur	87,45	12,55	100,00
Banten	77,02	22,98	100,00
Bali	94,00	6,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	90,24	9,76	100,00
Nusa Tenggara Timur	93,60	6,40	100,00
Kalimantan Barat	91,09	8,91	100,00
Kalimantan Tengah	92,37	7,63	100,00
Kalimantan Selatan	89,94	10,06	100,00
Kalimantan Timur	82,54	17,46	100,00
Sulawesi Utara	80,63	19,37	100,00
Sulawesi Tengah	91,11	8,89	100,00
Sulawesi Selatan	85,52	14,48	100,00
Sulawesi Tenggara	90,62	9,38	100,00
Gorontalo	90,14	9,86	100,00
Sulawesi Barat	92,56	7,44	100,00
Maluku	81,27	18,73	100,00
Maluku Utara	89,03	10,97	100,00
Papua Barat	87,34	12,66	100,00
Papua	93,08	6,92	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>85,48</b>	<b>14,52</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.3.1 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Perkotaan	
			Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nagroe Aceh Darussalam	61,95	32,66	5,39	100,00
Sumatera Utara	53,64	38,78	7,59	100,00
Sumatera Barat	61,72	28,19	10,10	100,00
Riau	46,08	49,80	4,12	100,00
Jambi	48,11	46,65	5,24	100,00
Sumatera Selatan	46,48	47,74	5,78	100,00
Bengkulu	64,54	30,86	4,59	100,00
Lampung	53,88	39,60	6,52	100,00
Bangka Belitung	38,74	53,56	7,70	100,00
Kepulauan Riau	34,21	62,03	3,76	100,00
DKI. Jakarta	45,09	49,84	5,07	100,00
Jawa Barat	42,19	49,61	8,21	100,00
Jawa Tengah	52,81	36,51	10,69	100,00
DI. Yogyakarta	65,33	31,50	3,17	100,00
Jawa Timur	49,58	42,93	7,50	100,00
Banten	45,28	46,13	8,58	100,00
Bali	50,37	41,79	7,85	100,00
Nusa Tenggara Barat	45,32	43,14	11,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	56,88	31,90	11,22	100,00
Kalimantan Barat	53,43	39,62	6,95	100,00
Kalimantan Tengah	47,93	48,40	3,67	100,00
Kalimantan Selatan	45,36	48,07	6,57	100,00
Kalimantan Timur	44,78	49,10	6,12	100,00
Sulawesi Utara	50,93	39,71	9,37	100,00
Sulawesi Tengah	57,07	40,09	2,84	100,00
Sulawesi Selatan	52,44	38,87	8,69	100,00
Sulawesi Tenggara	58,76	38,25	2,99	100,00
Gorontalo	45,82	47,79	6,39	100,00
Sulawesi Barat	46,80	43,96	9,25	100,00
Maluku	58,45	32,66	8,90	100,00
Maluku Utara	59,18	35,09	5,73	100,00
Papua Barat	40,00	43,41	16,59	100,00
Papua	51,16	42,89	5,95	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>48,83</b>	<b>43,46</b>	<b>7,71</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.3.2 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Perdesaan	
			Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Naggroe Aceh Darussalam	50,78	41,19	8,03	100,00
Sumatera Utara	46,04	44,04	9,93	100,00
Sumatera Barat	46,20	44,38	9,43	100,00
Riau	34,38	60,82	4,80	100,00
Jambi	35,79	55,42	8,79	100,00
Sumatera Selatan	40,51	52,12	7,37	100,00
Bengkulu	36,65	52,43	10,93	100,00
Lampung	32,10	60,25	7,65	100,00
Bangka Belitung	26,25	67,87	5,88	100,00
Kepulauan Riau	24,77	72,29	2,94	100,00
DKI. Jakarta				
Jawa Barat	25,68	59,95	14,37	100,00
Jawa Tengah	35,53	51,51	12,96	100,00
DI. Yogyakarta	46,86	48,35	4,79	100,00
Jawa Timur	32,03	57,61	10,37	100,00
Banten	25,33	60,41	14,26	100,00
Bali	51,32	42,69	5,99	100,00
Nusa Tenggara Barat	37,37	50,20	12,43	100,00
Nusa Tenggara Timur	43,72	48,40	7,88	100,00
Kalimantan Barat	40,18	51,76	8,06	100,00
Kalimantan Tengah	39,09	55,80	5,11	100,00
Kalimantan Selatan	32,44	57,33	10,23	100,00
Kalimantan Timur	34,97	58,09	6,93	100,00
Sulawesi Utara	34,25	55,61	10,14	100,00
Sulawesi Tengah	32,48	61,33	6,19	100,00
Sulawesi Selatan	31,83	58,80	9,37	100,00
Sulawesi Tenggara	42,71	51,51	5,78	100,00
Gorontalo	35,70	57,25	7,05	100,00
Sulawesi Barat	37,79	52,82	9,39	100,00
Maluku	43,63	48,86	7,50	100,00
Maluku Utara	42,08	48,74	9,17	100,00
Papua Barat	46,48	45,24	8,28	100,00
Papua	49,84	39,99	10,17	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>34,82</b>	<b>54,71</b>	<b>10,47</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.3.3 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Perkotaan+Perdesaan	
			Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nagroe Aceh Darussalam	54,57	38,30	7,14	100,00
Sumatera Utara	49,96	41,32	8,72	100,00
Sumatera Barat	52,25	38,06	9,69	100,00
Riau	38,16	57,26	4,58	100,00
Jambi	39,78	52,58	7,64	100,00
Sumatera Selatan	42,93	50,35	6,73	100,00
Bengkulu	46,00	45,20	8,80	100,00
Lampung	37,44	55,19	7,37	100,00
Bangka Belitung	31,39	61,98	6,63	100,00
Kepulauan Riau	31,20	65,30	3,50	100,00
DKI. Jakarta	45,09	49,84	5,07	100,00
Jawa Barat	34,47	54,44	11,09	100,00
Jawa Tengah	43,14	44,90	11,96	100,00
DI. Yogyakarta	59,78	36,56	3,66	100,00
Jawa Timur	40,09	50,86	9,05	100,00
Banten	36,59	52,36	11,06	100,00
Bali	50,74	42,14	7,12	100,00
Nusa Tenggara Barat	40,78	47,17	12,05	100,00
Nusa Tenggara Timur	47,92	43,14	8,94	100,00
Kalimantan Barat	45,17	47,19	7,64	100,00
Kalimantan Tengah	42,64	52,83	4,53	100,00
Kalimantan Selatan	38,12	53,26	8,62	100,00
Kalimantan Timur	40,63	52,91	6,46	100,00
Sulawesi Utara	40,49	49,66	9,85	100,00
Sulawesi Tengah	39,69	55,10	5,21	100,00
Sulawesi Selatan	40,18	50,72	9,10	100,00
Sulawesi Tenggara	47,80	47,30	4,89	100,00
Gorontalo	38,60	54,54	6,86	100,00
Sulawesi Barat	39,80	50,84	9,36	100,00
Maluku	48,35	43,70	7,95	100,00
Maluku Utara	47,77	44,20	8,03	100,00
Papua Barat	44,20	44,59	11,21	100,00
Papua	50,36	41,13	8,51	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>41,42</b>	<b>49,41</b>	<b>9,17</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.4.1** **Percentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan									
	Pertanian	Pertambangan	Industri	Listrik	Konstruksi	Perdagangan	Komunikasi	Keuangan	Jasa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NAD	11,73	0,20	6,68	0,31	8,70	26,47	10,37	1,38	34,16	100,00
Sumatera Utara	9,56	0,07	16,13	0,11	8,66	35,82	9,08	2,60	17,96	100,00
Sumatera Barat	9,17	0,74	8,72	0,36	6,39	37,79	12,49	2,28	22,06	100,00
Riau	7,92	3,71	7,63	0,99	10,07	35,69	8,31	2,68	22,99	100,00
Jambi	12,96	1,15	6,96	0,62	7,43	34,40	7,97	2,00	26,50	100,00
Sumatera Selatan	10,11	0,64	6,81	0,45	9,10	38,43	11,19	1,74	21,53	100,00
Bengkulu	9,43	1,25	6,81	0,66	7,85	34,52	9,35	2,49	27,64	100,00
Lampung	7,43	0,18	10,15	0,88	9,28	35,97	12,45	1,17	22,50	100,00
Bangka Belitung	7,72	19,13	6,29	0,32	9,93	30,46	5,55	1,55	19,05	100,00
Kepulauan Riau	3,63	1,24	44,41	0,25	7,23	20,77	9,14	1,60	11,73	100,00
DKI. Jakarta	0,38	0,33	18,69	0,29	3,86	36,93	9,38	7,22	22,91	100,00
Jawa Barat	5,23	0,38	29,27	0,30	5,35	28,92	9,99	3,03	17,52	100,00
Jawa Tengah	7,57	0,33	30,48	0,24	6,63	29,59	6,55	2,42	16,19	100,00
DI. Yogyakarta	4,33	0,59	18,51	0,06	7,68	35,08	6,28	3,61	23,84	100,00
Jawa Timur	9,80	0,39	23,80	0,27	6,13	30,34	7,75	2,88	18,64	100,00
Banten	1,92	0,23	33,49	0,47	3,40	30,12	10,99	2,88	16,51	100,00
Bali	7,35	0,09	17,87	0,45	6,87	37,74	6,89	4,55	18,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	15,86	1,03	16,18	0,70	8,17	24,58	8,89	2,24	22,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,28	0,32	4,51	0,26	6,01	29,90	16,91	2,46	33,34	100,00
Kalimantan Barat	10,93	1,06	9,31	0,37	9,78	36,67	8,84	2,37	20,67	100,00
Kalimantan Tengah	16,88	2,88	3,98	0,38	9,42	29,57	8,42	2,65	25,82	100,00
Kalimantan Selatan	6,60	4,78	8,89	0,31	6,04	42,05	9,65	1,94	19,74	100,00
Kalimantan Timur	8,74	6,08	9,40	0,45	10,17	33,42	8,80	3,03	19,91	100,00
Sulawesi Utara	10,49	1,54	6,84	0,65	10,55	26,34	18,06	3,75	21,78	100,00
Sulawesi Tengah	6,06	0,69	5,14	0,45	6,89	33,47	9,47	1,57	36,27	100,00
Sulawesi Selatan	8,80	0,77	8,79	0,28	8,21	37,22	11,08	4,02	20,84	100,00
Sulawesi Tenggara	10,20	1,87	5,07	0,53	6,18	29,21	12,90	1,83	32,21	100,00
Gorontalo	7,68	0,85	7,93	0,59	9,05	22,54	18,54	2,08	30,73	100,00
Sulawesi Barat	26,10	0,32	6,11	0,19	7,54	24,94	8,88	2,49	23,44	100,00
Maluku	10,31	0,59	2,99	0,21	5,25	27,46	21,82	1,76	29,60	100,00
Maluku Utara	9,79	1,30	4,56	0,59	6,40	26,24	18,82	3,09	29,21	100,00
Papua Barat	7,78	6,11	5,85	0,17	9,10	25,04	16,35	1,24	28,37	100,00
Papua	7,44	4,21	2,02	0,40	6,21	29,11	18,18	3,48	28,95	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>6,83</b>	<b>0,76</b>	<b>21,80</b>	<b>0,33</b>	<b>6,36</b>	<b>31,86</b>	<b>9,20</b>	<b>3,25</b>	<b>19,62</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.4.2** **Percentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, Tahun 2008**

Provinsi	Perdesaan									
	Pertanian	Pertambangan	Industri	Listrik	Konstruksi	Perdagangan	Komunikasi	Keuangan	Jasa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NAD	59,46	0,62	4,59	0,16	7,22	11,45	4,97	0,30	11,24	100,00
Sumatera Utara	68,25	0,61	5,42	0,18	4,02	11,16	4,11	0,35	5,90	100,00
Sumatera Barat	56,39	1,31	7,34	0,18	4,08	15,68	7,37	0,53	7,12	100,00
Riau	62,37	1,72	4,91	0,15	4,11	11,46	4,91	0,30	10,08	100,00
Jambi	70,87	1,08	3,54	0,20	2,92	10,53	4,61	0,38	5,88	100,00
Sumatera Selatan	77,74	1,02	4,89	0,05	1,61	7,21	3,43	0,14	3,92	100,00
Bengkulu	75,08	0,86	2,40	0,13	2,97	8,10	2,75	0,76	6,94	100,00
Lampung	63,56	0,47	9,83	0,03	3,76	11,91	4,40	0,40	5,63	100,00
Bangka Belitung	44,80	32,57	2,62	0,04	2,50	10,21	1,78	0,23	5,23	100,00
Kepulauan Riau	49,59	2,64	6,49	0,59	5,47	13,96	3,61	0,47	17,19	100,00
DKI. Jakarta										
Jawa Barat	30,93	0,79	20,09	0,11	7,12	22,18	9,82	0,66	8,29	100,00
Jawa Tengah	42,46	1,27	18,02	0,13	8,96	16,06	4,04	0,90	8,17	100,00
DI. Yogyakarta	34,70	1,40	13,57	0,08	11,75	21,31	3,41	2,30	11,49	100,00
Jawa Timur	54,66	0,97	12,66	0,07	6,30	13,89	3,72	0,74	6,98	100,00
Banten	36,09	1,38	15,97	0,27	5,02	22,42	9,39	0,66	8,80	100,00
Bali	46,59	1,14	14,74	0,14	7,50	17,85	3,50	2,34	6,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,51	2,98	9,80	0,08	4,89	11,05	7,09	0,59	7,01	100,00
Nusa Tenggara Timur	76,65	1,14	6,80	0,09	2,17	3,61	5,36	0,24	3,95	100,00
Kalimantan Barat	76,20	2,75	3,55	0,18	2,35	8,58	2,51	0,21	3,68	100,00
Kalimantan Tengah	73,46	6,51	3,72	0,18	2,94	6,93	2,60	0,15	3,51	100,00
Kalimantan Selatan	64,19	3,55	6,36	0,11	3,28	13,19	3,52	0,27	5,53	100,00
Kalimantan Timur	58,67	6,96	3,99	0,38	4,32	10,84	5,31	0,61	8,91	100,00
Sulawesi Utara	51,55	2,85	4,39	0,20	7,19	13,80	9,10	1,54	9,37	100,00
Sulawesi Tengah	68,82	0,99	4,16	0,16	4,05	10,08	3,63	0,34	7,77	100,00
Sulawesi Selatan	68,48	0,58	5,30	0,12	4,67	10,09	5,44	0,50	4,82	100,00
Sulawesi Tenggara	64,89	1,32	5,11	0,19	4,05	11,16	5,18	0,30	7,79	100,00
Gorontalo	54,34	2,02	8,70	0,14	5,57	10,16	7,72	0,89	10,47	100,00
Sulawesi Barat	69,64	0,84	5,20	0,19	2,65	11,15	2,51	0,16	7,64	100,00
Maluku	74,29	0,28	6,44	0,18	2,77	6,06	4,25	0,05	5,67	100,00
Maluku Utara	72,17	2,41	3,53	0,04	3,41	7,00	5,30	0,17	5,97	100,00
Papua Barat	73,89	1,52	3,00	0,08	2,57	5,26	4,64	1,11	7,92	100,00
Papua	86,21	1,47	1,66	0,12	0,93	3,66	2,11	0,36	3,48	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>55,92</b>	<b>1,51</b>	<b>10,82</b>	<b>0,12</b>	<b>5,41</b>	<b>13,56</b>	<b>5,10</b>	<b>0,60</b>	<b>6,96</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.4.3** **Percentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan									
	Pertanian	Pertambangan	Industri	Listrik	Konstruksi	Perdagangan	Komunikasi	Keuangan	Jasa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NAD	44,92	0,49	5,23	0,20	7,67	16,02	6,61	0,63	18,22	100,00
Sumatera Utara	43,17	0,38	10,00	0,15	6,00	21,70	6,24	1,31	11,05	100,00
Sumatera Barat	42,12	1,14	7,76	0,24	4,78	22,36	8,92	1,06	11,63	100,00
Riau	46,28	2,31	5,71	0,40	5,87	18,62	5,91	1,00	13,90	100,00
Jambi	55,40	1,10	4,45	0,31	4,12	16,91	5,51	0,81	11,39	100,00
Sumatera Selatan	58,93	0,92	5,42	0,16	3,69	15,89	5,59	0,58	8,82	100,00
Bengkulu	57,09	0,97	3,61	0,27	4,31	15,34	4,56	1,23	12,61	100,00
Lampung	51,84	0,41	9,90	0,21	4,91	16,93	6,08	0,56	9,15	100,00
Bangka Belitung	30,35	27,33	4,05	0,15	5,40	18,10	3,25	0,74	10,62	100,00
Kepulauan Riau	9,86	1,43	39,27	0,30	6,99	19,85	8,39	1,44	12,47	100,00
DKI. Jakarta	0,38	0,33	18,69	0,29	3,86	36,93	9,38	7,22	22,91	100,00
Jawa Barat	16,88	0,57	25,11	0,21	6,15	25,87	9,92	1,96	13,33	100,00
Jawa Tengah	27,66	0,87	23,30	0,18	7,97	21,80	5,11	1,54	11,57	100,00
DI. Yogyakarta	16,02	0,90	16,61	0,07	9,25	29,79	5,18	3,11	19,09	100,00
Jawa Timur	35,55	0,72	17,41	0,15	6,23	20,90	5,44	1,65	11,95	100,00
Banten	15,91	0,70	26,32	0,39	4,06	26,97	10,33	1,97	13,35	100,00
Bali	27,03	0,62	16,30	0,30	7,19	27,76	5,19	3,44	12,18	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,69	2,27	12,12	0,30	6,08	15,98	7,75	1,19	12,60	100,00
Nusa Tenggara Timur	66,62	1,03	6,47	0,11	2,72	7,35	7,01	0,55	8,14	100,00
Kalimantan Barat	61,23	2,37	4,87	0,22	4,05	15,02	3,96	0,70	7,57	100,00
Kalimantan Tengah	59,15	5,59	3,79	0,23	4,58	12,66	4,07	0,78	9,16	100,00
Kalimantan Selatan	44,80	3,96	7,21	0,18	4,20	22,91	5,58	0,83	10,32	100,00
Kalimantan Timur	32,48	6,50	6,83	0,42	7,39	22,69	7,14	1,88	14,68	100,00
Sulawesi Utara	35,09	2,32	5,37	0,38	8,53	18,83	12,70	2,43	14,35	100,00
Sulawesi Tengah	57,39	0,93	4,34	0,21	4,57	14,34	4,70	0,56	12,96	100,00
Sulawesi Selatan	48,03	0,64	6,50	0,18	5,88	19,38	7,37	1,71	10,31	100,00
Sulawesi Tenggara	55,64	1,41	5,10	0,25	4,41	14,22	6,49	0,56	11,92	100,00
Gorontalo	41,83	1,71	8,49	0,26	6,51	13,48	10,62	1,21	15,90	100,00
Sulawesi Barat	61,97	0,75	5,36	0,19	3,51	13,58	3,63	0,57	10,42	100,00
Maluku	57,30	0,36	5,53	0,19	3,43	11,74	8,91	0,51	12,03	100,00
Maluku Utara	56,82	2,14	3,78	0,17	4,15	11,74	8,63	0,89	11,69	100,00
Papua Barat	57,90	2,63	3,69	0,11	4,15	10,04	7,47	1,14	12,86	100,00
Papua	72,60	1,94	1,72	0,17	1,84	8,06	4,89	0,90	7,88	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>34,56</b>	<b>1,18</b>	<b>15,60</b>	<b>0,21</b>	<b>5,82</b>	<b>21,52</b>	<b>6,89</b>	<b>1,75</b>	<b>12,47</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.5.1 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status pekerjaan Utama, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan						
	Berusaha Sendiri	Brsh Dbnt Brh tdk Ttp	Brsh Dbnt Brh Ttp	Buruh/Karya- wan Dibayar	Pekerja Bebas	Pekerja Tak Di bayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)
NAD	21,82	9,05	4,28	45,65	8,10	11,10	100,00
Sumatera Utara	20,29	7,94	2,56	52,42	5,87	10,93	100,00
Sumatera Barat	24,34	7,40	3,26	45,83	8,50	10,68	100,00
Riau	21,26	7,38	3,32	58,67	3,96	5,40	100,00
Jambi	21,00	9,45	3,38	51,44	5,95	8,78	100,00
Sumatera Selatan	23,09	8,10	1,42	51,17	7,09	9,13	100,00
Bengkulu	21,93	8,99	4,35	45,70	7,32	11,71	100,00
Lampung	20,04	8,97	2,99	47,56	12,48	7,97	100,00
Bangka Belitung	22,70	5,53	5,37	54,17	5,33	6,91	100,00
Kepulauan Riau	17,63	6,32	1,30	70,34	2,50	1,91	100,00
DKI. Jakarta	17,34	6,13	2,24	67,90	1,48	4,91	100,00
Jawa Barat	21,63	7,83	2,00	54,37	7,93	6,23	100,00
Jawa Tengah	19,40	8,93	2,15	48,44	10,19	10,90	100,00
DI. Yogyakarta	16,91	8,98	4,50	54,73	5,43	9,46	100,00
Jawa Timur	17,64	8,81	2,42	52,03	7,57	11,54	100,00
Banten	20,12	8,22	1,78	63,11	2,81	3,96	100,00
Bali	14,23	12,10	2,77	55,03	4,85	11,02	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,10	10,38	2,29	31,09	19,43	15,71	100,00
Nusa Tenggara Timur	23,64	11,00	3,47	49,22	1,90	10,77	100,00
Kalimantan Barat	16,04	7,83	2,99	59,37	3,86	9,90	100,00
Kalimantan Tengah	21,27	9,44	2,59	46,86	4,05	15,80	100,00
Kalimantan Selatan	21,38	11,52	2,24	47,58	5,20	12,09	100,00
Kalimantan Timur	14,84	9,08	2,25	63,27	3,85	6,70	100,00
Sulawesi Utara	25,55	8,16	1,63	50,66	8,52	5,48	100,00
Sulawesi Tengah	19,01	9,91	2,26	51,62	4,16	13,03	100,00
Sulawesi Selatan	16,89	8,82	3,52	53,60	4,82	12,35	100,00
Sulawesi Tenggara	21,58	10,89	2,72	46,21	4,50	14,09	100,00
Gorontalo	27,45	5,35	2,51	50,44	8,84	5,40	100,00
Sulawesi Barat	26,93	10,08	2,55	37,24	6,61	16,59	100,00
Maluku	26,61	9,55	2,07	46,67	3,21	11,89	100,00
Maluku Utara	29,71	7,44	3,36	44,11	3,14	12,23	100,00
Papua Barat	22,64	9,78	3,72	55,70	4,07	4,11	100,00
Papua	25,81	4,81	3,31	55,93	2,18	7,96	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>19,58</b>	<b>8,28</b>	<b>2,40</b>	<b>54,46</b>	<b>6,61</b>	<b>8,68</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.5.2 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status pekerjaan Utama, Tahun 2008**

Provinsi	Perdesaan						
	Berusaha Sendiri	Brsh Dbnt Brh tdk Ttp	Brsh Dbnt Brh Ttp	Buruh/Karyawan Dibayar	Pekerja Bebas	Pekerja Tak Di bayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)
NAD	19,68	15,95	2,74	27,75	8,78	25,10	100,00
Sumatera Utara	13,89	14,62	1,24	19,54	12,97	37,74	100,00
Sumatera Barat	20,88	13,94	2,54	18,40	17,03	27,20	100,00
Riau	25,85	9,95	2,72	31,23	12,71	17,53	100,00
Jambi	22,52	13,45	1,75	23,73	9,75	28,80	100,00
Sumatera Selatan	14,59	19,54	1,08	16,18	10,32	38,28	100,00
Bengkulu	16,62	20,79	1,09	14,57	8,60	38,33	100,00
Lampung	13,13	18,09	1,73	15,39	15,50	36,16	100,00
Bangka Belitung	25,53	9,31	6,14	28,57	13,10	17,36	100,00
Kepulauan Riau	34,41	6,47	0,94	34,84	11,14	12,20	100,00
DKI. Jakarta							-
Jawa Barat	23,93	12,43	1,62	26,92	22,08	13,02	100,00
Jawa Tengah	15,36	13,69	1,35	24,09	19,87	25,64	100,00
DI. Yogyakarta	15,70	16,67	2,14	27,28	13,79	24,42	100,00
Jawa Timur	13,50	14,35	1,89	20,02	17,22	33,02	100,00
Banten	22,71	15,04	1,71	29,58	17,12	13,84	100,00
Bali	13,44	17,96	1,22	24,75	13,13	29,50	100,00
Nusa Tenggara Barat	15,83	16,69	1,52	10,66	25,98	29,32	100,00
Nusa Tenggara Timur	12,19	25,39	0,88	8,64	2,89	50,01	100,00
Kalimantan Barat	16,55	21,71	0,90	17,58	3,98	39,28	100,00
Kalimantan Tengah	17,42	17,44	1,50	20,21	6,74	36,69	100,00
Kalimantan Selatan	18,68	16,94	1,41	20,35	8,07	34,55	100,00
Kalimantan Timur	18,86	12,79	1,93	36,88	5,42	24,11	100,00
Sulawesi Utara	28,65	11,45	2,16	23,93	17,10	16,69	100,00
Sulawesi Tengah	16,61	21,31	1,83	13,84	9,56	36,85	100,00
Sulawesi Selatan	14,32	21,88	2,05	14,91	8,84	38,00	100,00
Sulawesi Tenggara	14,06	19,33	1,75	15,11	7,05	42,70	100,00
Gorontalo	25,51	12,46	1,82	21,40	17,06	21,75	100,00
Sulawesi Barat	16,90	23,31	1,51	15,98	7,19	35,12	100,00
Maluku	24,83	19,24	1,44	13,66	2,38	38,44	100,00
Maluku Utara	20,45	18,97	2,31	13,66	8,18	36,43	100,00
Papua Barat	14,94	24,34	1,46	17,92	2,33	38,99	100,00
Papua	12,11	28,03	0,60	8,01	2,15	49,10	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>17,11</b>	<b>16,03</b>	<b>1,64</b>	<b>20,87</b>	<b>14,58</b>	<b>29,76</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.5.3 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status pekerjaan Utama, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						
	Berusaha Sendiri	Brsh Dbnt Brh tdk Ttp	Brsh Dbnt Brh Ttp	Buruh/Karya- wan Dibayar	Pekerja Bebas	Pekerja Tak Di bayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)
NAD	20,33	13,85	3,20	33,20	8,57	20,84	100,00
Sumatera Utara	16,62	11,77	1,80	33,59	9,93	26,28	100,00
Sumatera Barat	21,92	11,96	2,76	26,69	14,45	22,21	100,00
Riau	24,50	9,19	2,90	39,34	10,12	13,95	100,00
Jambi	22,11	12,38	2,19	31,14	8,74	23,45	100,00
Sumatera Selatan	16,95	16,36	1,18	25,92	9,42	30,17	100,00
Bengkulu	18,07	17,56	1,98	23,10	8,25	31,04	100,00
Lampung	14,57	16,19	1,99	22,11	14,87	30,27	100,00
Bangka Belitung	24,43	7,84	5,84	38,54	10,07	13,28	100,00
Kepulauan Riau	19,91	6,34	1,25	65,53	3,67	3,30	100,00
DKI. Jakarta	17,34	6,13	2,24	67,90	1,48	4,91	100,00
Jawa Barat	22,68	9,91	1,83	41,93	14,34	9,31	100,00
Jawa Tengah	17,07	11,67	1,69	34,42	15,76	19,38	100,00
DI. Yogyakarta	16,44	11,94	3,59	44,17	8,65	15,22	100,00
Jawa Timur	15,26	11,99	2,11	33,66	13,11	23,87	100,00
Banten	21,18	11,01	1,75	49,38	8,67	8,00	100,00
Bali	13,83	15,04	1,99	39,84	9,00	20,29	100,00
Nusa Tenggara Barat	17,75	14,39	1,80	18,11	23,59	24,36	100,00
Nusa Tenggara Timur	13,82	23,34	1,25	14,42	2,74	44,42	100,00
Kalimantan Barat	16,44	18,53	1,38	27,17	3,95	32,54	100,00
Kalimantan Tengah	18,39	15,42	1,78	26,95	6,06	31,40	100,00
Kalimantan Selatan	19,59	15,11	1,69	29,51	7,10	26,99	100,00
Kalimantan Timur	16,75	10,84	2,10	50,73	4,60	14,98	100,00
Sulawesi Utara	27,41	10,13	1,95	34,65	13,66	12,20	100,00
Sulawesi Tengah	17,05	19,23	1,91	20,72	8,58	32,51	100,00
Sulawesi Selatan	15,20	17,41	2,55	28,17	7,46	29,21	100,00
Sulawesi Tenggara	15,33	17,91	1,91	20,37	6,62	37,86	100,00
Gorontalo	26,03	10,55	2,01	29,18	14,85	17,37	100,00
Sulawesi Barat	18,66	20,98	1,69	19,72	7,09	31,85	100,00
Maluku	25,31	16,67	1,60	22,43	2,60	31,40	100,00
Maluku Utara	22,73	16,13	2,57	21,16	6,94	30,47	100,00
Papua Barat	16,80	20,82	2,01	27,06	2,75	30,56	100,00
Papua	14,48	24,01	1,07	16,29	2,16	41,99	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>18,18</b>	<b>12,66</b>	<b>1,97</b>	<b>35,48</b>	<b>11,11</b>	<b>20,59</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.6.1 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Jumlah Jam Kerja (Jam)					Perkotaan Jumlah (7)
	0*)	1 - 9	10 - 24	25 - 34	35+	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NAD	0,53	0,65	10,07	14,70	74,04	100,00
Sumatera Utara	0,64	0,76	7,94	6,73	83,93	100,00
Sumatera Barat	1,65	2,75	10,08	10,62	74,89	100,00
Riau	0,39	0,76	7,13	6,81	84,91	100,00
Jambi	0,57	0,68	5,61	9,81	83,33	100,00
Sumatera Selatan	1,26	1,37	8,70	8,75	79,92	100,00
Bengkulu	1,12	1,32	8,86	9,68	79,02	100,00
Lampung	1,66	1,23	8,45	9,09	79,57	100,00
Bangka Belitung	1,59	1,75	8,64	8,87	79,15	100,00
Kepulauan Riau	0,85	0,63	2,46	3,10	92,95	100,00
DKI. Jakarta	0,59	0,60	3,73	3,62	91,45	100,00
Jawa Barat	1,34	1,30	6,19	5,98	85,18	100,00
Jawa Tengah	1,16	0,99	7,72	8,67	81,46	100,00
DI. Yogyakarta	2,61	1,21	5,98	6,67	83,53	100,00
Jawa Timur	1,18	1,66	9,51	7,98	79,67	100,00
Banten	0,64	0,64	4,46	6,32	87,94	100,00
Bali	2,22	2,20	11,19	10,47	73,92	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,30	2,84	16,88	15,57	62,41	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,69	1,74	8,28	6,59	79,69	100,00
Kalimantan Barat	1,89	1,89	10,23	8,23	77,77	100,00
Kalimantan Tengah	1,45	1,07	7,28	9,05	81,15	100,00
Kalimantan Selatan	2,57	2,41	9,76	9,32	75,93	100,00
Kalimantan Timur	1,34	0,79	5,54	6,45	85,88	100,00
Sulawesi Utara	1,87	1,77	6,24	6,39	83,73	100,00
Sulawesi Tengah	2,18	1,89	8,19	8,18	79,55	100,00
Sulawesi Selatan	2,18	1,95	7,67	7,25	80,95	100,00
Sulawesi Tenggara	2,00	2,88	11,52	12,14	71,47	100,00
Gorontalo	2,28	1,35	6,83	9,49	80,05	100,00
Sulawesi Barat	3,28	1,45	13,42	13,25	68,61	100,00
Maluku	2,26	3,41	10,65	8,59	75,09	100,00
Maluku Utara	3,66	1,73	10,16	11,81	72,63	100,00
Papua Barat	0,62	1,27	7,73	7,41	82,96	100,00
Papua	1,42	0,43	5,26	7,42	85,47	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>7,30</b>	<b>7,25</b>	<b>82,94</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.6.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Jumlah Jam Kerja (Jam)					Perdesaan Jumlah (7)
	0*)	1 - 9	10 - 24	25 - 34	35+	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NAD	1,88	2,60	19,80	19,37	56,35	100,00
Sumatera Utara	1,23	2,98	19,15	16,85	59,79	100,00
Sumatera Barat	1,93	3,01	18,12	16,65	60,29	100,00
Riau	1,28	3,06	20,65	17,91	57,12	100,00
Jambi	1,34	1,42	20,83	21,43	54,97	100,00
Sumatera Selatan	1,62	2,14	23,32	23,90	49,02	100,00
Bengkulu	1,79	1,96	17,66	18,82	59,78	100,00
Lampung	2,20	3,09	20,18	14,70	59,83	100,00
Bangka Belitung	3,03	1,71	17,92	16,24	61,10	100,00
Kepulauan Riau	2,37	3,48	23,11	16,84	54,21	100,00
DKI. Jakarta						-
Jawa Barat	2,07	1,82	13,20	12,89	70,03	100,00
Jawa Tengah	1,70	2,37	16,85	13,67	65,41	100,00
DI. Yogyakarta	0,65	2,03	13,22	13,27	70,83	100,00
Jawa Timur	1,47	2,97	19,89	15,64	60,03	100,00
Banten	5,40	1,30	11,77	12,65	68,88	100,00
Bali	2,02	2,58	15,32	14,33	65,75	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,39	6,88	24,25	17,07	48,42	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,40	2,44	24,78	21,49	47,88	100,00
Kalimantan Barat	1,68	1,95	20,74	17,39	58,24	100,00
Kalimantan Tengah	1,01	0,46	13,19	18,25	67,09	100,00
Kalimantan Selatan	2,21	2,64	19,71	18,80	56,63	100,00
Kalimantan Timur	1,00	2,09	13,69	14,65	68,57	100,00
Sulawesi Utara	0,88	1,68	14,45	14,36	68,62	100,00
Sulawesi Tengah	2,25	4,53	21,74	17,99	53,49	100,00
Sulawesi Selatan	2,90	4,72	22,95	17,85	51,58	100,00
Sulawesi Tenggara	2,65	5,07	23,27	17,66	51,36	100,00
Gorontalo	2,24	3,46	16,44	12,70	65,17	100,00
Sulawesi Barat	2,95	4,54	24,08	21,74	46,69	100,00
Maluku	1,59	4,09	19,08	20,96	54,29	100,00
Maluku Utara	2,40	3,64	23,25	19,02	51,68	100,00
Papua Barat	0,73	0,95	16,06	24,68	57,58	100,00
Papua	0,61	0,48	11,37	23,65	63,89	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>1,95</b>	<b>2,67</b>	<b>18,46</b>	<b>16,36</b>	<b>60,55</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.6.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2008**

Provinsi	Jumlah Jam Kerja (Jam)					Jumlah (7)	Perkotaan+Perdesaan
	0*)	1 - 9	10 - 24	25 - 34	35+		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
NAD	1,47	2,00	16,84	17,95	61,74	100,00	
Sumatera Utara	0,98	2,03	14,36	12,53	70,11	100,00	
Sumatera Barat	1,85	2,93	15,69	14,83	64,70	100,00	
Riau	1,01	2,38	16,65	14,63	65,33	100,00	
Jambi	1,14	1,22	16,76	18,32	62,55	100,00	
Sumatera Selatan	1,52	1,93	19,25	19,69	57,61	100,00	
Bengkulu	1,60	1,78	15,25	16,32	65,05	100,00	
Lampung	2,09	2,70	17,73	13,53	63,95	100,00	
Bangka Belitung	2,47	1,73	14,30	13,37	68,13	100,00	
Kepulauan Riau	1,05	1,02	5,26	4,96	87,70	100,00	
DKI. Jakarta	0,59	0,60	3,73	3,62	91,45	100,00	
Jawa Barat	1,67	1,54	9,36	9,11	78,32	100,00	
Jawa Tengah	1,47	1,78	12,98	11,55	72,22	100,00	
DI. Yogyakarta	1,86	1,52	8,77	9,21	78,64	100,00	
Jawa Timur	1,35	2,42	15,47	12,38	68,40	100,00	
Banten	2,59	0,91	7,45	8,92	80,13	100,00	
Bali	2,12	2,39	13,26	12,41	69,82	100,00	
Nusa Tenggara Barat	2,99	5,41	21,56	16,52	53,52	100,00	
Nusa Tenggara Timur	3,44	2,34	22,43	19,37	52,42	100,00	
Kalimantan Barat	1,73	1,94	18,32	15,28	62,72	100,00	
Kalimantan Tengah	1,12	0,62	11,70	15,92	70,64	100,00	
Kalimantan Selatan	2,33	2,56	16,36	15,61	63,13	100,00	
Kalimantan Timur	1,18	1,41	9,41	10,35	77,65	100,00	
Sulawesi Utara	1,28	1,72	11,16	11,17	74,68	100,00	
Sulawesi Tengah	2,24	4,05	19,27	16,20	58,23	100,00	
Sulawesi Selatan	2,65	3,77	17,71	14,22	61,64	100,00	
Sulawesi Tenggara	2,54	4,70	21,28	16,73	54,76	100,00	
Gorontalo	2,25	2,89	13,87	11,84	69,15	100,00	
Sulawesi Barat	3,01	4,00	22,20	20,25	50,55	100,00	
Maluku	1,77	3,91	16,84	17,67	59,81	100,00	
Maluku Utara	2,71	3,17	20,03	17,25	56,84	100,00	
Papua Barat	0,70	1,03	14,05	20,51	63,72	100,00	
Papua	0,75	0,47	10,32	20,85	67,62	100,00	
<b>INDONESIA</b>	<b>1,64</b>	<b>2,06</b>	<b>13,61</b>	<b>12,40</b>	<b>70,29</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

Catatan : \*) Sementara tidak bekerja selama seminggu yg lalu

**Tabel 5.7.1 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008**

Provinsi	Tdk/Blm Per-nah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Perkotaan	
						Perguruan Tinggi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	0,44	2,36	13,04	21,87	44,60	17,69	100,00
Sumatera Utara	0,10	2,90	14,07	24,97	47,54	10,41	100,00
Sumatera Barat	0,13	4,95	13,61	24,08	40,32	16,91	100,00
Riau	0,14	2,12	12,71	23,09	48,81	13,14	100,00
Jambi	0,09	4,60	16,04	20,47	46,58	12,22	100,00
Sumatera Selatan	0,63	5,70	18,86	20,82	41,09	12,90	100,00
Bengkulu	-	1,31	12,78	22,54	46,53	16,84	100,00
Lampung	0,27	4,87	20,11	25,56	37,79	11,38	100,00
Bangka Belitung	0,48	5,66	20,27	22,29	40,49	10,82	100,00
Kepulauan Riau	0,53	2,77	9,34	15,44	60,94	10,99	100,00
DKI. Jakarta	0,04	2,67	15,41	22,57	42,92	16,38	100,00
Jawa Barat	0,26	3,19	23,97	25,74	36,22	10,62	100,00
Jawa Tengah	0,30	3,14	24,35	27,46	34,60	10,15	100,00
DI. Yogyakarta	0,35	2,17	11,86	23,84	45,22	16,56	100,00
Jawa Timur	0,43	2,50	19,58	26,65	40,24	10,61	100,00
Banten	0,17	3,34	19,09	25,48	41,09	10,83	100,00
Bali	0,40	2,56	16,68	20,91	43,97	15,49	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,28	9,45	29,99	21,69	26,44	9,15	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,38	7,73	22,72	17,52	38,90	12,76	100,00
Kalimantan Barat	1,58	6,59	25,19	19,76	36,00	10,87	100,00
Kalimantan Tengah	0,22	5,51	22,15	23,37	36,77	11,98	100,00
Kalimantan Selatan	0,52	5,27	21,38	26,46	36,36	10,01	100,00
Kalimantan Timur	0,29	4,28	13,64	20,38	48,19	13,21	100,00
Sulawesi Utara	0,25	6,31	16,26	20,96	44,90	11,32	100,00
Sulawesi Tengah	0,71	3,63	16,61	20,03	41,36	17,66	100,00
Sulawesi Selatan	0,90	6,81	19,61	20,23	37,65	14,80	100,00
Sulawesi Tenggara	0,29	5,51	13,61	18,86	42,83	18,89	100,00
Gorontalo	0,36	10,92	24,40	16,53	34,00	13,79	100,00
Sulawesi Barat	1,21	10,61	28,83	17,96	30,11	11,27	100,00
Maluku	0,44	3,29	11,75	17,57	47,07	19,87	100,00
Maluku Utara	0,17	5,06	10,43	19,62	47,09	17,63	100,00
Papua Barat	-	2,96	9,92	21,83	51,96	13,33	100,00
Papua	0,29	5,63	10,46	22,12	45,04	16,46	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>0,36</b>	<b>3,47</b>	<b>19,61</b>	<b>24,46</b>	<b>40,03</b>	<b>12,07</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.7.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008**

Provinsi	Perdesaan						
	Tdk/Blm Per-nah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Diploma IV/ S1/S2/S3	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	0,86	5,92	29,56	29,72	27,50	6,43	100,00
Sumatera Utara	1,35	7,84	28,44	30,56	28,23	3,59	100,00
Sumatera Barat	0,44	10,15	33,53	27,67	23,37	4,84	100,00
Riau	0,86	8,63	36,38	27,40	21,79	4,94	100,00
Jambi	1,05	9,02	39,49	28,22	18,14	4,08	100,00
Sumatera Selatan	0,69	11,20	46,73	22,75	16,32	2,31	100,00
Bengkulu	1,14	9,31	38,64	26,13	21,21	3,57	100,00
Lampung	0,56	8,29	37,95	31,99	18,59	2,62	100,00
Bangka Belitung	2,11	16,06	46,01	17,80	15,90	2,13	100,00
Kepulauan Riau	4,71	12,04	46,52	16,22	16,14	4,37	100,00
DKI. Jakarta							
Jawa Barat	0,55	7,64	54,06	22,02	13,42	2,31	100,00
Jawa Tengah	0,74	5,90	46,18	28,72	15,03	3,43	100,00
DI. Yogyakarta	0,30	3,35	27,64	31,54	30,48	6,70	100,00
Jawa Timur	2,45	6,82	43,04	26,75	17,71	3,24	100,00
Banten	0,41	13,67	52,69	17,19	13,55	2,49	100,00
Bali	2,59	6,47	32,83	27,35	26,51	4,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,04	15,04	36,37	21,65	19,16	2,74	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,45	17,52	53,09	14,10	10,13	1,71	100,00
Kalimantan Barat	3,10	15,81	42,91	22,07	14,30	1,81	100,00
Kalimantan Tengah	0,51	9,03	49,29	25,59	13,56	2,02	100,00
Kalimantan Selatan	0,77	14,62	45,78	22,77	13,69	2,37	100,00
Kalimantan Timur	1,31	10,68	34,68	23,41	26,04	3,89	100,00
Sulawesi Utara	0,12	10,77	30,59	25,17	28,72	4,63	100,00
Sulawesi Tengah	2,04	9,95	45,47	23,79	15,46	3,29	100,00
Sulawesi Selatan	4,00	12,09	40,15	23,37	17,05	3,34	100,00
Sulawesi Tenggara	1,64	9,92	36,21	26,41	20,81	5,00	100,00
Gorontalo	1,44	28,06	42,63	13,55	11,75	2,58	100,00
Sulawesi Barat	4,39	14,60	43,43	19,72	14,12	3,74	100,00
Maluku	1,05	9,81	35,40	24,77	25,31	3,65	100,00
Maluku Utara	0,62	12,71	38,52	22,56	21,12	4,48	100,00
Papua Barat	13,16	8,98	31,67	24,75	17,47	3,97	100,00
Papua	30,32	14,49	29,73	13,20	10,08	2,18	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>2,06</b>	<b>9,27</b>	<b>42,72</b>	<b>25,13</b>	<b>17,63</b>	<b>3,20</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.7.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						
	Tdk/Blm Per-nah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Diploma IV/ S1/S2/S3	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	0,73	4,84	24,53	27,33	32,71	9,86	100,00
Sumatera Utara	0,82	5,73	22,30	28,17	36,48	6,50	100,00
Sumatera Barat	0,35	8,58	27,51	26,58	28,49	8,49	100,00
Riau	0,65	6,71	29,38	26,13	29,77	7,36	100,00
Jambi	0,79	7,84	33,22	26,15	25,74	6,26	100,00
Sumatera Selatan	0,68	9,67	38,98	22,21	23,21	5,25	100,00
Bengkulu	0,83	7,12	31,55	25,14	28,15	7,21	100,00
Lampung	0,50	7,58	34,22	30,65	22,60	4,45	100,00
Bangka Belitung	1,47	12,01	35,98	19,55	25,48	5,51	100,00
Kepulauan Riau	1,09	4,03	14,38	15,54	54,86	10,09	100,00
DKI. Jakarta	0,04	2,67	15,41	22,57	42,92	16,38	100,00
Jawa Barat	0,39	5,20	37,61	24,06	25,89	6,85	100,00
Jawa Tengah	0,56	4,73	36,92	28,18	23,33	6,28	100,00
DI. Yogyakarta	0,33	2,62	17,93	26,80	39,55	12,77	100,00
Jawa Timur	1,59	4,98	33,04	26,71	27,31	6,38	100,00
Banten	0,27	7,57	32,85	22,08	29,81	7,42	100,00
Bali	1,50	4,52	24,78	24,14	35,21	9,86	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,40	13,00	34,05	21,66	21,82	5,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,01	16,12	48,76	14,59	14,23	3,28	100,00
Kalimantan Barat	2,75	13,70	38,84	21,54	19,28	3,89	100,00
Kalimantan Tengah	0,43	8,14	42,43	25,03	19,43	4,54	100,00
Kalimantan Selatan	0,69	11,47	37,57	24,01	21,32	4,94	100,00
Kalimantan Timur	0,77	7,32	23,64	21,82	37,66	8,78	100,00
Sulawesi Utara	0,18	8,98	24,84	23,48	35,21	7,31	100,00
Sulawesi Tengah	1,80	8,80	40,21	23,11	20,18	5,90	100,00
Sulawesi Selatan	2,94	10,28	33,11	22,30	24,10	7,27	100,00
Sulawesi Tenggara	1,41	9,17	32,39	25,13	24,54	7,35	100,00
Gorontalo	1,15	23,46	37,74	14,35	17,71	5,58	100,00
Sulawesi Barat	3,83	13,90	40,86	19,41	16,93	5,06	100,00
Maluku	0,89	8,08	29,12	22,86	31,09	7,96	100,00
Maluku Utara	0,51	10,82	31,60	21,83	27,51	7,72	100,00
Papua Barat	9,98	7,53	26,41	24,04	25,81	6,23	100,00
Papua	25,13	12,96	26,40	14,75	16,12	4,65	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>1,32</b>	<b>6,75</b>	<b>32,66</b>	<b>24,83</b>	<b>27,37</b>	<b>7,06</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.8.1 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan								Jumlah
	< 300.000	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 2.499.999	2.500.000 +		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
NAD	4,15	14,12	14,58	16,05	23,89	21,30	5,91	100,00	
Sumatera Utara	5,14	13,46	26,58	24,74	18,27	9,25	2,55	100,00	
Sumatera Barat	17,03	16,37	21,55	11,53	15,41	14,29	3,84	100,00	
Riau	6,33	11,56	26,13	16,51	16,35	16,61	6,51	100,00	
Jambi	10,51	16,76	21,33	12,52	19,57	15,42	3,89	100,00	
Sumatera Selatan	9,29	16,18	21,28	21,97	14,77	12,42	4,09	100,00	
Bengkulu	6,58	17,18	24,55	14,90	15,21	17,40	4,18	100,00	
Lampung	10,68	23,72	29,67	12,62	10,12	10,87	2,32	100,00	
Bangka Belitung	7,54	12,19	17,59	17,08	23,42	17,92	4,26	100,00	
Kepulauan Riau	5,53	6,20	10,38	21,76	20,75	25,17	10,20	100,00	
DKI. Jakarta	2,91	7,77	18,67	21,85	23,08	16,60	9,12	100,00	
Jawa Barat	7,64	16,74	19,78	23,57	17,93	10,60	3,74	100,00	
Jawa Tengah	19,35	27,27	28,26	11,97	6,99	4,56	1,60	100,00	
DI. Yogyakarta	10,86	24,24	34,58	11,64	8,53	7,87	2,28	100,00	
Jawa Timur	12,46	22,40	23,77	22,18	10,32	6,69	2,19	100,00	
Banten	12,32	15,94	30,60	15,38	13,74	8,08	3,94	100,00	
Bali	5,94	15,56	22,50	22,70	16,55	12,86	3,89	100,00	
Nusa Tenggara Barat	27,24	26,65	21,59	9,80	6,80	6,46	1,47	100,00	
Nusa Tenggara Timur	16,91	24,06	24,89	9,96	10,11	11,35	2,72	100,00	
Kalimantan Barat	6,23	13,24	21,07	22,33	19,18	13,27	4,68	100,00	
Kalimantan Tengah	11,09	13,13	21,70	15,31	19,34	14,34	5,09	100,00	
Kalimantan Selatan	14,45	16,16	19,84	17,51	15,96	11,20	4,88	100,00	
Kalimantan Timur	8,31	11,75	22,76	11,89	18,88	16,81	9,60	100,00	
Sulawesi Utara	8,77	14,02	26,03	16,58	20,33	10,90	3,36	100,00	
Sulawesi Tengah	7,73	21,65	24,08	15,44	12,95	14,83	3,32	100,00	
Sulawesi Selatan	24,45	9,99	20,81	14,29	12,26	12,66	5,53	100,00	
Sulawesi Tenggara	15,52	18,11	20,32	12,36	15,74	14,61	3,34	100,00	
Gorontalo	19,56	25,13	19,65	10,50	12,13	10,26	2,77	100,00	
Sulawesi Barat	5,93	26,89	24,79	14,91	11,57	12,56	3,35	100,00	
Maluku	13,81	16,23	20,34	11,30	19,98	15,68	2,65	100,00	
Maluku Utara	11,45	9,37	11,14	16,28	24,95	20,92	5,89	100,00	
Papua Barat	14,50	11,72	14,76	9,64	20,65	20,69	8,05	100,00	
Papua	1,56	3,92	12,17	11,21	23,01	32,23	15,90	100,00	
<b>INDONESIA</b>	<b>10,32</b>	<b>17,13</b>	<b>22,94</b>	<b>19,15</b>	<b>15,30</b>	<b>10,91</b>	<b>4,26</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.8.2 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, Tahun 2008**

Provinsi	Perdesaan								Jumlah
	< 300.000	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 2.499.999	2.500.000 +		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
NAD	7,22	14,39	19,84	21,25	20,74	14,52	2,03	100,00	
Sumatera Utara	11,61	17,42	23,89	23,54	13,86	8,14	1,55	100,00	
Sumatera Barat	11,56	19,01	23,52	16,97	15,41	10,79	2,75	100,00	
Riau	6,88	12,95	24,47	16,06	21,67	13,91	4,06	100,00	
Jambi	11,60	14,37	20,77	13,35	20,58	15,25	4,07	100,00	
Sumatera Selatan	15,19	16,61	20,78	18,61	16,12	10,43	2,26	100,00	
Bengkulu	6,92	14,96	27,08	21,31	15,85	11,93	1,95	100,00	
Lampung	25,32	22,41	22,52	12,30	10,89	5,01	1,55	100,00	
Bangka Belitung	9,76	9,59	18,62	18,39	26,25	13,23	4,15	100,00	
Kepulauan Riau	15,16	23,29	18,93	14,22	18,96	7,38	2,06	100,00	
DKI. Jakarta									
Jawa Barat	16,43	23,60	24,90	18,01	11,77	4,37	0,93	100,00	
Jawa Tengah	26,25	28,15	25,32	10,68	5,57	3,23	0,81	100,00	
DI. Yogyakarta	14,20	26,42	29,80	14,94	5,96	7,15	1,52	100,00	
Jawa Timur	21,26	29,65	23,25	14,66	6,44	3,95	0,79	100,00	
Banten	7,40	20,85	22,22	24,62	18,58	5,43	0,90	100,00	
Bali	14,31	17,06	26,95	21,38	13,89	4,62	1,80	100,00	
Nusa Tenggara Barat	21,75	29,24	23,81	14,45	6,19	3,60	0,95	100,00	
Nusa Tenggara Timur	26,97	24,91	21,33	13,36	6,96	5,34	1,13	100,00	
Kalimantan Barat	8,48	15,56	25,16	21,04	15,23	11,21	3,33	100,00	
Kalimantan Tengah	5,43	10,73	26,36	17,16	19,47	16,55	4,30	100,00	
Kalimantan Selatan	15,45	14,48	20,51	20,02	16,13	10,14	3,26	100,00	
Kalimantan Timur	2,08	3,79	8,60	9,28	24,21	36,58	15,45	100,00	
Sulawesi Utara	16,96	17,01	23,54	14,39	16,50	9,65	1,96	100,00	
Sulawesi Tengah	25,02	24,72	20,23	12,15	10,24	5,98	1,66	100,00	
Sulawesi Selatan	9,36	34,79	20,54	15,57	9,93	6,59	3,21	100,00	
Sulawesi Tenggara	23,88	22,72	18,31	14,29	10,63	7,46	2,71	100,00	
Gorontalo	28,87	26,12	20,48	11,07	7,01	5,17	1,27	100,00	
Sulawesi Barat	23,31	23,47	20,88	13,56	10,93	7,39	0,46	100,00	
Maluku	21,28	20,39	22,94	15,52	9,11	8,84	1,91	100,00	
Maluku Utara	16,17	13,54	22,09	12,74	17,19	14,45	3,82	100,00	
Papua Barat	4,37	8,10	14,44	15,79	27,08	24,41	5,80	100,00	
Papua	8,71	12,24	17,29	11,42	19,75	21,70	8,89	100,00	
<b>INDONESIA</b>	<b>16,80</b>	<b>22,35</b>	<b>23,22</b>	<b>16,19</b>	<b>12,10</b>	<b>7,40</b>	<b>1,95</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 5.8.3 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan								Jumlah
	< 300.000	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	1.500.000 - 2.499.999	2.500.000 +		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
NAD	6,04	14,29	17,82	19,25	21,95	17,12	3,52	100,00	
Sumatera Utara	7,61	14,97	25,56	24,28	16,59	8,83	2,17	100,00	
Sumatera Barat	13,94	17,86	22,66	14,60	15,41	12,32	3,22	100,00	
Riau	6,68	12,43	25,08	16,23	19,70	14,91	4,96	100,00	
Jambi	11,21	15,24	20,98	13,05	20,21	15,31	4,01	100,00	
Sumatera Selatan	12,35	16,40	21,02	20,23	15,47	11,39	3,14	100,00	
Bengkulu	6,76	15,96	25,94	18,43	15,56	14,39	2,95	100,00	
Lampung	19,69	22,92	25,27	12,42	10,59	7,26	1,84	100,00	
Bangka Belitung	8,71	10,83	18,13	17,77	24,90	15,46	4,20	100,00	
Kepulauan Riau	6,59	8,08	11,32	20,93	20,56	23,22	9,31	100,00	
DKI. Jakarta	2,91	7,77	18,67	21,85	23,08	16,60	9,12	100,00	
Jawa Barat	10,77	19,18	21,60	21,59	15,73	8,38	2,74	100,00	
Jawa Tengah	22,40	27,66	26,96	11,40	6,36	3,97	1,25	100,00	
DI. Yogyakarta	11,77	24,83	33,28	12,54	7,83	7,67	2,07	100,00	
Jawa Timur	15,92	25,25	23,56	19,22	8,80	5,61	1,64	100,00	
Banten	10,83	17,43	28,06	18,18	15,21	7,28	3,02	100,00	
Bali	8,93	16,09	24,09	22,23	15,60	9,92	3,14	100,00	
Nusa Tenggara Barat	24,66	27,87	22,63	11,99	6,52	5,11	1,23	100,00	
Nusa Tenggara Timur	23,27	24,60	22,64	12,11	8,12	7,55	1,72	100,00	
Kalimantan Barat	7,59	14,64	23,54	21,55	16,79	12,03	3,87	100,00	
Kalimantan Tengah	7,58	11,65	24,59	16,45	19,42	15,71	4,60	100,00	
Kalimantan Selatan	14,98	15,27	20,19	18,84	16,05	10,64	4,03	100,00	
Kalimantan Timur	5,86	8,62	17,20	10,86	20,97	24,57	11,90	100,00	
Sulawesi Utara	12,93	15,54	24,77	15,47	18,38	10,26	2,65	100,00	
Sulawesi Tengah	19,13	23,68	21,54	13,27	11,16	8,99	2,22	100,00	
Sulawesi Selatan	17,76	20,98	20,69	14,86	11,23	9,97	4,50	100,00	
Sulawesi Tenggara	21,20	21,24	18,95	13,67	12,27	9,76	2,91	100,00	
Gorontalo	25,35	25,75	20,17	10,86	8,94	7,10	1,84	100,00	
Sulawesi Barat	18,19	24,48	22,03	13,96	11,12	8,91	1,31	100,00	
Maluku	18,24	18,69	21,88	13,80	13,54	11,63	2,21	100,00	
Maluku Utara	14,21	11,82	17,56	14,20	20,40	17,13	4,68	100,00	
Papua Barat	8,75	9,66	14,58	13,14	24,30	22,81	6,77	100,00	
Papua	5,43	8,42	14,94	11,32	21,25	26,54	12,11	100,00	
<b>INDONESIA</b>	<b>12,91</b>	<b>19,22</b>	<b>23,05</b>	<b>17,97</b>	<b>14,02</b>	<b>9,50</b>	<b>3,34</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2008

**Tabel 6.1 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2008**

<b>Provinsi</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan+Perdesaan</b>
	(1)	(2)	(3)
Nanggroe Aceh Darussalam	24,32	29,72	28,13
Sumatera Utara	16,93	19,45	18,21
Sumatera Barat	21,21	29,47	26,40
Riau	22,27	27,29	24,72
Jambi	15,77	21,06	19,33
Sumatera Selatan	34,57	27,35	30,16
Bengkulu	27,17	25,75	26,26
Lampung	34,64	28,45	30,21
Bangka Belitung	27,79	29,16	28,53
Kepulauan Riau	22,19	17,89	20,37
DKI. Jakarta	29,40		29,40
Jawa Barat	23,13	24,88	23,79
Jawa Tengah	22,42	23,62	23,00
DI. Yogyakarta	32,93	27,93	31,51
Jawa Timur	22,94	22,74	22,84
Banten	32,16	26,49	30,12
Bali	33,32	30,00	32,02
Nusa Tenggara Barat	31,40	32,64	32,09
Nusa Tenggara Timur	33,87	42,35	40,39
Kalimantan Barat	27,98	24,48	25,47
Kalimantan Tengah	16,41	20,78	19,22
Kalimantan Selatan	33,92	31,08	32,29
Kalimantan Timur	20,82	22,61	21,47
Sulawesi Utara	29,40	31,72	30,68
Sulawesi Tengah	35,46	32,39	33,12
Sulawesi Selatan	20,24	22,15	21,47
Sulawesi Tenggara	32,99	29,47	30,41
Gorontalo	32,11	47,01	42,34
Sulawesi Barat	24,73	35,85	31,97
Maluku	25,79	28,24	27,47
Maluku Utara	25,21	30,28	28,57
Papua Barat	31,69	22,40	24,76
Papua	22,86	27,94	26,67
<b>INDONESIA</b>	<b>25,13</b>	<b>25,87</b>	<b>25,49</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.2.1 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan							
	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	8,04	9,01	9,51	0,96	1,34	5,74	2,63	7,40
Sumatera Utara	5,83	6,39	6,48	0,44	0,99	3,13	1,07	4,85
Sumatera Barat	8,56	9,57	9,69	0,97	0,74	5,26	1,49	5,62
Riau	9,08	10,89	10,66	0,79	0,96	5,38	2,01	5,36
Jambi	5,07	5,79	5,59	0,64	0,73	3,06	0,89	5,45
Sumatera Selatan	11,86	16,24	17,34	1,64	1,03	10,69	2,98	10,51
Bengkulu	8,73	12,35	13,12	0,92	0,78	4,09	1,38	9,42
Lampung	11,76	18,71	18,71	0,58	1,40	7,42	3,52	11,93
Bangka Belitung	7,67	11,79	12,76	1,21	0,75	8,13	2,34	8,90
Kepulauan Riau	7,94	10,02	9,99	0,83	0,82	4,45	1,50	5,45
DKI. Jakarta	8,17	14,60	14,50	1,00	1,39	5,58	1,36	9,13
Jawa Barat	6,82	9,20	10,19	1,08	1,00	4,02	1,34	8,55
Jawa Tengah	4,92	10,43	11,15	0,57	0,68	3,92	1,32	7,65
DI. Yogyakarta	7,27	16,79	18,84	1,21	0,78	5,25	1,96	8,32
Jawa Timur	6,37	11,14	11,15	0,66	0,96	3,77	1,21	6,84
Banten	8,44	12,57	12,96	1,15	1,16	6,99	1,69	12,36
Bali	14,92	15,27	16,33	1,07	1,17	8,57	2,28	8,87
Nusa Tenggara Barat	14,49	13,48	15,25	0,91	1,27	8,42	2,32	9,67
Nusa Tenggara Timur	11,62	20,46	22,88	1,65	1,24	7,32	3,08	9,36
Kalimantan Barat	10,57	11,31	11,37	1,01	0,98	7,95	1,96	8,28
Kalimantan Tengah	4,24	6,80	6,97	0,79	0,91	4,01	1,73	4,27
Kalimantan Selatan	8,76	14,45	15,89	1,33	1,77	5,27	2,68	9,85
Kalimantan Timur	5,34	8,30	9,55	0,66	0,72	3,63	1,29	6,33
Sulawesi Utara	10,68	14,23	14,78	0,76	1,39	6,22	2,22	7,03
Sulawesi Tengah	14,19	14,93	17,19	1,74	2,98	9,86	4,39	9,33
Sulawesi Selatan	6,67	6,41	8,55	0,52	0,70	4,92	1,40	5,39
Sulawesi Tenggara	11,67	14,06	15,50	1,16	1,79	8,96	3,08	8,13
Gorontalo	18,14	11,56	9,11	1,65	2,10	6,20	3,15	6,75
Sulawesi Barat	9,56	10,25	11,84	0,58	0,95	9,01	2,17	7,85
Maluku	5,32	9,73	10,31	1,32	1,13	5,22	2,53	9,09
Maluku Utara	10,14	8,60	7,81	1,01	1,46	8,39	2,52	9,29
Papua Barat	10,93	11,31	11,98	1,24	1,36	7,71	1,97	11,10
Papua	7,90	9,98	8,80	1,51	0,48	4,26	1,19	8,03
<b>INDONESIA</b>	<b>7,50</b>	<b>11,14</b>	<b>11,73</b>	<b>0,89</b>	<b>1,02</b>	<b>4,98</b>	<b>1,58</b>	<b>8,09</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.2.2 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, Tahun 2008**

Provinsi	Perdesaan							
	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	10,94	11,78	11,55	1,46	1,81	8,75	3,53	8,95
Sumatera Utara	6,90	7,35	7,16	0,66	1,67	3,88	1,57	6,61
Sumatera Barat	11,89	11,56	12,56	1,17	1,77	8,63	3,19	7,59
Riau	9,60	10,93	11,12	1,13	1,83	8,14	3,68	7,21
Jambi	7,15	8,03	8,55	0,79	0,95	4,55	2,22	6,48
Sumatera Selatan	8,43	10,56	11,75	1,26	1,44	7,50	2,68	8,67
Bengkulu	8,04	10,23	10,36	0,84	0,88	5,64	2,25	9,01
Lampung	8,15	12,78	13,20	0,81	1,41	6,12	2,30	9,96
Bangka Belitung	8,21	11,50	11,47	1,42	1,22	9,15	3,31	10,65
Kepulauan Riau	9,33	9,01	9,37	0,88	0,92	4,42	2,09	4,12
DKI. Jakarta								
Jawa Barat	8,09	9,88	11,20	1,09	0,99	5,04	1,77	9,16
Jawa Tengah	5,72	11,05	12,00	0,59	1,16	4,80	1,75	7,50
DI. Yogyakarta	5,30	12,65	14,24	0,40	0,68	4,28	1,36	9,03
Jawa Timur	7,03	10,37	10,37	0,85	0,99	4,39	1,98	6,72
Banten	7,48	10,43	10,55	1,25	1,28	7,43	1,50	11,15
Bali	13,31	11,92	13,17	1,30	1,59	6,88	2,66	9,63
Nusa Tenggara Barat	12,83	12,90	15,03	1,31	1,18	8,58	1,89	11,61
Nusa Tenggara Timur	21,01	24,67	23,22	2,35	3,09	16,97	4,76	13,74
Kalimantan Barat	9,12	10,80	10,07	1,18	1,47	8,20	2,87	6,92
Kalimantan Tengah	6,60	8,68	8,54	1,00	1,16	5,67	2,54	4,12
Kalimantan Selatan	9,70	13,06	12,69	1,57	1,81	8,88	3,01	7,91
Kalimantan Timur	6,77	8,77	10,16	1,20	1,37	4,74	2,43	6,51
Sulawesi Utara	14,52	15,96	15,69	1,18	2,44	9,95	4,54	7,63
Sulawesi Tengah	11,79	10,01	10,27	1,79	2,06	9,33	4,07	11,46
Sulawesi Selatan	7,08	6,83	7,51	0,71	1,25	5,29	2,00	6,71
Sulawesi Tenggara	10,91	9,21	10,48	0,98	1,83	8,47	3,28	7,74
Gorontalo	31,35	24,33	19,86	2,77	3,81	14,12	6,30	8,30
Sulawesi Barat	14,11	11,67	12,52	1,65	3,51	15,98	4,62	10,75
Maluku	12,05	14,25	12,96	1,60	1,99	8,81	3,66	6,92
Maluku Utara	14,49	13,04	9,76	1,76	2,91	11,22	3,27	7,40
Papua Barat	6,57	7,83	8,32	0,37	0,91	4,92	1,95	9,23
Papua	9,70	13,45	12,34	1,45	2,37	7,19	3,94	8,89
<b>INDONESIA</b>	<b>8,68</b>	<b>10,92</b>	<b>11,34</b>	<b>1,04</b>	<b>1,40</b>	<b>6,40</b>	<b>2,37</b>	<b>8,22</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.2.3 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan							
	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	10,08	10,96	10,95	1,31	1,67	7,86	3,27	8,49
Sumatera Utara	6,38	6,88	6,83	0,55	1,34	3,51	1,33	5,75
Sumatera Barat	10,65	10,82	11,49	1,10	1,38	7,37	2,55	6,86
Riau	9,33	10,91	10,89	0,96	1,38	6,73	2,82	6,26
Jambi	6,47	7,29	7,59	0,74	0,88	4,06	1,78	6,15
Sumatera Selatan	9,76	12,77	13,93	1,41	1,28	8,75	2,80	9,39
Bengkulu	8,29	10,99	11,35	0,87	0,84	5,09	1,94	9,15
Lampung	9,18	14,47	14,77	0,74	1,40	6,49	2,65	10,52
Bangka Belitung	7,96	11,63	12,06	1,32	1,00	8,68	2,86	9,84
Kepulauan Riau	8,53	9,59	9,73	0,85	0,86	4,44	1,75	4,89
DKI. Jakarta	8,17	14,60	14,50	1,00	1,39	5,58	1,36	9,13
Jawa Barat	7,30	9,46	10,57	1,08	1,00	4,41	1,50	8,78
Jawa Tengah	5,31	10,73	11,56	0,58	0,91	4,35	1,53	7,58
DI. Yogyakarta	6,71	15,61	17,53	0,98	0,75	4,97	1,79	8,52
Jawa Timur	6,69	10,76	10,77	0,75	0,97	4,07	1,58	6,78
Banten	8,09	11,80	12,09	1,19	1,20	7,15	1,62	11,92
Bali	14,29	13,96	15,09	1,16	1,33	7,91	2,43	9,17
Nusa Tenggara Barat	13,56	13,16	15,13	1,13	1,22	8,51	2,08	10,76
Nusa Tenggara Timur	18,84	23,70	23,14	2,18	2,66	14,74	4,37	12,73
Kalimantan Barat	9,53	10,94	10,44	1,13	1,33	8,13	2,61	7,31
Kalimantan Tengah	5,76	8,01	7,98	0,93	1,07	5,08	2,25	4,17
Kalimantan Selatan	9,30	13,65	14,05	1,46	1,79	7,35	2,87	8,73
Kalimantan Timur	5,86	8,47	9,77	0,86	0,96	4,03	1,71	6,39
Sulawesi Utara	12,80	15,18	15,28	0,99	1,97	8,28	3,50	7,36
Sulawesi Tengah	12,36	11,18	11,92	1,78	2,28	9,46	4,15	10,96
Sulawesi Selatan	6,93	6,68	7,88	0,64	1,06	5,16	1,79	6,24
Sulawesi Tenggara	11,11	10,50	11,82	1,02	1,82	8,60	3,23	7,84
Gorontalo	27,21	20,33	16,49	2,42	3,28	11,64	5,31	7,81
Sulawesi Barat	12,52	11,17	12,29	1,27	2,61	13,54	3,76	9,74
Maluku	9,92	12,82	12,12	1,51	1,72	7,68	3,30	7,61
Maluku Utara	13,02	11,54	9,10	1,51	2,42	10,26	3,02	8,04
Papua Barat	7,68	8,71	9,25	0,59	1,03	5,63	1,95	9,70
Papua	9,25	12,58	11,45	1,47	1,90	6,46	3,25	8,67
<b>INDONESIA</b>	<b>8,08</b>	<b>11,03</b>	<b>11,54</b>	<b>0,96</b>	<b>1,21</b>	<b>5,67</b>	<b>1,97</b>	<b>8,15</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.3.1 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, Tahun 2008**

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Jumlah	Perkotaan
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Daruss	59,58	29,05	4,28	3,19	3,91	100,00	
Sumatera Utara	55,34	30,28	5,41	3,06	5,91	100,00	
Sumatera Barat	54,63	32,90	4,18	3,44	4,85	100,00	
Riau	65,59	25,02	2,22	2,96	4,21	100,00	
Jambi	57,56	31,40	5,28	3,37	2,38	100,00	
Sumatera Selatan	61,61	26,94	4,77	4,24	2,44	100,00	
Bengkulu	55,49	34,16	7,15	2,31	0,89	100,00	
Lampung	56,43	35,89	1,94	2,85	2,89	100,00	
Bangka Belitung	58,18	29,80	7,09	1,63	3,30	100,00	
Kepulauan Riau	67,09	25,40	2,74	2,39	2,38	100,00	
DKI. Jakarta	68,94	22,76	4,01	1,80	2,49	100,00	
Jawa Barat	50,57	36,15	8,32	2,83	2,14	100,00	
Jawa Tengah	63,03	28,06	3,17	2,22	3,51	100,00	
DI. Yogyakarta	64,68	28,04	5,22	0,54	1,52	100,00	
Jawa Timur	57,93	29,73	5,56	2,78	4,00	100,00	
Banten	66,46	25,28	3,89	1,92	2,46	100,00	
Bali	64,25	25,65	4,90	1,76	3,43	100,00	
Nusa Tenggara Barat	45,44	41,59	7,00	1,40	4,57	100,00	
Nusa Tenggara Timur	55,27	34,78	4,73	2,99	2,24	100,00	
Kalimantan Barat	61,53	25,84	5,86	3,27	3,51	100,00	
Kalimantan Tengah	53,58	32,29	8,13	3,51	2,49	100,00	
Kalimantan Selatan	62,04	24,79	4,98	3,99	4,21	100,00	
Kalimantan Timur	58,00	34,26	3,42	2,13	2,18	100,00	
Sulawesi Utara	58,95	32,04	6,04	1,24	1,73	100,00	
Sulawesi Tengah	62,69	31,67	2,50	1,96	1,18	100,00	
Sulawesi Selatan	57,29	31,02	3,76	3,20	4,72	100,00	
Sulawesi Tenggara	57,53	34,09	3,96	1,57	2,85	100,00	
Gorontalo	52,56	38,39	6,15	1,28	1,63	100,00	
Sulawesi Barat	45,23	42,30	5,12	1,07	6,28	100,00	
Maluku	51,10	38,69	8,17	0,17	1,87	100,00	
Maluku Utara	42,98	41,92	6,75	3,19	5,16	100,00	
Papua Barat	45,83	43,02	5,14	2,25	3,76	100,00	
Papua	47,67	44,85	4,29	2,03	1,17	100,00	
<b>INDONESIA</b>	<b>58,34</b>	<b>30,70</b>	<b>5,34</b>	<b>2,53</b>	<b>3,09</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.3.2 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, Tahun 2008**

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Jumlah	Perdesaan
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Daruss	52,64	36,02	5,33	2,79	3,22	100,00	
Sumatera Utara	51,42	35,24	4,40	3,81	5,13	100,00	
Sumatera Barat	47,80	34,85	5,93	6,43	5,00	100,00	
Riau	52,92	35,96	5,02	2,66	3,44	100,00	
Jambi	47,86	39,52	6,14	3,63	2,84	100,00	
Sumatera Selatan	51,99	36,55	6,01	2,88	2,57	100,00	
Bengkulu	49,43	36,64	6,97	2,80	4,17	100,00	
Lampung	52,99	34,86	5,36	4,06	2,73	100,00	
Bangka Belitung	53,18	34,99	5,38	4,12	2,33	100,00	
Kepulauan Riau	43,41	46,87	5,50	1,95	2,27	100,00	
DKI. Jakarta							
Jawa Barat	42,61	40,28	8,60	4,61	3,90	100,00	
Jawa Tengah	57,10	32,38	3,85	2,76	3,90	100,00	
DI. Yogyakarta	60,33	33,37	3,38	1,46	1,46	100,00	
Jawa Timur	52,12	33,82	6,46	3,51	4,09	100,00	
Banten	50,91	34,00	7,07	4,33	3,69	100,00	
Bali	62,31	27,73	5,47	2,38	2,11	100,00	
Nusa Tenggara Barat	44,58	38,40	7,54	4,08	5,40	100,00	
Nusa Tenggara Timur	41,43	45,23	8,65	2,04	2,65	100,00	
Kalimantan Barat	53,22	36,66	4,64	1,71	3,77	100,00	
Kalimantan Tengah	53,96	35,97	4,83	2,29	2,93	100,00	
Kalimantan Selatan	50,85	39,36	4,33	2,76	2,70	100,00	
Kalimantan Timur	50,40	37,63	5,75	2,39	3,83	100,00	
Sulawesi Utara	49,66	37,60	8,93	2,19	1,63	100,00	
Sulawesi Tengah	49,32	37,93	8,14	2,18	2,43	100,00	
Sulawesi Selatan	51,51	33,22	7,20	2,87	5,22	100,00	
Sulawesi Tenggara	49,60	39,16	6,03	2,01	3,20	100,00	
Gorontalo	47,93	40,43	7,90	2,89	0,85	100,00	
Sulawesi Barat	50,70	34,83	8,01	2,46	4,00	100,00	
Maluku	43,22	42,47	7,95	1,83	4,53	100,00	
Maluku Utara	38,02	46,48	7,53	3,22	4,75	100,00	
Papua Barat	57,97	33,84	5,08	0,75	2,37	100,00	
Papua	45,26	40,99	8,90	2,57	2,28	100,00	
<b>INDONESIA</b>	<b>49,99</b>	<b>36,72</b>	<b>6,41</b>	<b>3,25</b>	<b>3,62</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.3.3 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, Tahun 2008**

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Jumlah
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Daruss	54,40	34,25	5,06	2,89	3,40	100,00
Sumatera Utara	53,10	33,11	4,84	3,49	5,47	100,00
Sumatera Barat	49,77	34,28	5,42	5,57	4,95	100,00
Riau	58,09	31,50	3,88	2,78	3,75	100,00
Jambi	50,34	37,45	5,92	3,57	2,72	100,00
Sumatera Selatan	55,73	32,81	5,53	3,41	2,52	100,00
Bengkulu	51,34	35,86	7,02	2,64	3,14	100,00
Lampung	54,04	35,18	4,31	3,69	2,78	100,00
Bangka Belitung	55,51	32,57	6,18	2,96	2,79	100,00
Kepulauan Riau	58,31	33,36	3,77	2,23	2,34	100,00
DKI. Jakarta	68,94	22,76	4,01	1,80	2,49	100,00
Jawa Barat	47,38	37,80	8,43	3,54	2,84	100,00
Jawa Tengah	59,89	30,35	3,53	2,51	3,72	100,00
DI. Yogyakarta	63,48	29,51	4,72	0,79	1,50	100,00
Jawa Timur	54,86	31,89	6,04	3,16	4,05	100,00
Banten	60,68	28,52	5,07	2,81	2,92	100,00
Bali	63,45	26,51	5,14	2,02	2,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	44,93	39,71	7,32	2,98	5,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	43,51	43,66	8,06	2,19	2,59	100,00
Kalimantan Barat	55,42	33,79	4,97	2,12	3,70	100,00
Kalimantan Tengah	53,86	34,96	5,74	2,63	2,81	100,00
Kalimantan Selatan	55,29	33,57	4,59	3,24	3,30	100,00
Kalimantan Timur	54,76	35,70	4,41	2,24	2,89	100,00
Sulawesi Utara	53,34	35,39	7,79	1,81	1,67	100,00
Sulawesi Tengah	52,24	36,56	6,91	2,13	2,16	100,00
Sulawesi Selatan	53,34	32,52	6,11	2,97	5,06	100,00
Sulawesi Tenggara	51,62	37,87	5,50	1,89	3,11	100,00
Gorontalo	48,85	40,02	7,55	2,57	1,01	100,00
Sulawesi Barat	49,44	36,55	7,34	2,14	4,53	100,00
Maluku	45,19	41,52	8,00	1,42	3,86	100,00
Maluku Utara	39,25	45,35	7,34	3,21	4,85	100,00
Papua Barat	54,36	36,57	5,10	1,19	2,78	100,00
Papua	45,78	41,83	7,89	2,45	2,04	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>53,80</b>	<b>33,97</b>	<b>5,92</b>	<b>2,92</b>	<b>3,38</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.4.1 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Umur saat Perkawinan Pertama, Tahun 2008**

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama (tahun)					Jumlah
	< 16	16	17 - 18	19 - 24	25 +	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	2,85	2,11	15,45	59,63	19,96	100,00
Sumatera Utara	1,52	2,24	12,94	62,88	20,42	100,00
Sumatera Barat	2,05	2,49	9,88	59,90	25,68	100,00
Riau	1,58	2,49	10,78	61,73	23,42	100,00
Jambi	6,86	6,27	17,68	54,98	14,21	100,00
Sumatera Selatan	6,37	4,65	16,62	54,00	18,36	100,00
Bengkulu	3,53	3,53	16,13	58,21	18,61	100,00
Lampung	3,75	4,06	18,50	58,83	14,86	100,00
Bangka Belitung	3,16	4,70	20,05	57,55	14,55	100,00
Kepulauan Riau	2,67	2,48	11,47	59,59	23,79	100,00
DKI. Jakarta	3,75	3,61	13,81	57,75	21,07	100,00
Jawa Barat	6,64	6,37	22,80	51,29	12,90	100,00
Jawa Tengah	2,46	4,83	18,12	58,71	15,89	100,00
DI. Yogyakarta	1,32	0,92	11,56	54,36	31,84	100,00
Jawa Timur	6,06	6,46	17,00	56,52	13,96	100,00
Banten	7,54	5,70	19,24	53,37	14,16	100,00
Bali	1,76	2,11	14,03	60,89	21,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,87	5,58	28,07	49,75	9,73	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,65	4,94	10,99	58,29	23,13	100,00
Kalimantan Barat	6,23	4,47	17,79	55,39	16,11	100,00
Kalimantan Tengah	8,58	7,62	23,88	50,94	8,98	100,00
Kalimantan Selatan	9,18	6,81	19,97	50,55	13,49	100,00
Kalimantan Timur	6,34	5,09	17,08	55,30	16,20	100,00
Sulawesi Utara	3,66	4,85	19,03	58,22	14,25	100,00
Sulawesi Tengah	6,25	6,45	18,74	49,57	18,98	100,00
Sulawesi Selatan	7,20	5,56	17,60	49,56	20,08	100,00
Sulawesi Tenggara	5,75	4,67	18,36	53,01	18,22	100,00
Gorontalo	5,13	4,10	16,69	56,83	17,24	100,00
Sulawesi Barat	4,67	5,32	27,91	48,14	13,96	100,00
Maluku	2,75	4,16	14,70	61,70	16,69	100,00
Maluku Utara	5,57	4,40	17,43	53,66	18,94	100,00
Papua Barat	6,06	3,16	14,97	55,94	19,87	100,00
Papua	5,38	3,22	17,44	58,38	15,58	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>5,04</b>	<b>5,09</b>	<b>18,08</b>	<b>55,59</b>	<b>16,19</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.4.2 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Umur saat Perkawinan Pertama, Tahun 2008**

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama (tahun)					Jumlah	Perdesaan
	< 16	16	17 - 18	19 - 24	25 +		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	6,60	7,39	27,44	49,15	9,43	100,00	
Sumatera Utara	3,60	5,01	20,55	57,99	12,85	100,00	
Sumatera Barat	4,93	5,36	20,58	56,35	12,78	100,00	
Riau	8,91	8,21	26,11	49,93	6,84	100,00	
Jambi	12,34	11,09	29,06	41,12	6,39	100,00	
Sumatera Selatan	9,66	11,39	28,89	44,67	5,39	100,00	
Bengkulu	11,44	10,19	27,81	45,26	5,30	100,00	
Lampung	9,32	9,21	25,52	48,86	7,09	100,00	
Bangka Belitung	9,17	9,46	27,18	48,20	5,99	100,00	
Kepulauan Riau	13,81	6,06	20,11	51,43	8,59	100,00	
DKI. Jakarta							
Jawa Barat	19,06	15,25	33,33	29,35	3,00	100,00	
Jawa Tengah	7,01	10,68	30,69	44,90	6,72	100,00	
DI. Yogyakarta	2,25	4,24	19,11	60,55	13,85	100,00	
Jawa Timur	14,04	11,75	28,78	39,48	5,94	100,00	
Banten	19,80	14,20	32,76	30,78	2,47	100,00	
Bali	2,99	5,51	26,04	57,00	8,45	100,00	
Nusa Tenggara Barat	8,24	11,32	29,79	43,41	7,24	100,00	
Nusa Tenggara Timur	2,56	4,36	22,33	57,97	12,79	100,00	
Kalimantan Barat	9,12	10,12	27,36	47,21	6,20	100,00	
Kalimantan Tengah	12,29	12,15	31,77	39,16	4,63	100,00	
Kalimantan Selatan	16,42	12,37	28,67	37,50	5,04	100,00	
Kalimantan Timur	13,32	8,78	25,02	46,02	6,86	100,00	
Sulawesi Utara	3,65	6,76	25,42	53,63	10,53	100,00	
Sulawesi Tengah	9,90	10,03	27,84	44,06	8,17	100,00	
Sulawesi Selatan	12,94	9,86	26,59	41,91	8,70	100,00	
Sulawesi Tenggara	10,85	11,43	29,82	41,79	6,12	100,00	
Gorontalo	10,37	9,48	26,64	45,24	8,27	100,00	
Sulawesi Barat	17,78	11,20	27,55	37,45	6,02	100,00	
Maluku	6,18	5,82	23,90	52,79	11,30	100,00	
Maluku Utara	7,90	7,52	26,94	49,77	7,87	100,00	
Papua Barat	6,81	7,72	21,05	52,48	11,95	100,00	
Papua	15,35	11,95	29,32	37,74	5,64	100,00	
<b>INDONESIA</b>	<b>11,43</b>	<b>10,71</b>	<b>28,47</b>	<b>42,71</b>	<b>6,67</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.4.3 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Umur saat Perkawinan Pertama, Tahun 2008**

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama (tahun)					Jumlah (7)	
	Perkotaan+Perdesaan						
	< 16 (1)	16 (2)	17 - 18 (3)	19 - 24 (4)	25 + (5)		
Nanggroe Aceh Daruss	5,59	5,96	24,21	51,97	12,27	100,00	
Sumatera Utara	2,65	3,74	17,06	60,23	16,32	100,00	
Sumatera Barat	4,03	4,46	17,23	57,46	16,81	100,00	
Riau	5,44	5,51	18,86	55,51	14,68	100,00	
Jambi	10,75	9,69	25,75	45,15	8,66	100,00	
Sumatera Selatan	8,56	9,14	24,79	47,79	9,73	100,00	
Bengkulu	9,04	8,17	24,27	49,19	9,33	100,00	
Lampung	7,98	7,96	23,82	51,27	8,97	100,00	
Bangka Belitung	6,52	7,37	24,05	52,31	9,75	100,00	
Kepulauan Riau	7,97	4,18	15,57	55,71	16,57	100,00	
DKI. Jakarta	3,75	3,61	13,81	57,75	21,07	100,00	
Jawa Barat	12,03	10,22	27,37	41,77	8,61	100,00	
Jawa Tengah	4,94	8,02	24,98	51,17	10,89	100,00	
DI. Yogyakarta	1,66	2,14	14,33	56,64	25,23	100,00	
Jawa Timur	10,32	9,28	23,29	47,43	9,68	100,00	
Banten	12,38	9,06	24,58	44,44	9,54	100,00	
Bali	2,28	3,53	19,05	59,26	15,87	100,00	
Nusa Tenggara Barat	7,71	9,07	29,12	45,89	8,22	100,00	
Nusa Tenggara Timur	2,57	4,45	20,46	58,02	14,49	100,00	
Kalimantan Barat	8,40	8,72	24,99	49,24	8,65	100,00	
Kalimantan Tengah	11,04	10,62	29,11	43,13	6,10	100,00	
Kalimantan Selatan	13,62	10,22	25,30	42,55	8,31	100,00	
Kalimantan Timur	9,07	6,53	20,19	51,67	12,55	100,00	
Sulawesi Utara	3,66	5,96	22,76	55,55	12,08	100,00	
Sulawesi Tengah	9,20	9,35	26,10	45,11	10,23	100,00	
Sulawesi Selatan	11,13	8,50	23,76	44,32	12,29	100,00	
Sulawesi Tenggara	9,76	9,98	27,38	44,18	8,70	100,00	
Gorontalo	8,88	7,95	23,82	48,53	10,82	100,00	
Sulawesi Barat	14,13	9,57	27,65	40,43	8,23	100,00	
Maluku	5,27	5,38	21,47	55,15	12,73	100,00	
Maluku Utara	7,24	6,64	24,25	50,87	11,00	100,00	
Papua Barat	6,64	6,73	19,73	53,23	13,67	100,00	
Papua	13,40	10,24	27,00	41,78	7,58	100,00	
<b>INDONESIA</b>	<b>8,48</b>	<b>8,11</b>	<b>23,66</b>	<b>48,67</b>	<b>11,08</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.5 Proporsi Pemuda Perempuan Status Pernah Kawin yang Pernah Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2008**

<b>Provinsi</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan+Perdesaan</b>
	(1)	(2)	(3)
Nanggroe Aceh Darussalam	68,44	66,15	66,77
Sumatera Utara	63,34	57,77	60,32
Sumatera Barat	71,38	71,72	71,61
Riau	70,99	78,15	74,76
Jambi	78,31	82,85	81,53
Sumatera Selatan	77,41	81,46	80,11
Bengkulu	83,81	85,75	85,16
Lampung	82,81	83,75	83,52
Bangka Belitung	79,64	83,67	81,90
Kepulauan Riau	72,97	75,79	74,31
DKI. Jakarta	75,06		75,06
Jawa Barat	82,92	86,94	84,66
Jawa Tengah	75,42	81,93	78,97
DI. Yogyakarta	69,08	76,24	71,71
Jawa Timur	78,10	78,72	78,43
Banten	79,20	81,88	80,26
Bali	77,23	84,03	80,07
Nusa Tenggara Barat	77,61	75,69	76,44
Nusa Tenggara Timur	62,51	54,64	55,94
Kalimantan Barat	75,89	81,01	79,74
Kalimantan Tengah	84,03	85,72	85,15
Kalimantan Selatan	83,57	87,50	85,97
Kalimantan Timur	77,94	80,36	78,89
Sulawesi Utara	82,61	89,21	86,46
Sulawesi Tengah	76,10	79,47	78,83
Sulawesi Selatan	63,09	64,80	64,26
Sulawesi Tenggara	67,28	69,88	69,33
Gorontalo	78,60	82,94	81,71
Sulawesi Barat	69,96	66,35	67,35
Maluku	64,56	46,06	50,95
Maluku Utara	73,20	64,15	66,71
Papua Barat	63,72	39,49	44,76
Papua	58,22	35,14	39,66
<b>INDONESIA</b>	<b>76,99</b>	<b>77,44</b>	<b>77,23</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.6 Persentase Pemuda Perempuan Berstatus Kawin menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Partisipasi dalam Program KB, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	31,56	48,67	19,77	33,85	45,76	20,40	33,23	46,54	20,23
Sumatera Utara	36,66	44,28	19,06	42,23	40,71	17,06	39,68	42,35	17,97
Sumatera Barat	28,62	48,38	23,00	28,28	50,44	21,28	28,39	49,80	21,82
Riau	29,01	47,81	23,17	21,85	59,55	18,60	25,24	54,00	20,76
Jambi	21,69	56,68	21,63	17,15	66,28	16,57	18,47	63,49	18,04
Sumatera Selatan	22,59	58,76	18,65	18,54	69,13	12,34	19,89	65,66	14,45
Bengkulu	16,19	63,89	19,92	14,25	70,40	15,35	14,84	68,43	16,73
Lampung	17,19	65,02	17,79	16,25	67,58	16,17	16,48	66,96	16,56
Bangka Belitung	20,36	63,00	16,64	16,33	70,44	13,23	18,10	67,17	14,73
Kepulauan Riau	27,03	51,12	21,85	24,21	58,97	16,81	25,69	54,85	19,45
DKI. Jakarta	24,94	54,68	20,38				24,94	54,68	20,38
Jawa Barat	17,08	63,66	19,26	13,06	64,88	22,06	15,34	64,19	20,47
Jawa Tengah	24,58	57,07	18,36	18,07	64,73	17,20	21,03	61,25	17,72
DI. Yogyakarta	30,92	53,89	15,19	23,76	62,78	13,46	28,29	57,15	14,56
Jawa Timur	21,90	60,79	17,31	21,28	61,80	16,92	21,57	61,32	17,10
Banten	20,80	61,37	17,83	18,12	58,85	23,03	19,74	60,37	19,89
Bali	22,77	60,75	16,49	15,97	68,51	15,52	19,93	63,99	16,08
Nusa Tenggara Barat	22,39	50,62	26,98	24,31	50,08	25,61	23,56	50,29	26,15
Nusa Tenggara Timur	37,49	42,61	19,90	45,36	38,09	16,56	44,06	38,83	17,11
Kalimantan Barat	24,11	56,17	19,72	18,99	67,04	13,96	20,26	64,35	15,39
Kalimantan Tengah	15,97	67,64	16,39	14,28	72,90	12,82	14,85	71,13	14,02
Kalimantan Selatan	16,43	64,58	18,99	12,50	68,61	18,88	14,03	67,05	18,92
Kalimantan Timur	22,06	57,60	20,34	19,64	63,25	17,11	21,11	59,81	19,08
Sulawesi Utara	17,39	65,16	17,45	10,79	73,11	16,10	13,54	69,79	16,66
Sulawesi Tengah	23,90	53,48	22,62	20,53	62,05	17,43	21,17	60,41	18,42
Sulawesi Selatan	36,91	46,29	16,80	35,20	46,42	18,38	35,74	46,38	17,88
Sulawesi Tenggara	32,72	46,74	20,54	30,12	48,93	20,95	30,67	48,46	20,87
Gorontalo	21,40	59,27	19,33	17,06	66,81	16,13	18,29	64,67	17,04
Sulawesi Barat	30,04	48,11	21,85	33,65	49,80	16,55	32,65	49,33	18,03
Maluku	35,44	45,65	18,91	53,94	34,94	11,12	49,05	37,77	13,18
Maluku Utara	26,80	52,77	20,43	35,85	47,09	17,06	33,29	48,70	18,01
Papua Barat	36,28	41,06	22,66	60,51	24,14	15,35	55,24	27,82	16,94
Papua	41,78	38,46	19,76	64,86	24,55	10,59	60,34	27,28	12,38
<b>INDONESIA</b>	<b>23,01</b>	<b>58,02</b>	<b>18,97</b>	<b>22,56</b>	<b>59,52</b>	<b>17,92</b>	<b>22,77</b>	<b>58,83</b>	<b>18,41</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

Keterangan : 1. Belum Pernah Ikut KB 2. Sedang Ikut KB 3. Tidak Ikut KB lagi

**Tabel 6.7.1 Persentase Pemuda Perempuan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan										Jumlah
	MOW Tubektomi	MOP Vasektomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk/ Impalnt	Pil KB	Kondom/ Karet KB	Intravag	Tradi- sional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Nanggroe Aceh Daruss	0,93	0,65	4,66	65,44	0,82	25,37	1,06		1,08	100,00	
Sumatera Utara	2,14	0,38	4,49	49,66	3,78	34,27	1,99		3,29	100,00	
Sumatera Barat	2,07	1,21	9,42	57,84	5,07	20,58	0,91	0,29	2,61	100,00	
Riau	0,88	1,07	5,04	65,84	1,94	20,69	2,29	0,38	1,86	100,00	
Jambi	0,32	0,54	2,79	59,32	2,57	33,45	0,46		0,55	100,00	
Sumatera Selatan	1,52	0,60	2,24	70,19	4,46	18,89	0,85		1,25	100,00	
Bengkulu	0,62	0,66	7,16	63,14	5,44	20,65	0,73		1,59	100,00	
Lampung	0,21	0,21	4,15	73,79	3,96	17,17	0,46		0,05	100,00	
Bangka Belitung	0,89	0,64	1,66	60,42	0,91	32,45	1,52	0,19	1,33	100,00	
Kepulauan Riau	1,65	0,75	5,03	50,35	2,67	36,70	2,45	0,08	0,32	100,00	
DKI. Jakarta	1,09	0,42	7,85	64,69	2,44	21,92	0,79	0,15	0,65	100,00	
Jawa Barat	1,04	0,63	7,00	60,86	1,81	27,60	0,56	0,05	0,45	100,00	
Jawa Tengah	1,48	0,28	5,32	74,55	3,65	12,79	0,94	0,13	0,87	100,00	
DI. Yogyakarta	2,94	0,26	20,19	53,12	4,01	10,62	4,60		4,27	100,00	
Jawa Timur	1,77	0,30	5,85	63,70	3,21	23,12	0,95	0,10	1,00	100,00	
Banten	0,97	0,32	4,10	72,81	2,37	18,34	0,98		0,11	100,00	
Bali	2,42	0,40	23,64	52,72	0,78	16,94	1,72	0,19	1,20	100,00	
Nusa Tenggara Barat	0,89	0,77	7,35	73,90	4,83	10,87	0,91	0,15	0,32	100,00	
Nusa Tenggara Timur	1,02	1,56	14,42	52,74	6,32	19,35	0,39		4,20	100,00	
Kalimantan Barat	0,65	0,30	4,41	57,78	0,84	32,52	1,31		2,20	100,00	
Kalimantan Tengah	0,55	0,29	0,41	58,96	1,59	36,63	0,69		0,88	100,00	
Kalimantan Selatan	1,14	0,62	2,01	49,97	2,98	42,08	0,86		0,33	100,00	
Kalimantan Timur	0,84	0,38	5,74	52,58	2,10	36,99	1,06	0,13	0,20	100,00	
Sulawesi Utara	0,50	0,70	5,56	54,77	4,86	32,97	0,38		0,26	100,00	
Sulawesi Tengah	0,22		5,93	50,70	1,89	39,71			1,55	100,00	
Sulawesi Selatan	0,51	0,37	4,35	63,01	1,72	28,01	0,70		1,33	100,00	
Sulawesi Tenggara	0,77		3,48	46,29	7,96	38,92	0,85		1,72	100,00	
Gorontalo	0,78	1,15	11,22	41,25	6,82	37,77	0,68		0,33	100,00	
Sulawesi Barat				2,92	61,25	1,81	32,72		1,30	100,00	
Maluku	1,72		2,85	71,47	0,75	21,05			2,16	100,00	
Maluku Utara	0,79	1,27	0,61	70,41	5,50	19,82			1,60	100,00	
Papua Barat			2,03	0,90	62,29	2,71	30,05		2,02	100,00	
Papua	1,53			3,07	52,56	7,99	30,47	1,12	3,26	100,00	
<b>INDONESIA</b>	<b>1,27</b>	<b>0,47</b>	<b>6,32</b>	<b>63,68</b>	<b>2,78</b>	<b>23,55</b>	<b>0,95</b>	<b>0,08</b>	<b>0,91</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.7.2 Persentase Pemuda Perempuan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, Tahun 2008**

Provinsi	Perdesaan										Jumlah
	MOW Tubektomi	MOP Vasektomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk/ Impalnt	Pil KB	Kondom/ Karet KB	Intravag	Tradi- sional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Nanggroe Aceh Daruss	0,63	0,71	1,04	71,10	0,67	24,26	0,47		1,12	100,00	
Sumatera Utara	2,15	0,31	2,57	56,99	3,93	31,44	0,55	0,14	1,93	100,00	
Sumatera Barat	0,47	0,31	2,79	68,35	9,30	17,50	0,44	0,08	0,77	100,00	
Riau	0,35	0,33	1,01	64,73	2,52	30,15	0,52	0,15	0,23	100,00	
Jambi	0,79	0,26	1,71	66,87	5,06	25,00	0,06	0,05	0,19	100,00	
Sumatera Selatan	0,68	0,78	0,74	74,40	8,59	14,36	0,26	0,11	0,07	100,00	
Bengkulu	0,83	0,54	0,71	73,67	9,09	14,45	0,47	0,06	0,18	100,00	
Lampung	0,85	0,89	1,28	71,46	5,22	19,31	0,35	0,12	0,53	100,00	
Bangka Belitung	0,37	0,58	0,44	59,92	1,97	35,21	0,53		0,99	100,00	
Kepulauan Riau		0,30	5,18	50,03	1,20	38,10			5,18	100,00	
DKI. Jakarta										-	
Jawa Barat	0,53	0,52	1,46	67,42	2,69	27,32	0,02		0,03	100,00	
Jawa Tengah	1,82	0,82	2,29	76,36	6,53	11,41	0,52		0,25	100,00	
DI. Yogyakarta	2,49	0,42	8,25	68,61	4,55	13,58	0,49	0,70	0,91	100,00	
Jawa Timur	1,59	0,46	3,31	70,33	4,19	19,51	0,07	0,05	0,50	100,00	
Banten	1,23	0,40	0,60	80,51	2,77	14,28	0,21			100,00	
Bali	1,96	1,31	31,84	51,77	1,58	10,86	0,60	0,09		100,00	
Nusa Tenggara Barat	0,80	0,14	5,73	71,49	8,58	12,91	0,02		0,32	100,00	
Nusa Tenggara Timur	0,55	1,16	4,04	72,53	5,28	14,53	0,10		1,81	100,00	
Kalimantan Barat	0,68	0,49	0,54	70,86	1,38	25,65	0,09		0,29	100,00	
Kalimantan Tengah	0,47	0,24	0,30	58,32	3,81	36,24	0,04		0,59	100,00	
Kalimantan Selatan	0,47	0,55	0,28	50,20	3,78	44,33	0,22		0,17	100,00	
Kalimantan Timur	0,57	0,64	1,69	50,31	2,58	43,11	0,49	0,27	0,34	100,00	
Sulawesi Utara	0,85	0,41	3,67	48,12	10,38	36,18		0,05	0,33	100,00	
Sulawesi Tengah	0,49	0,46	2,42	50,51	5,67	39,75			0,71	100,00	
Sulawesi Selatan	0,41	0,35	0,94	61,67	5,47	29,98	0,22		0,95	100,00	
Sulawesi Tenggara	0,35	0,44	0,91	50,69	7,91	37,67	0,08	0,26	1,67	100,00	
Gorontalo	0,40	0,96	5,02	42,54	15,65	34,57	0,17	0,09	0,60	100,00	
Sulawesi Barat	0,10		1,77	53,26	3,80	40,08	0,36		0,64	100,00	
Maluku	1,11	0,49	1,72	73,34	8,33	12,66	0,43		1,93	100,00	
Maluku Utara	0,33		0,74	66,78	12,31	16,77	0,11	0,21	2,76	100,00	
Papua Barat	0,79	0,71		58,54	3,76	31,92			4,28	100,00	
Papua	0,38	0,38	1,72	32,29	2,89	11,43	0,39		50,51	100,00	
<b>INDONESIA</b>	<b>1,04</b>	<b>0,56</b>	<b>2,43</b>	<b>67,70</b>	<b>4,78</b>	<b>22,40</b>	<b>0,23</b>	<b>0,05</b>	<b>0,83</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008

**Tabel 6.7.3 Persentase Pemuda Perempuan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan									
	MOW Tubektomi	MOP Vasektomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk/ Impalnt	Pil KB	Kondom/ Karet KB	Intravag	Tradi- sional	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nanggroe Aceh Daruss	0,72	0,69	2,06	69,50	0,71	24,57	0,64		1,11	100,00
Sumatera Utara	2,14	0,34	3,49	53,47	3,86	32,80	1,24	0,07	2,58	100,00
Sumatera Barat	0,96	0,58	4,80	65,15	8,02	18,44	0,58	0,14	1,33	100,00
Riau	0,57	0,64	2,70	65,20	2,28	26,19	1,26	0,25	0,91	100,00
Jambi	0,67	0,33	1,99	64,91	4,41	27,20	0,16	0,04	0,29	100,00
Sumatera Selatan	0,93	0,72	1,19	73,14	7,36	15,72	0,44	0,08	0,42	100,00
Bengkulu	0,77	0,57	2,54	70,69	8,06	16,21	0,54	0,04	0,58	100,00
Lampung	0,70	0,73	1,95	72,00	4,92	18,81	0,38	0,09	0,42	100,00
Bangka Belitung	0,58	0,61	0,94	60,12	1,53	34,07	0,94	0,08	1,13	100,00
Kepulauan Riau	0,81	0,52	5,11	50,19	1,92	37,42	1,20	0,04	2,81	100,00
DKI. Jakarta	1,09	0,42	7,85	64,69	2,44	21,92	0,79	0,15	0,65	100,00
Jawa Barat	0,82	0,59	4,57	63,74	2,19	27,48	0,33	0,03	0,27	100,00
Jawa Tengah	1,68	0,59	3,57	75,59	5,31	12,00	0,70	0,05	0,51	100,00
DI. Yogyakarta	2,76	0,32	15,37	59,37	4,22	11,81	2,94	0,28	2,92	100,00
Jawa Timur	1,68	0,39	4,48	67,26	3,74	21,18	0,47	0,07	0,73	100,00
Banten	1,07	0,35	2,75	75,78	2,52	16,77	0,68		0,07	100,00
Bali	2,22	0,81	27,31	52,29	1,14	14,22	1,22	0,14	0,66	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,84	0,39	6,37	72,44	7,11	12,11	0,37	0,06	0,32	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,63	1,24	5,91	68,95	5,46	15,40	0,16		2,24	100,00
Kalimantan Barat	0,68	0,45	1,38	68,03	1,27	27,14	0,36		0,70	100,00
Kalimantan Tengah	0,50	0,26	0,33	58,52	3,09	36,36	0,25		0,69	100,00
Kalimantan Selatan	0,72	0,58	0,93	50,11	3,48	43,49	0,46		0,23	100,00
Kalimantan Timur	0,72	0,48	4,07	51,64	2,30	39,52	0,82	0,18	0,26	100,00
Sulawesi Utara	0,71	0,52	4,41	50,71	8,23	34,93	0,15	0,03	0,30	100,00
Sulawesi Tengah	0,45	0,38	3,01	50,54	5,03	39,75			0,85	100,00
Sulawesi Selatan	0,44	0,36	2,02	62,09	4,29	29,36	0,37		1,07	100,00
Sulawesi Tenggara	0,28	0,51	1,44	49,78	7,92	37,93	0,24	0,21	1,68	100,00
Gorontalo	0,50	1,01	6,63	42,21	13,36	35,40	0,30	0,06	0,53	100,00
Sulawesi Barat	0,07		2,08	55,43	3,26	38,08	0,26		0,82	100,00
Maluku	1,31	0,34	2,08	72,74	5,90	15,34	0,29		2,00	100,00
Maluku Utara	0,47	0,39	0,70	67,89	10,22	17,70	0,08	0,14	2,40	100,00
Papua Barat	0,54	1,13	0,29	59,74	3,42	31,32			3,56	100,00
Papua	0,70	0,27	2,10	37,89	4,30	16,69	0,59		37,46	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>1,14</b>	<b>0,52</b>	<b>4,20</b>	<b>65,86</b>	<b>3,87</b>	<b>22,92</b>	<b>0,56</b>	<b>0,06</b>	<b>0,87</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2008